TOLERANSI YANG OTENTIK

Terlepas dari pengaruh faktor-faktor non-teologis, intoleransi terjadi karena toleransi yang otentik belum tertanam dalam budaya bangsa. Yang terjadi adalah toleransi formal-transaksional. Seseorang bersikap toleran lebih karena koeksistensi sosiologis, ekonomi, atau politik.

Buku yang ada di tangan pembaca merupakan kumpulan dari artikel yang dimuat di berbagai media massa. Alasan sederhana adalah agar gagasan-gagasan lepas dan tercerai berai dapat terhimpun sebagai gagasan yang relatif utuh dan sistematis. Melalui buku ini penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan salah satu masalah bangsa yaitu intoleransi, kekerasan, polarisasi sosial-politik, dan perdamaian yang bernuansa agama, khususnya Islam, dan masalah-masalah lainnya.

MAJELIS PUSTAKA & INFORMASI
PP MUHAMMADIYAH

AL-WASAT PUBLISHING HOUSE

ISBN: 978-602-7626-38-6
9 786027 626386

TOLERANSI YANG OTENTIK ABDUL MU'TI

ABDUL MU'TI

TOLERANSI YANG OTENTIK

Menghadirkan Nilai Kemanusiaan dan Keterbukaan dalam Beragama, Berpolitik, dan Peradaban Global

TOLERANSI YANG OTENTIK

ABDUL MU'TI

TOLERANSI YANG OTENTIK

Menghadirkan Nilai Kemanusiaan dan Keterbukaan dalam Beragama, Berpolitik, dan Peradaban Global

MEJELIS PUSTAKA & INFORMASI
PP MUHAMMADIYAH

TOLERANSI YANG OTENTIK

Menghadirkan Nilai Kemanusiaan dan Keterbukaan dalam Beragama, Berpolitik, dan Peradaban Global

Karya: Abdul Mu'ti

Penyelaras: Dinan Hasbudin AR
Pewajah sampul dan isi: desain651@gmail.com

Diterbitkan oleh:
Al-Wasat Publishing House
Jl. Legoso Raya No. 6 Ciputat Timur, Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021-7418674
Email: alwasathpenerbit@gmail.com

bersama:
Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta
Telp. 021-3903021-22; Email: mpijakarta62@gmail.com

ISBN: 978-602-7626-38-6
Cetakan I: Agustus 2019

Kata Pengantar

"Mas Mukti, apakah ada buku yang baru?" Berulangkali penulis menerima pertanyaan tersebut. Jawabannya sama: "Belum ada buku baru."

Penulis baru menyadari bahwa buku yang terakhir terbit adalah *Kristen Muhammadiyah* bersama Mas Fajar Rizaulhaq dan *Inkulturasi Islam* yang merupakan kumpulan tulisan di media massa dan ceramah di berbagai forum. Kedua buku tersebut terbit 2009. Sudah sepuluh tahun. Beberapa tulisan dimuat di media massa dan bunga rampai.

Buku yang ada di tangan pembaca merupakan kumpulan dari artikel yang dimuat di berbagai media massa. Alasan sederhana adalah agar gagasan-gagasan lepas dan tercerai berai dapat terhimpun sebagai gagasan yang relatif utuh dan sistematis. Melalui buku ini penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan salah satu masalah bangsa yaitu intoleransi, kekerasan, polarisasi sosial-politik, dan perdamaian yang bernuansa agama, khususnya Islam, dan masalah-masalah lainnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Terima kasih kepada Kang Dinan Hasbudin, Mas Aqil Aulia Wafda, Mas Izza Rohman Nahrowi, dan sahabat-sahabat yang telah membantu mengumpulkan dan menghadirkan buku ini. Terima kasih kepada keluarga, khu-

susnya isteri tercinta (Hj. Masmidah) dan anak-anak tersayang (Aqil Aulia Wafda, Brilliant Dwi Izzulhaq, dan Melati Niswa Qanita). Terima kasih Ibunda Kartinah yang doa-doanya memudahkan setiap langkah menuju kehidupan yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Terima kasih kepada Penerbit al-Wasth yang sekian kali menjadi mitra utama penerbitan buku-buku penulis.

Semoga buku sederhana ini berguna. Mohon masukan dan catatan agar penulis bisa terus belajar dan berkarya lebih baik lagi.

Pondok Cabe Ilir, Agustus 2019

Abdul Mu'ti

Isi Buku

3. TOLERANSI DALAM DUNIA GLOBAL—157

TOLERANSI DALAM BERAGAMA

Toleransi yang Otentik

Dalam berbagai forum dunia, Indonesia dipuji sebagai negara dengan toleransi beragama yang tinggi. Pemeluk agama yang berbeda-beda hidup damai dan harmonis. Indonesia bahkan sering dijadikan model di mana negara yang mayoritas penduduknya Muslim tidak mendirikan negara Islam, melainkan Pancasila.

Bahwa secara umum kehidupan keagamaan di Indonesia aman dan damai tidak dapat dipungkiri. Tetapi, realitas keagamaan masih jauh dari cita ideal. Kerusuhan bernuansa agama di Tolikara, Manokwari, Singkil, dan tempat lainnya menunjukkan bagaimana kerukunan dan toleransi yang sejati belum terwujud. Dalam tubuh umat Islam masih terdapat kelompok yang menolak eksistensi Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. Pendirian tempat ibadah semakin sulit dan berbelit.

Toleransi yang Otentik

Terlepas dari pengaruh faktor-faktor non-teologis, intoleransi terjadi karena toleransi yang otentik belum tertanam dalam budaya bangsa. Yang terjadi adalah toleransi formal-transaksional. Seseorang bersikap toleran lebih karena koeksistensi sosiologis, ekonomi, atau politik. Misalnya, seseorang yang tinggal di perumahan atau perkampungan yang plural cenderung bersikap

toleran semata-mata demi menjaga ketenteraman warga, *ewuh-pakewuh*, atau basa-basi. Toleransi formal-transaksional bersifat seremonial, superfisial dan periferal. Ucapan selamat Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, atau Imlek hanyalah untuk memenuhi tata-krama sosial, bukan dari ketulusan iman.

Selain itu terdapat pula toleransi instrumental. Sikap toleransi dimaksudkan untuk pencitraan diri. Seorang penjabat mengucapkan dan mengikuti perayaan agama tertentu lebih karena tugas formal organisasi atau birokrasi, yang terkadang bertentangan dengan nurani. Sikap toleran hanyalah alat memperoleh atau mempertahankan jabatan dan kekuasaan politik. Toleransi tersebut ibarat bara dalam sekam.

Karena itu diperlukan toleransi yang otentik. Toleransi ini terdiri atas lima sikap. *Pertama*, menyadari adanya perbedaan agama dan keyakinan. Kesadaran ini ditunjukkan oleh sikap terbuka terhadap identitas diri dan keyakinan. Tidak ada usaha menutupi. *Kedua*, memahami perbedaan yang ditunjukkan oleh sikap dan minat belajar agama lain, baik persamaan maupun perbedaan. Tanpa harus menjadi agamawan, sikap ini ditandai oleh keberanian memahami agama dari sumber utama, bukan interpretasi lahiriah pengamalan agama. *Ketiga*, menerima orang lain yang berbeda agama. Sikap ini ditunjukkan dengan penghormatan atas keyakinan dengan tetap menjaga kemurnian akidah, menghindari sinkretisme atau pluralisme yang menyamakan semua agama. *Keempat,* memberikan kesempatan dan memfasilitasi pemeluk agama lain untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Termasuk dalam sikap ini adalah mempermudah pendirian tempat ibadah, bukan mempersulit dengan alasan birokratis-politis. *Kelima*, membangun kerja sama dalam hal-hal yang merupakan titik-temu ajaran dan nilai-nilai agama

yang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Misalnya kerja sama dalam bidang anti korupsi, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, pengrusakan lingkungan hidup dan sebagainya.

Peran Kementerian Agama

Membangun toleransi yang otentik bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag), tetapi seluruh komponan bangsa. Walau demikian, secara kelembagaan Kemenag memiliki peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Sesuai Undang-undang Dasar 1945, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara.

Karena itu, untuk membangun toleransi yang otentik Kemenag dapat melaksanakan tiga peran. *Pertama,* peran politis; menjadikan institusi Kemenag dari tingkat pusat sampai daerah sebagai rumah bagi semua umat beragama. Secara kelembagaan Kemenag perlu mengembangkan sistem dan budaya meritokrasi di mana penghargaan diberikan kepada yang berprestasi bukan karena afiliasi organisasi, partai politik, atau kroni.

Kedua, peran edukatif. Administrasi Kemenag meliputi pembinaan madrasah dan penyelenggaraan pendidikan Agama di sekolah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap intoleransi sebagiannya disebabkan oleh materi buku-buku teks dan metode pendidikan Agama. Adalah keniscayaan Kemenag mengembangkan buku teks dan sistem pendidikan Agama yang kritis dan pluralistis dengan berbagai kebijakan. *Pertama*, memberikan kesempatan dan keleluasaan masyarakat mengembangkan teks

pendidikan Agama di institusi pendidikan yang dikelolalnya. *Kedua,* teks-teks pendidikan Agama, terutama yang terkait dengan ibadah, memuat perbandingan antar madzhab sesuai dengan jenjang pendidikan. *Ketiga,* membangun tradisi dialog dalam pendidikan Agama yang memungkinkan siswa menyampaikan pandangan dan pengalaman keagamaannya. Dengan peran ini adanya kesan Kemenag membawa misi keagamaan kelompok tertentu dapat dihapuskan.

Ketiga, peran advokasi. Kemenag adalah harapan terakhir bagi umat beragama yang mengalami kesulitan, terutama bagi kelompok minoritas. Walaupun tidak banyak mengalami kekerasan fisik, kelompok minoritas masih sering mengalami kekerasan teologis seperti penistaan, *hate speech*, tuduhan aliran sesat, dll. Ratusan kelompok minoritas masih tinggal di pengungsian, entah kapan kembali ke kampung halaman. Pemerintah semestinya berdiri tegak di atas undang-undang, bukan menuruti tekanan arus utama.

Semoga Kemenag dapat melaksanakan tiga peran tersebut. Semoga bangsa Indonesia dapat hidup rukun dan damai dengan toleransi beragama yang otentik.

Soft-Pluralism

Dalam waktu berdekatan, dua kekerasan bernuansa keagamaan terjadi di Sumateta Utara. Pembakaran Vihara di Tanjung Balai dan penyerangan pastor di sebuah gereja sungguh mengejutkan. Selama ini, Sumateta Utara dikenal sebagai kawasan yang aman dari berbagai kerusuhan rasial bahkan menjadi kawasan percontohan kerukunan agama dan kesukuan.

Terkait kasus Tanjung Balai, Menteri Agama dan pejabat setempat menjelaskan bahwa penyebab kerusuhan bukanlah agama melainkan masalah sosial. Kerusuhan. merupakan ekspresi kemarahan warga terhadap seorang dari etnis tertentu yang melakukan "perbuatan tidak menyenangkan". Penyerangan pastor oleh seorang remaja belia masih dalam penyelidikan aparatur keamanan.

Segregasi Sosial

Mengapa masyarakat mudah marah dan melakukan tindak kekerasan? Pertama, masalah kesenjangan sosial, terutama dalam bidang ekonomi. Fakta dan narasi kesenjangan antar kawasan dan kelompok semakin jelas. Dalam banyak kasus, kesenjangan adalah pemantik konflik sosial yang tidak mudah dipadamkan. Riset membuktikan bahwa ekonomi merupakan faktor utama yang

mendorong kekerasan bernuansa agama dan suku di berbagai tempat baik di tanah air maupun manca negara.

Kedua, menguatnya identitas primordial agama, suku, dan golongan. Di tengah kemajuan multikulturalisme dan pluralisme tumbuh gejala sektarianisme. Di tengah keterbukaan budaya masyarakat semakin percaya diri menunjukkan dan mendemonstrasikan dengan identitasnya di ruang publik. Pada sisi yang lain sebagian masyatakat khawatir terhadap hilangnya identitas sehingga cenderung konservatif dan over sensitif terhadap kelompok lain sehingga melahirkan rasisme, ekslusivisme, fundamentalisme, dan bentuk-bentuk sikap anti sosial lainnya.

Ketiga, rendahnya interaksi antar warga. Kesibukan pekerjaan dan gaya hidup masyarakat modern membuat interaksi personal sangat terbatas. Teknologi komunikasi dan informasi semakin mendekatkan warga di dunia maya tetapi menjauhkan mereka di dunia nyata. Budaya kekerabatan dan kewargaan seperti gotong royong dalam beragam bentuknya semakin pudar. Pertemuan dan interaksi antar warga masyarakat sangat terbatas sehingga tidak terbangun ikatan dan keakraban sosial. Masyarakat hidup bersama tetapi tidak bersama-sama.

Keempat, dampak sosiologis dan psikologis kesejahteraan ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan pokok mendorong seseorang untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, nyaman, privasi, pengakuan sosial, dan aktualisasi diri. Eksistensi kelas menengah dan komunitas “orang kaya baru” melahirkan neo-feodalisme yang mewujud dalam sikap egoisme, individualisme, dan tuntutan personal entitlement yang berlebihan. Di tengah alam money-theisme kelompok “super class” menjadi begitu superior, dominan, dan determinan dalam hampir semua bidang. Dengan segala perilakunya kelompok elit yang elitis ti-

dak disukai oleh kaum alit. Sebuah kesalahan sepele berpotensi menimbulkan reaksi massa yang destruktif.

Kelima, penyelesaian masalah yang cenderung mengedepankan pendekatan hard-pluralism. Bentuk pendekatan ini ada dua macam. Pertama, pembuatan seperangkat hukum dan undang-undang yang melindungi warga dan membangun kerukunan secara legal. Kedua, memberikan sanksi hukum atas mereka yang melanggar hukum dan peraturan. Di satu sisi pendekatan ini sejalan dengan sistem negara hukum. Tetapi karena bersifat eksternal maka tidak mampu menumbuhkan toleransi sejati. Yang terbangun adalah kerukunan legal-formal yang instrumental-kontraktual. Lemahnya penegakan hukum dan korupsi penerapan kebijakan membuat pendekatan hard-pluralism hanya dapat menjadi pendekatan awal. Diperlukan prndekatan lain yang bersifat kultural yaitu soft-pluralism.

Soft-pluralism

Pendekatan ini meniscayakan langkah-langkah kultural yang meliputi proses kognisi, internalisasi, institutionalised, dan inkulturasi.

Masyarakat perlu mengenal satu sama lainnya dengan baik tidak terbatas pada pengamatan perilaku empiris tetapi juga ajaran dan nilai yang melandasinya. Proses ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal yang berisi studi masyarakat yang terdekat dengan lingkungan sosial peserta didik. Pemahaman ini dapat diajarkan dalam suatu mata pelajaran atau pengayaan bahan bacaan.

Langkah kedua melalui inklusi sosial. Langkah ini memerlukan rekayasa sosial dan kebijakan yang memungkinkan masyarakat berinteraksi sosial secara alamiah. Pembangunan tata kota

dirancang secara seksama sehingga tidak menumbuhsuburkan pembentukan "cluster" sosial berdasarkan kelas ekonomi, suku, dan agama. Hunian ekslusif yang terisolir dari masyarakat sejauh mungkin dibatasi.

Lembaga-lembaga sosial seperti RT dan RW memiliki peranan penting. Selama ini peranan RT/RW berubah menjadi institusi birokrasi dan politik yang melayani administrasi pemerintahan. Saatnya dilakukan revitalisasi RT/RW dengan kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat kegotong-royongan, paguyuban, dan tanggung jawab kewargaan. Ketersediaan balai warga yang memungkinkan warga masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan usia saling bertemu dan interaksi menjadi sangat niscaya. Sekarang ini, peran balai warga digantikan oleh tempat ibadah yang terkadang menjadi salah satu penyemai segregasi sosial.

Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun ikatan kebangsaan. Ikatan ini dapat dijalin melalui forum peringatan hari besar nasional, pertandingan olahraga raga dan sebagainya.

Sebagai sebuah gerakan budaya, soft-pluralism dikembangkan ke arah terbentuknya budaya ramah (*a culture of hospitality*) untuk menihilkan budaya marah (*a culture of histility*). Menumbuhkan budaya ramah bukanlah merekayasa budaya yang baru. Keramahan adalah kekayaan bangsa yang hilang terempas dan terampas oleh politik yang keras dan Kesenjangan ekonomi yang buas. Membangun budaya ramah adalah menegakkan kembali saja guru rumah ke-Indonesiaan yang nyaris roboh.

Kedewasaan Beragama

Secara umum kehidupan dan hubungan antar dan intern umat beragama di Indonesia sangat baik. Indonesia bahkan menjadi model kerukunan bagi negara-negara lainnya. Hal demikian tidak berarti Indonesia nihil kekerasan keagamaan. Jumlah kekerasan dalam berbagai ekspresi mulai dari sikap intoleransi sampai pengrusakan memang sangat rendah. Tetapi, ada tendensi perubahan pelaku kekerasan.

Selama ini kekerasan identik dengan kelompok radikal Salafi-Wahabi dan kelompok ultra konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, dan sebagainya. Belakangan, kekerasan justru dilakukan oleh kelompok yang menyatakan dirinya sebagai organisasi moderat. Selama ini korban kekerasan adalah kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan "aliran sesat". Belakangan yang menjadi sasaran kekerasan adalah Muhammadiyah. Selama September-Oktober 2017, Muhammadiyah dua kali menjadi sasaran kekerasan. Di Aceh, sebuah balai pengajian dan tiang pancang masjid dibakar massa. Di Jepara, kegiatan menghafal Al-Qur'an yang diselenggarakan Ittihad Ma'had Muhammadiyah (ITMAM) dibubarkan. Kekerasan Di Aceh dan Jepara dilakukan dua kelompok yang berbeda. Tetapi, alasan mereka sama yaitu anti Wahabi.

Wahabiphobia

Sejak merebaknya kasus terorisme dan pemberantasan terorisme, sebagian masyarakat seakan mengalami gejala "Wahabiphobia". Gejala ini ditandai oleh beberapa indikator. Pertama, penilaian Wahabi sebagai kelompok puritan yang intoleran terhadap liyan yang berbeda pemahaman dan keyakinan baik di dalam internal umat Islam maupun pemeluk agama lain. Mereka juga dianggap anti tradisi keagamaan dan budaya lokal serta menuduh liyan sebagai kafir dan ahli bid'ah.

Kedua, Wahabi dinilai sebagai sarang dan biang terorisme. Banyak aktor terorisme yang tertangkap terindikasi sebagai penganut Wahabi. Ketiga, Wahabi dianggap sebagai penentang Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menolak hukum positif dengan mengampanyekan formalisasi Syariat Islam dan mendirikan negara Islam melalui pembentukan Khalifah.

Wahabiphobia terlihat dalam berbagai ekspresi. Di media sosial banyak beredar pernyataan tokoh yang sarat ujaran kebencian dalam wujud sarkasme, sinisme, dan kekerasan verbal lainnya. Beberapa kali kegiatan tabligh akbar oleh ustadz tertentu yang dianggap sebagai simpatisan atau berafiliasi Wahabi dibubarkan. Para pelakunya mengaku sebagai penegak NKRI. Memang ironis. Bagaimana kelompok yang selama ini memproklamirkan dirinya sebagai masyarakat yang humanis dan toleran justru menjadi arogan dan intoleran.

Dalam tubuh umat Islam memang terdapat kelompok puritan yang intoleran dan ekslusif. Mereka suka menyalahkan dan menyerang kelompok lain. Akan tetapi, reaksi berlebihan terhadap kelompok Wahabi dengan cara kekerasan sejatinya merupakan bentuk intoleransi dan radikalisme juga.

Wahabiphobia memang tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor teologis. Dimensi politiknya sangat kasat mata. Selain itu, persoalan kematangan beragama juga berperan di dalamnya.

Kedewasaan Beragama

Dalam pengertian sehari-hari, dewasa (*baligh*) adalah batas usia tertentu yang ditandai oleh kematangan fisik. Sayangnya, kematangan fisik, lebih banyak dikaitkan dengan fungsi dan kematangan reproduksi. Laki-laki disebut baligh apabila sudah mengalami mimpi basah (*ihtilam*). Baligh bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Pemahaman baligh tersebut perlu ditinjau kembali sebab beragama bukanlah semata-mata urusan reproduksi.

Dewasa (*baligh*) di dalam beragama dapat dilihat dari beberapa aspek; pemahaman, ketaatan, dan keterbukaan. Gordon Allport, sebagaimana dikutip oleh Ismail, 2007: 4-5 memiliki enam ciri-ciri. Pertama, diferensiasi yang baik; mengimani kuat agama yang dianutnya, tapi pada sisi yang lain juga mau belajar kepada siapa pun termasuk kepada pemeluk agama lain

Kedua, motivasi kehidupan yang dinamis; menjadikan agama sebagai tujuan dan kekuatan untuk mengatasi setiap persoalan hidup.

Ketiga, konsistensi; pelaksanaan secara konsisten dan produktif; berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran agamanya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, pandangan hidup yang komprehensif; mampu menerima perbedaan pemikiran dan pendapat dengan orang lain sehingga mampu menghindari konflik dan kekerasan.

Kelima, pandangan hidup yang integral; menyatukan atau menyelaraskan antara ajaran agama dengan aspek lain dalam kehidupannya.

Keenam, heuristik; meningkatkan pemahaman dan penghayatan dalam beragama.

Menjawab Tantangan

Secara umum, kehidupan beragama di Indonesia baik sekali. Bangsa Indonesia memiliki tingkat ketaatan dan komitmen beragama yang tinggi. Kesalehan spiritual yang ditandai oleh kepatuhan melaksanakan ibadah mahdlhah seperti salat, puasa, dan haji sangat tinggi. Setiap Jumat, semua masjid penuh sesak oleh jamaah.

Demikian halnya dengan toleransi. Walaupun terdapat beberapa kasus intoleransi, kekerasan, dan konflik keagamaan, hubungan antar umat beragama terjalin dengan baik. Tidak hanya kerukunan, diantara umat beragama juga mulai terjalin kerja sama.

Akan tetapi, kematangan beragama di Indonesia masih rendah. Gejala intoleransi cenderung meningkat. Pertama, intoleransi teologis. Intoleransi ini ditandai oleh sikap negatif terhadap agama dan kelompok lain. Diantara sikap negatif tersebut adalah menyebut kelompok lain sebagai keyakinan yang tidak aseli, aliran sesat, dan kelompok radikal, liberal, dan berbagai stereotipe keagamaan lainnya.

Kedua, gejala intoleransi yuridis. Menolak eksistensi kelompok lain dengan "menyiasati" berbagai regulasi. Yang paling banyak dilakukan adalah melarang pendirian tempat ibadah dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian tempat ibadah. Penolakan berdasarkan PBM dilakukan dengan alasan jumlah pemeluk agama yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak adanya persetujuan masyarakat setempat.

Ketiga, intoleransi politis. Banyak kasus di mana umat beragama tertentu mengalami kekerasan baik fisik maupun teologis akibat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menguatnya politik identitas dan populisme keagamaan membuat kelompok minoritas hidup dalam kesulitan dan tekanan. Di Aceh, warga Muhammadiyah mendapat halangan kelompok adat. Beberapa kali usaha warga Muhammadiyah mendirikan masjid di Bireun ditolak oleh masyarakat. Bahkan ijin mendirikan bangunan yang sudah diterbitkan bupati dicabut kembali karena tekanan massa mayoritas. Di Bali, umat Islam kesulitan mendirikan masjid karena penolakan masyarakat adat. Di Bekasi, Bogor, dan beberapa daerah di Jawa umat Kristen gagal membangun Gereja.

Terjadinya kasus-kasus intoleransi merupakan tantangan tersendiri. Ketaatan beragama belum berkorelasi dengan sikap dewasa memahami, menghormati, menerima, dan mengakomodasi mereka yang berbeda. Ekslusivisme dan ektremisme sebagai benih dan bentuk intoleransi perlu segera ditanggulangi. Jawaban atas intoleransi bukanlah dengan menerbitkan regulasi atau membawa masalah ke kantor polisi, tetapi dengan menumbuhkan dan mengembangkan kematangan beragama.

Puasa dan Pluralitas Agama

Puasa adalah ibadah yang wajib ditunaikan bagi orang *mukallaf.* Seseorang disebut *mukallaf* apabila memenuhi lima hal: beragama Islam, berusia dewasa *(baligh)*, berakal sehat, menerima dakwah, dan merdeka. Sesuai hukum *taklifi*, ibadah tertentu memiliki ketentuan khusus yang tidak berlaku pada ibadah yang lainnya.

Ibadah puasa hanya diwajibkan bagi kaum beriman: orang Islam yang melaksanakan ajaran agamanya. *"Wahai kaum beriman, wajib bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu agar kamu menjadi kaum yang bertakwa.* " (QS. Al-Baqarah:183). Puasa bersifat ekslusif: selain diperuntukkan khusus bagi kaum beriman, puasa memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus kepada hamba-Nya. Di dalam sebuah Hadits disebutkan: Puasa itu urusan-Ku, dan Akulah yang memiliki otoritas mutlak untuk menilai dan menetapkan pahalanya.

Tidak seluruh Muslim wajib menunaikan puasa Ramadhan. Mereka yang sedang bepergian, sakit, atau fisiknya ringkih mendapat dispensasi dan alternasi dengan mengkadha di luar bulan Ramadhan atau membayar *fidyah* (QS. Al-Baqarah: 184). Islam adalah agama yang terbuka; tidak memaksa (QS. Al-Baqarah:

256), ringan; sesuai kemampuan manusia (QS. Al-Baqarah: 286), mudah; tidak sulit dan mempersulit (QS. Al-Baqarah: 185; QS. Al-Hajj: 78). Ketentuan Syariat tersebut menimbulkan realitas sosial dan pluralitas agama. *Pertama,* kaum Muslim yang berpuasa dan taat menjalankan ajaran agamanya. *Kedua,* masyarakat Muslim yang mematuhi ajaran agamanya tetapi tidak berpuasa karena keadaan dan kondisi fisiknya. *Ketiga,* masyarakat yang mengaku Muslim tetapi tidak berpuasa karena membangkang ajaran Tuhan. *Keempat,* masyarakat non-Muslim yang tidak berpuasa karena keyakinan dan tidak ada kewajiban menunaikan.

Kematangan Beragama

Puasa adalah ibadah orang dewasa. *Pertama,* kewajiban puasa hanya berlaku bagi mereka yang *baligh* secara fisik, psikis, dan teologis. *Baligh* secara fisik adalah mereka yang berusia dewasa ditandai dengan mulai berkembangnya ciri-ciri sekunder pria dan wanita dan fungsi-fungsi reproduksi. Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa. Secara psikis seseorang dikatakan *baligh* apabila memiliki tiga kemampuan intelektual. *Pertama,* kapasitas intelektual: tingkat pengetahuan yang memungkinkan seseorang melaksanakan sesuatu dengan baik. *Kedua,* moralitas intelektual: kemampuan intelektual yang memungkinnya membedakan nilai dan perilaku yang baik dan buruk serta benar-dan salah. *Ketiga,* kesadaran intelektual: berakal sehat dan melaksanakan sesuatu dengan penuh kesadaran. Orang yang memiliki gangguan jiwa, mabuk, tidur, dan keadaan lain di mana akal tidak berfungsi dengan baik terlepas dari kewajiban agama. Seseorang dapat disebut baligh secara teologis apabila telah menerima dakwah Islam. Tidak disebut *mukallaf* mereka yang tidak mengamalkan Islam karena belum pernah menerima pelajaran tentang Islam.

Kedua, sebagai implementasi dan aktualisasi ibadah orang dewasa, puasa meniscayakan kematangan beragama. Menurut Gordon Allport sebagaimana dikutip Ismail (2007: 4) kematangan beragama memiliki enam kriteria: (1) differensiasi: teguh memeluk suatu agama, tetapi terbuka terhadap pemeluk agama lain; (2) dinamis dan optimistis: menjadikan agama sebagai tujuan dan kekuatan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan; (3) konsisten dan produktif: berperilaku sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama; (4) komprehensif dan terbuka: mampu memahami dan menerima perbedaan pendapat serta menghindari konflik dengan mereka yang berbeda; (5) pandangan yang integral: mampu menyelaraskan dan mengintegrasikan agama dengan kehidupan; (6) heuristik: senantiasa meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.

Saling Menghormati

Kematangan beragama merupakan proses yang tingkatan dan pencapainnya berbeda-beda. Sesuai Al-Baqarah: 183, motivasi dan kualitas puasa ditentukan oleh "faktor dalam": iman dan ikhlas. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan perkembangan memerlukan penguatan dari luar: lingkungan fisik dan sosial yang kondusif. Dalam konteks ini, diperlukan kedewasaan dan kearifan agar mereka yang tidak berpuasa dapat memahami dan menghormati yang sedang berpuasa. Dalam hal tertentu, mungkin perlu kebijakan Pemerintah, kantor, dan perusahaan swasta yang memungkinkan kaum Muslim menunaikan ibadah dengan sempurna.

Pada sisi yang lain, Muslim yang berpuasa hendaknya bersikap dewasa. Puasa merupakan panggilan iman dan kesadaran pribadi. Karena itu tidak perlu meminta dispensasi dan berbagai

keistimewaan. Mereka yang berpuasa juga seharusnya mampu menghormati, menerima, melayani, dan mengakomodasi mereka yang tidak berpuasa. Biarlah warung makan dan restoran tetap buka sebagaimana mestinya. Sejatinya, pengurangan jam kerja, pembatasan pelayanan publik, dan pemasangan tabir rumah makan tidak diperlukan. Niat utama berpuasa adalah ibadah. Tidak perlu manja. Mari melaksanakan puasa dengan ikhlas mengharap ridla Allah SWT. Mari membangun toleransi dan saling menghormati mereka yang tidak berpuasa baik Muslim atau non-Muslim..

Menghajikan Indonesia

> "Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda: Islam itu ditegakkan atas lima rukun; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Umat Islam meyakini bahwa ibadah haji merupakan indikator kesempurnaan keislaman. Mereka berpendapat urutan penyebutan rukun Islam dalam teks Hadits dimaknai sebagai hirarki atau tingkatan kesempurnaan berislam. Pengertiannya, sebelum menunaikan ibadah haji seseorang harus terlebih dahulu bersyahadat, salat, puasa, dan zakat. Empat rukun Islam yang lain merupakan prasyarat untuk seseorang dapat berhaji. Itulah bekal haji. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an: *"... berbekallah untuk menunaikan ibadah haji. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah taqwa..."* (QS. 2, Al-Baqarah: 197). Demikianlah pendapat sebagian umat Islam.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa rukun Islam tidak menjelaskan urutan pelaksanaan tetapi kesempurnaan berislam. Secara syar'i lima rukun Islam memiliki ketentuan pelaksanaan dan waktu yang tersendiri. Tetapi, menurut pendapat ini, jika seseorang belum menunaikan seluruh rukun Islam maka belum

menjadi muslim yang sejati. Menunaikan ibadah haji justru menjadi sumber motivasi untuk menunaikan rukun Islam yang lainnya.

Sebagian yang lainnya berpendapat seseorang dapat menjadi muslim yang sempurna walaupun tidak atau belum menunaikan ibadah haji. *"Diwajibkan bagi manusia menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk menuju ke Baitullah "* (QS. 3, Ali Imran:97). Para ulama bersepakat ada lima syarat haji: Islam, baligh, berakal sehat, mampu, dan aman. Mampu meliputi empat aspek: material, intelektual, spiritual dan mental. Seseorang yang menunaikan ibadah haji harus memiliki ekonomi yang cukup untuk biaya haji, dan nafkah untuk dirinya serta keluarga yang ditinggalkannya. Jamaah haji harus mampu memahami tata cara pelaksanaan ibadah, dan kecakapan lain yang mendukung pelaksanaan ibadah. Jamaah haji seharusnya mandiri, tidak bergantung kepada pembimbing haji, baik dari Pemerintah atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Yang sangat penting adalah jaminan keamanan. Termasuk dalam konteks ini adalah situasi keamanan, kuota, keterpenuhan dokumen perjalanan, kenyamanan akomodasi, dan jaminan kesehatan. Kewajiban haji gugur ketika persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Perjalanan Spiritual

Haji adalah perjalanan spiritual manusia untuk meraih kekuatan iman, kesucian jiwa, dan kemuliaan hidup. Menurut sebuah Hadits, ibadah haji, sebagaimana puasa, dapat membersihkan manusia dari segala dosa sebagaimana ketika mereka baru lahir dari rahim ibunya. Peraih haji yang mabrur adalah calon penghuni surga. Selesai menunaikan haji terdapat tradisi mengganti nama. Tradisi ini merupakan simbol kelahiran kembali seseorang

sebagai manusia baru. Manusia yang bersih dari segala dosa dan berkomitmen mengisi kehidupan masa depan dengan senantiasa berbuat kebajikan.

Ibadah haji dimulai dengan niat dari miqat. Saat itu jamaah haji mulai memakai ihram. Manusia menanggalkan seluruh kebesaran duaniwinya. Ihram adalah simbol egalitatianisme kemanusiaan. Tidak ada primordialisme nasab-keturunan, rasial, material, jabatan, kebangsaan, dsb.

Setelah itu jamaah bergerak ke Baitullah untuk menunaikan thawaf. Thawaf menggambarkan kesatuan antar umat manusia. Putaran thawaf adalah simbolisasi perjalanan dan hidup menuju kebahagiaan. Dalam hidup harus senantiasa terikat, dekat, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak menyakiti, menghalangi, apalagi menyingkirkan sesama.

Setelah thawaf jamaah melaksanakan sai: berlari-lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwa. Ibadah haji merupakan napak tilas perjuangan Hajar, isteri Nabi Ibrahim, dalam menyelelamatkan anaknya, Ismail. Sa'i berarti bekerja keras. Shafa berarti kelembutan dan kasih sayang yang tulus. Marwa berari tekad yang kuat, kehormatan. Sa'i menggambarkan perjuangan ibu yang berjuang menyelamatkan kehidupan anaknya. Dalam konteks kebangsaan, Sa'i menarasikan tanggungjawab pemimpin dalam menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya.

Jamaah haji kemudian melanjutkan perjalanan menuju Arafah melalui Mina. Di Arafah jamaah melaksanakan Wuquf. Sesuai Hadits Nabi, wuquf merupakan inti haji: "*al-hajju arafah*." Wuquf adalah rukun haji yang apabila tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tidak syah. Pelaksanaan rukun haji boleh diwakilkan (badal). Akan tetapi, wuquf harus dilaksanakan sendiri, walaupun tidak sepenuh waktu. *Waqaf* berarti berhenti. Ini adalah sImbol bahwa

suatu saat manusia akan berhenti (mati) dan meninggalkan semua yang ada di dunia fana. Manusia melakukan refleksi hakikat dan kesejatian hidup serta mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan Yang Maha Hidup.

Selesai wukuf, jamaah menuju Mina untuk melontar jumrah atau menuju ke Mekah untuk menunaikan thawaf Ifadlah. Ibadah jumrah menggambarkan perjuangan Nabi Ibrahim melempar setan yang mengganggunya demi menunaikan pengabdiannya kepada Allah. Jumrah menggambarkan konsistensi dan keberanian manusia untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Dalam kehidupan sekarang ini banyak orang baik dan hebat tidak mampu istiqamah dalam memegang amanah karena bisikan jahat dan godaan keindahan dari orang-orang dekatnya.

Setelah itu jamaah melakukan *tahallul sughra*. Mereka boleh melepaskan pakaian ihram dan melaksanakan hal-hal yang terlarang selama ihram. Selama haji jamaah berpakaian ihram. Selama itu mereka tidak boleh memakai wewangian, pakaian berjahit (bagi laki-laki), tidak boleh berburu, membunuh binatang, mencabut tanaman, bertengkar, berkata kotor, bersetubuh, memotong kuku, menutup kepala, dan larangan lainnya. Ihram mengajarkan disiplin, kesederhanaan, kebersahajaan, kesabaran, kedamaian, dan keramahan kepada sesama manusia dan alam semesta. Tahallul mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hidup ini ada masa perjuangan dan saat menikmati buah usaha; *no pain no gain.* Siapa menanam mengetam.

Haji Untuk Indonesia

Kemuliaan dan nilai-nilai haji tersebut seringkali hilang. Haji dimaknai sebatas ritual formal sehinggatidakmembentuk karakter utama. Tidak sedikit kaum Muslim yang memaksakan diri untuk

berhaji dengan menyuap pejabat penentu kuota, memalsukan pasport, dan bentuk penipuan lainya. Haji adalah perbuatan utama sehingga harus diraih dengan rizki yang halal dan cara-cara yang benar. Haji adalah *privilege* dari Allah sehingga jika belum dapat berangkat karena keterbatasan kuota atau sebab-sebab lainnya, harus dimaknai sebagai kasih sayang Allah.

Pemerintah bersama-sama para ulama, Ormas Islam dan KBIH perlu menanamkan pemahaman bahwa masih banyak ladang ibadah lain selain haji. Perlu pemahaman dan aturan yang sangat ketat untuk masyarakat yang menunaikan haji berulangkali. Kewajiban haji hanya satu kali dan bahwa Rasulullah Muhammad SAW hanya sekali berhaji. Walaupun demikian, tetap diperlukan sistem informasi haji yang lebih baik dan penetapan kuota yang adil serta sanksi hukum yang tegas bagi siapa pun yang melanggar perundangan-undangan haji.

Berhaji bukanlah untuk memamerkan kekuatan, kekayaan, apalagi untuk berbisnis. Allah melaknat mereka yang berhaji dengan niat bisnis atau membisniskan haji. Tidak jarang terjadi selama di tanah suci seseorang berbisnis *badal* haji, menjadi joki thawaf, memeras saat tahallul, atau melakukan *mark up* harga binatang dam. Kecenderungan ini terjadi karena lemahnya kemandirian jamaah haji baik dalam ibadah, kecakapan hidup, maupun pelayanan. Sudah seharusnya Pemerintah memperbaiki pelayanan manasik, mengawasi secara seksama biro haji dan KBIH serta memberikan sanksi administrative dan hukum bagi KBIH dan biro yang nakal.

Haji adalah ibadah yang mengajarkan kelembutan, kejujuran, keramahan, kesabaran, toleransi dan kerja keras. Haji adalah ibadah kemanusiaan di mana kita memanusiakan, memuliakan, dan menyelematkan sesama manusia. Lebih dari itu, haji men-

didik manusia untuk tidak melampaui batas, menindas sesama, dan merusak alam semesta demi mencapai kebahagiaan pribadi dengan menindas dan menyingkirkan sesama.

Kehidupan sosial dan kebangsaan kita sekarang ini sangat jauh dari nilai-nilai haji. Korupsi, kekerasan, intoleransi, perdagangan manusia, eksploitasi alam masih merajalela. Inilah saatnya kita menghajikan Indonesia.[]

Kerja sama Muslim dan Yahudi

April 2013, saya bersama Romo Beny Susetyo (KWI), Pendeta Andreas Yewangoe (Ketua Umum PGI), Pendeta Gomar Gultom (Sekjen PGI) dan Dr. Rumadi (Lakpesdam) berkesempatan berkunjung ke Eropa. Agenda utama adalah mengadakan pertemuan dengan parlemen Eropa dan beberapa organisasi agama—terutama Kristen—di Belanda. Dalam kesempatan tersebut, kami mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan rahib perempuan liberal dalam sebuah sinagog di Amsterdam. Selain itu, kami juga berkesempatan berkunjung dan mengadakan pertemuan lintas iman di Masjid al-Hikmah Den Haag di mana saya bertemu dan sempat bertukar gagasan dengan para tokoh Yahudi.

Secara pribadi saya beberapa kali bertemu tokoh Yahudi dalam berbagai forum *interfaith* di Indonesia dan beberapa negara. Walaupun demikian, saya baru dua kali masuk ke sinagog. Pertama kali saya ke sinagog di Birmingham, Inggris, dalam rangkaian program *short course* di the University of Birmingham. Kesempatan kedua adalah ketika berkunjung ke Belanda. Di kedua sinagog itu saya berkesempatan mendengarkan pembacaan Taurat dari

scroll yang ditulis dengan tangan. Para rahib menjelaskan bagaimana sistem penulisan dan perawatan Taurat.

Yang paling berkesan adalah kesempatan berkunjung ke Masjid al-Hikmah. Masjid ini adalah dikelola komunitas muslim Indonesia. Takmirnya seorang staf KBRI Belanda berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya, Masjid al-Hikmah adalah sebuah gereja yang dibeli oleh komunitas muslim Indonesia. Bangunan aseli gereja tidak dirubah. Ornamen dan relief khas gereja juga tetap dipertahankan. Di Eropa dan negara-negara Barat, banyak gereja yang dirubah menjadi masjid. Bagi umat Islam membeli gereja lebih mudah dan lebih murah dibandingkan membangun masjid baru. Mengubah gereja menjadi masjid laksana "balik nama" pembelian tanah atau kendaraan bermotor. Tidak perlu mengurus ijin pendirian bangunan, persetujuan masyarakat sekitar, dan persyaratan perijinan lainnya. Bangunan gereja rata-rata masih kokoh dan memiliki seni arsitektur yang indah.

Kesan penting kedua adalah ketika saya berbincang dengan tokoh Yahudi. Di *meeting room* yang terletak di serambi masjid, tokoh Yahudi tersebut menceritakan agenda pertemuan dengan komunitas Muslim tentang kerja sama Muslim dan Yahudi. Bagi saya ini sangat menarik. Selama ini, kesan saya dan sebagian besar umat Islam, tidak ada kerja sama Muslim dan Yahudi. Di benak umat Islam, umat Yahudi adalah komunitas *notorious* dan *trouble maker*. Persepsi tersebut bahkan sudah menjadi *stereotype*. Sejak belajar di madrasah sampai kuliah dan mengikuti pengajian-pengajian, bangsa Yahudi adalah pembangkang dan biang keladi berbagai masalah dari sejak zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad dan dunia Islam sekarang ini. Persepsi negatif tersebut dibangun dengan referensi ayat-ayat Al-Qur'an dan sejarah, khususnya kejahatan Zionis Israel terhadap bangsa Palesti-

na. Solidaritas dan dukungan politik Pemerintah Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina memperkuat sikap anti-Yahudi bagi sebagian besar umat Islam Indonesia.

Saya sendiri tidak bermasalah dengan umat Yahudi. Saya berpendapat—sebagaimana dalam tubuh semua agama—orang-orang Yahudi berbeda-beda sikap dan pandangannya terhadap Islam. Di dalam Al-Qur'an sendiri ditegaskan bahwa tidak semua orang Yahudi memusuhi Islam. Tidak semua orang Yahudi mendukung agresi dan pendudukan Israel atas Palestina. Mereka bahkan menentang keras pemerintahan Benjamin Netanyahu. Kerja sama Muslim dengan Yahud di Belanda semakin memperkuat pendapat saya bahwa di tengah perbedaan yang ada, pemeluk agama dapat saling bekerja sama sesuai ajaran agama masing-masing.

Muslim dan Yahudi Belanda tengah melakukan perjuangan politik untuk dapat menyembelih qurban dan khitan. Di negara-negara Barat, qurban adalah ibadah yang mendapat banyak tantangan dan tekanan, terutama dari para aktivis *animal rights.* Qurban dianggap sebagai praktik barbar dan penyiksaan binatang. Pandangan Islam dan Yahudi tentang qurban memang berbeda. Walaupun sama-sama meyakini qurban sebagai ajaran Nabi Ibrahim, umat Yahudi berkeyakinan bahwa anak yang akan disembelih Ibrahim adalah Ishaq. Sedangkan dalam Islam putera Nabi Ibrahim yang hendak disembelih adalah Ismail. Tetapi sebagai sesama *Abrahamic religions,* Islam dan Yahudi mengajarkan qurban sebagai ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan.

Untuk kepentingan gerakan politik, Muslim dan Yahudi menggunakan istilah *spiritual slaughtering* bukan qurban. Meminjam istilah Kuntowijoyo, *spiritual slaughtering* adalah bentuk

universalisasi Islam agar ajaran Islam yang unik dank has dapat dipahami dengan mudah oleh khalayak luas, khususnya non-Muslim dan mereka yang awam Islam. Kuntowijoyo mencontohkan terjemahan Ilmu Kalam dengan Teologi. Padanan istilah tersebut tidak sepenuhnya akurat, tetapi tetap memiliki kandungan maknanya tidak jauh berbeda.

Perjuangan politik yang kedua adalah khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi, sebagai sesama agama monotheis, Islam dan Yahudi memiliki ajaran yang sama tentang khitan sebagai ajaran Nabi Ibrahim. Di Eropa dan negara-negara Barat penentangan terhadap khitan sangat kuat. Dalam sejarah, khitan telah menjadi "pemisah" antara Yahudi dengan Nasrani. Di kalangan masyarakat Barat, khitan semakin populer karena dianggap sehat dan mengurangi risiko penyakit kelamin. Kaum Feminis menentang keras khitan, khususnya bagi perempuan. Dalam pandangan mereka, khitan bagi perempuan adalah kekerasan dan pengebirian perempuan.

Walaupun khitan semakin popular, penentangan terhadap khitan juga tidak kalah hebat. Sebagai contoh adalah Marelene Ruprecht, seorang politisi Jerman. Dia mengemukakan sepuluh alasan penolakan terhadap khitan *(circumcision)*, khususnya bagi anak laki-laki.

1. *Circumcision can and does kill boys and young men.*
2. *Circumcision causes unnecessary pain and trauma.*
3. *Circumcision causes unnecessary damage to men and boys.*
4. *Circumcision is not medically necessary.*
5. *Circumcision Is a human right violation.*
6. *Circumcision is not a religious absolute.*
7. *Circumcision without a boy's consent is wrong.*

8. *There are medical alternative to male circumcision.*
9. *There are religious alternative to male circumcision.*
10. *Circumcision is unregulated across Europe.*

Saya yakin masih banyak kerja sama Muslim dan Yahudi di Eropa dan negara-negara lainnya. Kerja sama qurban dan khitan hanya contoh bahwa walaupun agama memiliki sumber ajaran yang berbeda, ada ajaran dan nilai universal yang mempertemukan agama-agama. Di antara agama-agama terdapat titik seteru dan titik temu. Terhadap perbedaan atau titik seteru, Islam mengajarkan agar saling menghormati kebebasan memeluk dan menjalankan agama. Dalam titik temu, umat beragama bisa saling bekerja sama, bergandeng tangan untuk memenuhi panggilan Tuhan dan meraih kemuliaan hidup dengan berbakti dan melayani sesama.[]

Bencana yang Mempersatukan

Sejak Tsunami Aceh, Desember 2004, Indonesia seakan menjadi negeri musibah. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin topan, badai, kebakaran, dan berbagai bencana alam terjadi hampir di seluruh negeri. Demikian halnya musibah karena kecelakaan transportasi di darat, laut, dan udara. Tidak terhitung berapa besar kerugian materi dan kerusakan infrastruktur fisik yang diakibatkan oleh musibah. Yang tidak kalah beratnya adalah kerusakan infrastruktur sosial dan moral. Ribuan jiwa yang meninggal dunia meninggalkan berbagai masalah sosial seperti anak-anak yatim piatu, kaum difable, dan orang-orang lemah lainnya. Sebagian masyarakat juga mengalami demoralisasi, trauma, dan berbagai masalah moral-sosial yang kompleks.

Muhasabah dan Ujian

Dalam perspektif Agama, musibah adalah peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan manusia. Musibah merupakan ujian (bala) dan momentum bagi manusia untuk melakukan muhasabah atas segala perbuatan dan keadaan. Sebagian musibah merupakan konsekwensi langsung atau tidak langsung dari pe-

rilaku manusia (*man made disasters*). Tanah longsor, banjir, dan badai terjadi karena perilaku masyarakat yang buruk seperti penebangan pohon yang melampaui batas sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Banjir terjadi karena pembuangan sampah di sungai, drainase yang rusak, dan sistem tata kota yang tidak ramah lingkungan. Dalam konteks ini musibah bisa jadi merupakan hukuman (*uqubah*) atas dosa ekologis manusia. Musibah terjadi bukan karena murka atau azab Tuhan, tapi "hukuman" atas pelanggaran manusia atas hukum alam. "*Telah nampak kehancuran di darat dan di laut sebab perbuatan jahat manusia. Allah Menghendaki mereka merasakan akibat perbuatannya agar mereka kembali sadar*."(Qs.30, al-Rum: 41). Pemahaman bahwa musibah terjadi karena murka Tuhan bertentangan dengan sifat Tuhan sebagai Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta kesempurnaan penciptaan alam semesta.

Pada sisi yang lain, musibah "murni" terjadi karena kehendak Tuhan, bukan karena dosa manusia. Musibah adalah ujian atas kesabaran, ketabahan jiwa, kekuatan iman, jalan eskatologi menuju kesempurnaan hidup. *"Dan sungguh Allah benar-benar berkehendak menguji kamu dengan sadiki ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan. Berikanlah kabar gembira kepada kaum penyabar."* (Qs. 2, al-Baqarah:155). *"Maha Suci Allah, Sang Pemilik Kekuasaan, Yang Maha Kuasa melakukan segala-galanya. Dia Menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian untuk (membuktikan) siapa diantara manusia yang terbaik perbuatannya."* (Qs. 67, al-Mulk: 1-2).

Musibah juga merupakan proses pembelajaran (mauidhah) Tuhan agar manusia meningkatkan spiritualitas, intelektualitas, dan sensitivitas. Melalui musibah Tuhan mendidik manusia agar lebih rendah hati, memperbanyak dzikr, dan senantiasa bersyu-

kur. Musibah adalah kasih sayang Tuhan untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa. "Apabila dosa seorang hamba semakin bertambah, sedangkan dia tidak memiliki amal yang mampu menghapuskannya, maka Tuhan mengujinya dengan kesedihan (musibah) sebagai kafarat atas dosa-dosanya." (HR. Ahmad dari Aisyah). Musibah adalah *lesson learned* yang memungkinkan manusia mengasah intelektualitas, ketazaman nurani, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Intensitas musibah berkorelasi positif terhadap kajian dan penemuan ilmiah serta teori-teori baru yang memperluas khazanah keilmuan.

Mempersatukan Masyarakat

Selain itu, musibah juga dapat mempersatukan manusia. Secara tidak langsung, Tsunami Aceh (Desember 2004) merupakan momentum persatuan masyarakat Aceh. Seandainya tidak terjadi Tsunami, mungkin masyarakat Aceh masih terlibat dalam konflik.

Musibah tidak sekadar menggerakkan kesadaran sosial dan iman, tetapi lebih dari itu "mempersatukan" iman dan ikatan kemanusiaan. Kepedulian adalah ajaran universal semua Agama. Meski berbeda akidah, manusia memiliki kesamaan tanggung jawab sosial (*one responsibility*), tujuan (*one destiny*), dan ikatan kemanusiaan (*one humanity*). Islam adalah Agama sosial yang mengajarkan bahwa ketaatan beribadah bukanlah barometer iman, melainkan latihan spiritual untuk kesempurnaan moral sebagai puncak keimanan (Nasution, 2016). Iman menjadi sempurna apabila manusia senantiasa berderma, peduli kepada sesama, dan tabah dalam duka nestapa (Qs. 2, al-Baqarah: 177). Dalam ajaran Kristen, iman memungkinkan manusia melintas batas mengulurkan tangan kepada "yang lain" yang menderita (Knitter, 2006). Musibah yang bertubi-tubi telah menggerakkan iman ber-

juta-berjuta bangsa Indonesia untuk membantu sesama, bahkan -menurut sebuah lembaga survei, tahun 2018 Indonesia adalah bangsa paling dermawan sedunia.

Walau demikian, musibah bisa juga menimbulkan musibah baru. Bantuan kemanusiaan bisa menjadi bencana sosial jika diperalat sebagai sarana memaksakan suatu keyakinan dan superioritas kelas sosial. Sebagian masyarakat resisten atas bantuan Agama lain dengan tuduhan Islamisasi, Kristenisasi, dan sebagainya. Selain bertentangan dengan ajaran Agama, instrumentalisasi bantuan kemanusiaan untuk misi Agama juga melanggar ketentuan internasional. Sesuai prinsip humanitarian dunia, bantuan kemanusiaan harus sesuai dengan prinsip *humanity, neutrality, impartial, operational,* dan *independence* (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs—UN OCHA).

Atas kesadaran iman, kemanusiaan, dan kebangsaan, musibah telah mempersatukan kaum beriman di Indonesia. Tahun 2008, berbagai organisasi kemanusiaan lintas iman membentuk Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Setelah satu dekade, forum yang semula terdiri atas enam organisasi kini beranggotakan 15 organisasi dengan jaringan seluruh Indonesia. Aksi kemanusiaan lintas iman, mampu mempersatukan perbedaan iman dalam aksi kemanusiaan yang nir kekerasan, paksaan, dan prasangka negatif.

HFI hanyalah salah satu. Berbagai lembaga kemanusiaan antar iman internasional juga bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan di Indonesia, salah satunya Muhammadiyah. Sejak 2005, Muhammadiyah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Kristen seperti Catholic Relief, Oxfam, dan World Vision (Kristen, Katolik), International Network of Engaged Budhism (INEB)

dan Won Buddhism (Buddha), selain Asian Muslim Charity Foundation (AMCF), Islamic Relief, dan Muslim Aid (Islam).

Banyaknya musibah tidak boleh membuat bangsa semakin lemah. Musibah bisa membuat bangsa makin kuat dan tangguh apabila bersungguh-sungguh belajar dan memperbaiki diri. Tidak bijaksana jika sesama bangsa saling menyalahkan dan menghakimi baik secara teologis maupun politis. Musibah yang terjadi di tahun politik ini, hendaknya menjadi momentum untuk berbagi, belajar, dan bekerja sama, apa pun agama, partai, dan siapa pun pilihan presidennya.

Tradisi Idul Fitri

Salah satu keunikan "Islam Indonesia" yang secara distingtif membedakannya dengan dunia Islam di negara lain adalah kuatnya pertautan antara ajaran dan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Islam Indonesia memiliki kekayaan budaya lokal yang luar biasa sebagai produk kreativitas Muslim di dalam mengembangkan dan membumikan Islam. Melalui proses asimilasi dan akulturasi yang dinamis, Islam telah menjadi sumber inspirasi lahirnya tradisi Ke-Islaman–Ke-Indonesiaan sebagai bagian integral kebudayaan bangsa Indonesia. Tradisi Islam Indonesia tidak hanya menjadi milik eksklusif umat Muslim, tetapi milik bersama seluruh umat beragama di Indonesia.

Sesuai dengan syariah, selama Idul Fitri, umat Muslim hanya diperintahkan untuk melakukan tiga ibadah. Pertama, mengumandangkan dan memperbanyak membaca takbir, tahmid dan taqdis sebagai ekspresi kemenangan setelah menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Kedua, melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan terbuka sebagai tanda syiar, syukur, dan celebration (perayaan) untuk semua. Tidak hanya kaum laki-laki, kaum hawa yang sedang haid sekalipun dan anak-anak juga dianjurkan untuk turut ke luar merayakan Idul Fitri bersama-sama. Ketiga, saling mendoakan dan bersalaman dengan mengucapkan: *Ta-*

qabbal Allahu Minna Wa Minkum, Mina al'aidin wa al faizin, kullu am wa antum bi khair.

Open House dan Pantun

Selain ketiga hal tersebut, berbagai bentuk perayaan Idul Fitri di Indonesia juga merupakan tradisi yang secara *genuine* dikembangkan oleh Muslim Indonesia. tradisi tabuh beduk dan takbir keliling adalah murni kreativitas untuk mengekspresikan kegembiraan dan mensyiarkan Idul Fitri. Semua karnaval Idul Fitri, semua peserta berdandan indah dan menghiasi kendaraan dengan motif warna-warni yang menyenangkan siapa pun yang menyaksikan.

Tradisi Idul Fitri yang lainnya adalah open house. Tradisi open house adalah wujud *open mind* (pikiran yang terbuka)dan *open heart* (kelapangan jiwa) atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Semua orang saling membuka diri untuk saling berbagi maaf, rezeki dan suka cita. Semua orang menebarkan senyum dan membentangkan tangan menyambut sanak saudara. Demi bisa bertemu keluarga, berjuta-juta orang mudik ke kampung nenek moyang. Kekuatan kekerabatan dan silaturahmi membuat mereka rela berpeluh menempuh beratus bahkan beribu kilometer, dan menguras berjuta rupiah tabungan.

Di Indonesia, *open house* bahkan sudah menjadi "program pemerintah". Hampir seluruh pejabat menyelenggarakan open house bagi seluruh masyarakat. Atas nama "produktivitas" dan "disiplin" kantor-kantor pemerintah mewajibkan seluruh pegawai masuk *on time*. Mereka yang terlambat atau mangkir diancam sanksi berat. Tetapi, sudah bisa dipastikan, tidak ada pekerjaan di hari pertama kerja selain saling bersalaman, saling memaafkan, berbagi cerita mudik dan berbagi oleh-oleh jajan kampung. Ti-

dak lama kemudian, kantor-kantor juga menggelar halal-bihalal. Pada saat itulah semua merasa menjadi satu, tidak ada jarak antara atasan dan bawahan, tidak ada pemisah antara mereka yang berbeda keyakinan.

Tradisi kontemporer Idul Fitri adalah saling berkirim pantun. Kreativitas berpantun lahir karena tiga hal. Pertama, persahabatan antar manusia yang semakin luas yang tidak memungkinkan mereka bertemu muka. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan mereka berkirim pesan melalui telepon, SMS, MMS, dan jejaring sosial mutakhir seperti *Facebook, Twitter* dan sebagainya. Ketiga, bangsa Indonesia sangat suka bercanda, jenaka dan humoris. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lucu, suka melucu dan pandai menghibur diri. Walaupun hidup serba sulit, mereka bisa bercanda tawa, bergembira ria. Tingkat harapan hidup dan kebahagiaan orang Indonesia tetap tinggi walau dunia dihantam badai ekonomi. Hal ini karena tiada lain karena bangsa Indonesia meyakini dan mengamalkan agama.

Islam Untuk Semua

Berkembangnya tradisi Idul Fitri adalah bentuk konkret Islam yang membumi, bermanfaat dan damai. Seperti berbuka puasa, Idul Fitri tidak hanya milik umat Muslim. Selama ramadan semua kalangan bergembira pada saat berbuka puasa. Buka bersama tidak hanya diselenggarakan oleh umat Muslim yang berpuasa atau tidak berpuasa, tetapi juga oleh umat Kristiani, Hindu, Buddha, konghucu atau yang lainnya. Kegembiraan Idul Fitri juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka yang berpuasa penuh, masih “utang”, atau yang tidak beragama Islam semuanya ceria. Semua ikut memiliki karena Idul Fitri sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Keterbukaan, kedamaian dan toleransi umat

Muslim mampu menjadikan Islam sebagai *home religion* di Indonesia dan mengakomodasi perbedaan sehingga semua orang merasa *at home*. Penerimaan terhadap pluralitas tidak membuat mereka yang berkeyakinan hidup dalam ketakutan.

Pada awalnya Idul Fitri adalah ibadah dan syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, Idul Fitri berkembang menjadi tradisi dan bangsa Indonesia. walaupun pertautannya begitu lekat, batas-batas yang membedakan syariah dengan tsaqafah (kebudayaan) masih teramati dengan jelas. kaum muslim mampu memilah manakah amalan sunah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan bidah terlarang. Spirit Idul Fitri adalah keterbukaan, kelapangan jiwa, persaudaraan, dan saling memaafkan. Dengan empat pilar tersebut, Islam dan umat Muslim akan senantiasa hadir sebagai kekuatan yang mempersatukan dan mendamaikan.

Pergi ke Semarang naik kereta/ alangkah elok pemandangan/ hati nan senang berhari-raya/ dosa dan salah saling maafkan.

Selamat Idul Fitri. *Minal aidin wan faizin,* mohon maaf lahir dan batin.

Menimbang Standardisasi Dai

Kementerian Agama berencana melakukan Standardisasi dai, khususnya khatib Jumat. Alasannya, khutbah Jumat telah menjadi media transmisi radikalisme dan intoleransi. Dugaan tersebut mungkin saja benar. Walaupun diperlukan penelitian dan kajian yang seksama. Radikalisme dan toleransi memiliki akar dan sumber yang kompleks. Benar bahwa akhir-akhir ini terjadi beberapa aksi intoleransi. Tetapi secara umum kerukunan antar dan intern umat beragama tetap harmonis. Menurut Penelitian Litbang Kementerian Agama indeks toleransi di Indonesia cukup baik. Masyarakat semakin toleran menyikapi perbedaan keyakinan.

Kontra Reformasi

Usaha Kementerian Agama mengatasi masalah radikalisme dan intoleransi patut diapresiasi. Akan tetapi rencana tersebut perlu dikaji dengan mendalam dan ekstra hati-hati. Pertama, timing dan suasana psikologi politik kurang tepat. Secara psikologis umat Islam sedang *on fire*. Militansi keislaman meningkat pasca aksi 411 dan 212. Pemberlakuan Standardisasi berpotensi menimbulkan resistensi. Fenomena radikalisme dan intoleransi tidak hanya

tumbuh dalam komunitas Muslim tetapi juga pemeluk agama-agama di Indonesia. Standardisasi seharusnya diberlakukan pada semua agama. Jika Standardisasi hanya diterapkan untuk para dai akan menimbulkan penilaian bahwa Pemerintah bertindak tidak adil, mendiskreditkan, dan menyakiti perasaan umat Islam.

Kedua, secara kultural-keagamaan Standardisasi bermasalah. Mayoritas khatib adalah *figure relijius* seperti kyai, ustadz, buya, ajengan, tuan guru dan tokoh agama. Khatib bukanlah profesi seperti guru, dosen, atau dokter. Menjadi khatib adalah amanah dan penghormatan masyarakat atas keulamaan, kesalehan, dan akhlak seseorang. Predikat keagamaan yang melekat dalam diri para dai lebih kuat dibandingkan dengan sertifikat. Besar kemungkinan para dai menolak Standardisasi karena dianggap agen Pemerintah. Risiko sosialnya mereka bisa kehilangan kepercayaan dan ditinggalkan umat.

Ketiga, secara politik Standardisasi bisa dimaknai kontra Reformasi. Sejak Reformasi masyarakat memiliki keleluasaan dan kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk mengkritik jalannya pemerintahan. Dengan Standardisasi para dai kehilangan independensi dan peranannya sebagai kekuatan kontrol sosial. Para dai mengemban misi risalah memandu umat agar senantiasa di jalan yang benar, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Standardisasi mengingatkan publik pada era Orde Baru di mana kebebasan terbelenggu.

Keempat, secara manajerial masjid adalah lembaga keagamaan yang dikelola oleh masyarakat. Pendirian dan operasional masjid ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat atau Ormas Islam. Hal demikian sangat berbeda dengan masjid di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Di negara-negara tersebut para dai adalah pe-

gawai pemerintah. Standardisasi mungkin diberlakukan di masjid-masjid Pemerintah atau kantor pemerintahan. Standardisasi dai di masjid yang dikelola masyarakat secara mandiri bisa dimaknai sebagai bentuk intervensi negara terhadap wilayah privat yang bertentangan dengan Konstitusi.

Distribusi Para Dai

Jika Pemerintah konsen dengan dakwah, maka ada tiga kebijakan yang mendesak. Pertama, distribusi para dai. Selama ini mayoritas dai terkonsentrasi di kota-kota dan di masjid raya. Daerah-daerah terpencil di pedalaman atau desa-desa miskin sangat kekurangan dai. Banyak dai yang kemampuannya jauh dari mumpuni. Di kota-kota, bahkan di kota metropolitan seperti Jakarta, banyak masjid kecil yang diisi para "dai kecil" dengan *bisyarah* ala kadarnya. Para dai ternama dan selebriti yang sering muncul di televise memilih masjid-masjid besar dengan jamaah kaum elit yang berduit. Masjid di daerah terpencil dan masjid kecil rentan disusupi paham-paham radikal melalui para dai yang dikirim oleh organisasi transnasional.

Kedua, Pemerintah memberikan subsidi kepada masjid-masjid kecil agar mampu meningkatkan kesejahteraan takmir masjid dan para guru ngaji. Ini sangat bermanfaat. Para dai dan guru ngaji kategori ini miskin referensi. Pembinaan takmir masjid penting agar mereka selektif memilih dai dan guru ngaji.

Ketiga, membantu pengadaan buku-buku agama untuk perpustakaan masjid. Penyebaran radikalisme dan intoleransi masuk melalui pamflet dan selebaran gratis dari organisasi-organisasi radikal. Mayoritas masjid tidak memiliki perpustakaan. Koleksi perpustakaan masjid yang paling banyak adalah mushaf Al-

Qur'an. Terjemahan dan tafsir Al-Qur'an dan buku-buku keagamaan yang bermutu sangat langka.

Pemerintah tidak perlu gugup, gagap, dan tergopoh-gopoh menyikapi aksi-aksi sekelompok umat Islam yang terjadi akhir-akhir ini. Mayoritas umat adalah kelas menengah yang moderat. Kalau ada gelagat kaum moderat terlihat bersimpati kepada sikap intoleransi jawabannya bukan dengan Standardisasi. Masalah utamanya bukan pada ranah teologi tetapi ketidak adilan social dan kesenjangan ekonomi. Inilah akar masalah yang perlu segera diatasi. Pemerintah sebaiknya menimbang berulangkali untuk melakukan Standardisasi dai karena yang terjadi hanyalah kontroversi yang menguras energi.

Mengarusutamakan Wasatiyah Islam

Tanggal 1-3 Mei berlangsung Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasatiyah Islam (selanjutnya disebut Konsultasi) di Bogor, Jawa Barat. Konsultasi yang dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai belahan dunia itu menghasilkan Pesan Bogor (*Bogor Message*).

Pesan Bogor berisi empat komitmen penting. Pertama, menghidupkan nilai-nilai utama, khususnya tujuh nilai utama: tawassut, i'tidal, tasamuh, syura, islah, aqidah, dan muwatonah. Kedua, menanamkan paradigma Wasatiyah Islam sebagai budaya hidup, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat yang mencerminkan semangat dan teladan sejarah peradaban Islam. Ketiga, membulatkan tekad umat Islam untuk membuktikan kepada dunia bagaimana pengalaman Wasatiyah Islam dalam semua aspek kehidupan. Keempat, mendorong masyarakat dan negara-negara Muslim untuk mengambil inisiatif mempromosikan Wasatiyah Islam melalui sebuah World Fulcrum (Badan Dunia). Badan ini bertujuan untuk membangun *ummatan wasatan* yakni masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, dan rukun bersendikan ajaran dan moralitas Islam.

Para ulama dan tokoh dunia menyambut Pesan Bogor dengan penuh optimisme. Mereka berharap segera ditindaklanjuti dan disebarluaskan tidak hanya terbatas di lingkungan umat Islam tetapi juga khalayak dan negara-negara non-Muslim (*Republika*, 4/5, hlm. 1).

Strategi Budaya dan Politik

Pesan Bogor merupakan salah satu dari beberapa seruan tentang kerukunan dan perdamaian intern dan antar umat beragama. Sebelumnya terdapat dokumen Kalimatun Sawa yang berisi kesamaan ajaran agama-agama besar dunia, khususnya Islam, Kristen, dan Yahudi. Selain itu juga terdapat *Amman Message* yang diputuskan di Amman, Jordan, dan Islam moderat yang diprakarsai al-Azhar dan Malaysia. Keputusan dan dokumen tersebut seakan menjadi hanya menjadi "catatan sejarah" karena lemahnya komitmen dan implementasi.

Pesan Bogor mengamanatkan tiga hal sebagai tindak lanjut. Pertama, pembentukan wadah atau badan bersama di tingkat dunia untuk menyebarluaskan paradigma Wasatiyah Islam. Badan ini tidak harus berbentuk lembaga, tetapi sebuah gerakan bersama yang dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang merupakan forum bersama. Lembaga ini berbeda dengan Organisasi Kerja sama Islam dan Rabithah alam Islami. Lembaga ini bisa saja dibentuk permanen atau bersifat *adhoc*. Ini merupakan langkah politik yang memerlukan dukungan negara-negara Islam.

Kedua, merumuskan konsep Wasatiyah Islam yang lebih operasional. Wasatiyah memiliki pengertian luas sebagai seperangkat nilai, perilaku, dan karakter. Rumusan ini dikembangkan sebagai kurikulum gerakan yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan, kepemudaan, dan masyarakat madani.

Ketiga, perlunya peningkatan kerja sama di antara para tokoh dan lembaga-lembaga masyarakat madani lintas negara, mazhab, dan aliran. Selama ini belum terjalin kerja sama yang solid di antara para tokoh ulama dan cendekiawan moderat. Sekat-sekat mazhab masih cukup kuat di kalangan umat. Idealnya gerakan Wasatiyah Islam mampu mempertemukan dan mempersatukan kepentingan umat dengan menghormati dan menerima perbedaan.

Selama ini, para tokoh dan organisasi moderat cenderung pasif dan diam. Organisasi dan wadah berhimpun para tokoh dan negara-negara cenderung bersifat politis, sangat bergantung pada *funding* negara tertentu. Jika secara kelembagaan Wasatiyah Islam akan dibentuk maka sudah harus dipersiapkan sebagai lembaga yang mandiri, imparsial, dan inklusif. Hal demikian meniscayakan adanya tokoh dan negara dengan tingkat keberterimaan yang tinggi di antara negara-negara Islam.

Pengarusutamaan secara kultural dan politik ini sangat mendesak di tengah suasana kehidupan dunia yang sarat berbagai permasalahan.

Peranan Indonesia

Acara Konsultasi yang diselenggarakan oleh Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) berlangsung sukses. Kesuksesan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, posisi dan peranan Indonesia. Di kalangan negara-negara Muslim Indonesia memiliki hubungan baik dan diterima oleh hampir semua negara. Kedua, faktor personal Din Syamsuddin. Secara pribadi para ulama dan cendekiawan Muslim yang hadir mengenal dan memiliki hubungan perso-

nal dengan Din Syamsuddin yang berperan penting dalam dialog antar agama dan peradaban.

Harapan kepada Indonesia untuk tampil dalam kepemimpinan dan pengarusutamaan Wasatiyah Islam sangat besar. Tanpa menafikan adanya kelompok kecil yang ekstrem, kehidupan keagamaan di Indonesia sangat kondusif. Indonesia memiliki pengalaman menyelesaikan konflik membangun kohesi sosial dalam bingkai pluralitas. Pengalaman Indonesia bisa menjadi model dan modal mengatasnamakan Wasatiyah Islam di dunia global.

Selain itu, Indonesia juga memiliki organisasi Islam yang besar dan kuat. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah, dan Ormas Islam lainnya memiliki pengalaman dan jaringan kerja sama internasional. Keberadaan Ormas Islam merupakan modal sosial yang bisa memperkuat peran dan posisi Indonesia dalam menciptakan tata dunia yang damai, adil, dan makmur. Kuncinya adalah komitmen Pemerintah dan rasa percaya diri.

Fenomena Paus Fransiskus

Sidang Konklaf gereja Katolik Roma akhirnya memilih Kardinal Jorge Mario Bergoglio dari Argentina sebagai Paus ke-266 menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri.

Hasil pemilihan Sidang Konklaf ini memang agak mengejutkan. Bergoglio yang berusia 76 tahun termasuk sosok yang relatif muda. Dia pertama kali dikukuhkan sebagai kardinal pada 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Terpilihnya Bergoglio membuka sejarah baru kepausan. Dia paus yang pertama kali menggunakan nama Fransiskus. Karena itu, dia "bergelar" Fransiskus. Walaupun memiliki darah Italia, Fransiskus adalah paus non-Eropa pertama sejak 1300 tahun sejarah kepausan. Selain itu, Fransiskus juga paus pertama dari kalangan Jesuit.

Sosok Sederhana

Lahir dari keluarga pegawai kereta api di perkampungan kelas menengah Flores, Argentina, Fransiskus adalah sosok yang sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Selama bertahun- tahun melayani umat di Argentina, khususnya Buenos Aires, Fransiskus dikenal sebagai figur pendiam, tetapi kritis. Sebagai seorang Je-

suit, Fransiskus yang berlatar belakang pendidikan kimia terkenal cerdas dan mahir berbahasa Italia, Spanyol, dan Jerman.

Meskipun sejak remaja hidup dengan satu paru-paru, Fransiskus selalu bepergian dengan bus umum dan sampai pada saat terpilih tinggal di apartemen sederhana. Pada 2001 dia mencuci kaki dan mencium seorang penderita AIDS. Hal ini menunjukkan kedekatan dan komitmennya dalam penyembuhan penyakit mematikan tersebut. Kedekatan dan kepedulian Fransiskus kepada rakyat kecil terekam jelas sejak dia bertugas di Argentina.

Fransiskus memang dituduh terlibat melakukan pembiaran atas kekerasan yang terjadi selama "Dirty War" pada 1976-1983. Presiden junta militer waktu itu melakukan pembunuhan keji dan penahanan rakyat yang tidak berdosa. Fransiskus membantah tuduhan tersebut. Tetapi, Gereja Katolik Argentina meminta maaf kepada rakyat atas sikap gereja yang tidak tegas sehingga kekerasan terjadi.

Tuduhan tersebut tidak membuat reputasi Fransiskus sebagai pemimpin agama yang prorakyat pudar. Di tengah kesenjangan ekonomi yang kian menganga di Argentina, Fransiskus berbicara lantang kepada Presiden Argentina Ernesto Kirchner. Menurut Fransiskus, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak hanya disebabkan oleh terorisme, penindasan, dan pembunuhan.

Struktur ekonomi yang tidak adil sebagai penyebab kesenjangan sosial juga pelanggaran hak asasi manusia. Karena itulah, Fransiskus melarang rakyat Argentina terbang ke Roma hanya untuk merayakan pelantikannya sebagai paus. Daripada menghabiskan uang untuk membeli tiket pesawat, lebih baik dananya disumbangkan kepada rakyat miskin. Fransiskus salah seorang pendukung *Liberation Theology* di Argentina yang lekat dengan perjuangan melawan pemiskinan.

Dari sisi keagamaan, Fransiskus seorang tokoh yang memegang teguh prinsip gereja. Dia menentang aborsi, pernikahan sesama jenis, dan adopsi anak oleh pasangan homoseksual. Pandangannya terhadap kontrasepsi cukup terbuka. Menurutnya, karena alasan kesehatan, penggunaan kontrasepsi diperbolehkan.

Arah Kepausan

Dunia menyambut antusias atas terpilihnya Paus Fransiskus I. Dari Amerika Serikat, Presiden Obama mengharapkan agar Paus Fransiskus I dapat memajukan perdamaian, keamanan, penghormatan terhadap kemanusiaan yang universal tanpa memandang latar belakang iman. Harapan senada juga disampaikan Sekjen PBB Ban-Ki-moon. Selama kepemimpinan Paus Benediktus XVI, Vatikan telah menjalin kerja sama dan dialog antariman.

Salah satu momentum penting adalah dialog Islam- Katolik yang diprakarsai Raja Abdullah. Sebagai seorang yang berpandangan terbuka, besar kemungkinan Paus Fransiskus I akan memperkuat program inter-faith sebagai prioritasnya. Yang tentu akan lebih kuat adalah keberpihakan gereja terhadap kaum papa. Di tengah krisis ekonomi yang mendera dunia, khususnya Eropa, jumlah orang miskin terus meningkat.

Banyak kalangan berharap Paus Fransiskus akan melanjutkan perjuangannya sebagai "Paus Jalanan" yang melayani para gelandangan. Di tengah tata kehidupan ekonomi yang semakin sulit, peran penting gereja dalam memberantas kemiskinan dan melawan pemiskinan sangat diharapkan. Memang tidak akan mudah. Di lapangan, masalah pemberantasan dan pengentasan kemiskinan seringkali menjadi pemicu ketegangan.

Tidak jarang, pelayanan sosial dituding sebagai alat misionaris berkedok bantuan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan pentingnya kepedulian sosial, bantuan kemanusiaan, pencerdasan umat manusia, kesejahteraan hidup, dan perdamaian dunia. Kesamaan misi universal agama ini bisa menjadi jalan yang mempersatukan umat beragama. Di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus I, sekitar 1,2 miliar umat Katolik sejagat akan menyambut arah baru kepausan dengan memperkuat dialog dan kerja sama antariman untuk kemanusiaan, persaudaraan, perdamaian, dan tata kehidupan yang adil-bermartabat.●

Sumber: *KORAN SINDO, 18 Maret 2013*

Maulid dan Moral *Literacy*

Muhammad adalah seorang Nabi yang begitu dicintai dan dihormati para pengikutnya. Beribu puisi, lagu dan buku tentang biografi, kerinduan dan kemuliaan Nabi Muhammad digubah oleh para budayawan dan cendekiawan. Goethe, seorang pujangga Jerman yang termasyhur, juga menulis karya sastra dan drama yang mengisahkan keluruhan Nabi Allah Muhammad Saw.

Di kalangan kaum Muslim, kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak hanya diekspresikan dengan karya-karya seni tetapi juga perayaan hari kelahirannya. Di Indonesia dan beberapa negeri Muslim, perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad *(maulid)* ditandai dengan beragam ritual dan festival. Vali, seoang darwisy Turki, sebagaimana dikutip Schimmel (2012: 210), menyebut malam kelahiran Nabi Muhammad serupa dengan *Lailatul Qadar*. Termaktub di dalam Surat al-Qadar (97), *Lailatul Qadar* lebih utama dari seribu bulan. Ibn Ammar, seorang mufti Madzhab Maliki dari Aljazair mengemukakan tiga argumen yang memperkuat Vali. Pertama, Maulid telah mempersembahkan Nabi Muhammad kepada seluruh dunia, sementara *Lailatul Qadar* dikhususkan baginya. Kedua, karena Nabi Muhammad lebih tinggi dari para malaikat maka kehadiran Nabi Muhammad lebih penting bagi umat

ketimbang "turunnya para malaikat". Ketiga, Maulid adalah hari yang sangat penting bagi semesta alam, sementara Al-Qur'an dikhususkan bagi kaum Muslim saja (Schimmel, 2012: 210).

Tentu tidak semua Muslim bersetuju dengan Vali dan Ibn Ammar. *Rabitah Alam Islami* mengharamkan perayaan Maulid. Organisasi yang berbasis di Arab Saudi ini menyebut perayaan Maulid sebagai perbuatan bid'ah. Beberapa kalangan bahkan berpendapat biografi Nabi Muhammad dan syair-syair yang memujinya secara berlebihan adalah kultus individu yang menjurus syirik. Di Indonesia, Maulid adalah hari libur nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Maulid adalah tradisi keagamaan dan kenegaraan. KH. Mas Mansur (1986), salah seorang mantan ketua Muhammadiyah, memperbolehkan peringatan Maulid sebagai sarana dakwah dan *tarbiyah* (pendidikan) agar umat Muslim meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad Saw.

Moral *Illiteracy*

Betapa pentingnya makna kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad dapat terlihat jelas dari moralitas masyarakat sebelum kelahirannya dan setelah kematiannya. Masyarakat sebelum kelahiran Nabi Muhammad disebut masa *jahiliyyah*. Secara bahasa kata *jahiliyyah* diambil dari kata *"jahil"* yang berarti bodoh. Lawan katanya *"alim"* yang berarti berilmu. Dalam konteks ini, *jahil* berarti masyarakat yang bodoh, tidak berilmu. Dari mimbar-mimbar ceramah, para muballigh mengatakan bahwa masyarakat *jahiliyah* adalah masyarakat yang tuna aksara, tidak bisa membaca dan menulis. Inilah faktor utama yang menyebabkan kebodohan masyarakat *(knowledge illiteracy)*.

Knowledge illiteracy hanyalah sebagian ciri masyarakat *jahiliyyah*. Ciri yang paling utama adalah tuna aksara moral *(moral*

illiteracy). MM. Azami dalam *Studies in the Early Hadith Literature* menyebutkan bahwa masyarakat Arab bukanlah sepenuhnya bodoh. Kaum elit Arab begitu melek huruf, mahir membaca dan menulis. Masyarakat Arab mampu menggubah syair-syair yang bernilai sastera tinggi. Setiap tahun diselenggarakan festival sastera. Karya pemenang digantung di dinding Ka'bah. Masyarakat Arab adalah pebisnis hebat yang berbisnis sampai ke mancanegara. Kaum elit menguasai ekonomi dan hidup bermegah-megahan di tengah kemiskinan dan kebodohan masyarakat.

Masyarakat Arab pra-Islam disebut *jahiliyyah* lebih karena moralitasnya yang rusak. Di dalam Al-Qur'an, kata jahiliyyah empat kali disebut. Kesemuanya lebih menunjukkan kebodohan perilaku ketimbang kebodohan ilmu *(lack of knowledge)*. Mereka diperbudak nafsu berkuasa yang menyebkannya memperbudak sesama manusia. Birahi yang meraja membuat mereka haus akan wanita dan memperlakukannya dengan sangat nista. Kegilaan dengan gemerlap harta membuat mereka alpa menolong sesama, kikir, memonopoli kekayaan, curang dalam berdagang dan korup. Dengan ilmunya, para elit membodohi kaum jelata dan menenggelamkannya dalam kepapaan. Kekuatan capital harta dan status sosial adalah modal utama meraih kekuasaan dan takhta. Demi supremasi kelompok, masyarakat *jahiliyah* gemar berperang dan tega saling membunuh.

Dalam waktu hanya 23 tahun, Nabi Muhammad mampu Mengubah masyarakat *jahiliyyah* menjadi masyarakat yang ilmiah. Nabi Muhammad berhasil Mengubah masyarakat barbarian menjadi kaum yang berkeadaban. Esposito (1991) menyebut kesabaran, kebersahajaan, kejujuran, ketulusan, keteguhan dan tanggungjawabnya yang tidak terkira adalah kunci keberhasilan perjuangannya.

Membangun Akhlak

Maulid adalah adalah momentum kebangkitan akhlak. Peringatan Maulid adalah momentum menghidupkan kembali akhlak Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan di dalam Hadits, misi utama yang dibawa Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Nabi, sebagaimana dijelaskan Aisyah RA, isteri Rasulullah adalah Al-Qur'an. Menurut Fazlurrahman (1987), pesan utama Al-Qur'an adalah moralitas. Ibadah di dalam Islam tidak akan sempurna jika tidak membuahkan akhlak dalam kehidupan.

Problem kebangsaan sekarang bukanlah tuna aksara ilmu. Masyarakat kita sudah melek huruf. Masalah umat bukanlah kurangnya ilmu agama. Pengajian, majelis taklim dan mimbar agama membuat umat melek ilmu agama. Akar semua masalah dan keruwetan adalah ilmu yang tidak diamalkan. Inilah sebab menjerumuskan bangsa dalam lembah *jahiliyyah* modern. Dalam beberapa hal, bangsa ini lebih *jahiliyyah* daripada bangsa *jahiliyyah* pra kelahiran Nabi Muhammad.

Dalam situasi kebangsaan Indonesia, Maulid menjadi sangat bermakna. Di tengah korupsi yang menggurita, kekerasan yang merajalela, feodalisme yang mengemuka, rasa malu yang nyaris sirna dan ketamakan yang membuana Maulid menjadi tonggak yang begitu penting. Betapa indahnya jika satu hari libur dijadikan sebagai titik awal bagi kaum Muslim untuk menghadirkan akhlak Muhammad dalam kehidupan umat. Alangkah dahsyat jika 12 Rabiul Awwal dijadikan sebagai tonggak untuk tidak lagi meneguk dan menenggak makanan dan minuman buah korupsi. Shalawat yang disenandungkan selama Maulid adalah kumandang kemanusiaan di mana umat semakin mencintai dan menghormati sesama, menerima mereka yang berbeda dengan jiwa

besar serta mengulurkan tangan bagi mereka yang berkekurangan.

Nabi Muhammad berkuasa bukan dengan menindas sesama, mulia bukan dengan gemerlap harta, ternama dengan pencitraan raga tetapi dengan teladan akhlaknya. Nabi Muhammad membangun peradaban dan memimpin masyarakat dengan kekuatan akhlaknya. Keluhuran akhlak adalah modal agar bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Sebagaimana syair Syauqi Bek: suatu bangsa akan jaya jika berakhlak mulia; suatu bangsa akan binasa jika akhlaknya sirna.[]

MUI yang (Lebih) Pluralistik

Suatu sore menjelang Kongres Umat Islam (KUI) V, saya ditelepon seorang teman pengurus Lembaga Komunikasi Ahlul Bait (LKAB).

Dalam pembicaraan, dia menyampaikan kekecewaan mendalam. Secara kelembagaan dia sudah mendaftar untuk ikut serta dalam KUI. Tetapi, tiba-tiba dia mendapat informasi bahwa LKAB tidak bisa menjadi peserta KUI. Padahal, panitia sudah menerima pendaftarannya. Walhasil, setelah sempat melakukan lobi-lobi dia bisa menjadi peserta KUI sebagai pribadi, tidak mewakili LKAB. Saya bukanlah penganut Syiah. Tetapi, sebagai bangsa Indonesia dan seorang muslim saya bisa memahami kekecewaannya. Selain menyampaikan kekecewaan, dia juga mengungkapkan kegelisahan sebagai kaum Syiah. Komunitas Syiah sudah eksis di Indonesia berabad lamanya.

Kontribusinya untuk kemajuan umat dan bangsa juga cukup banyak. Tetapi– tetap saja–mereka belum diterima sebagai "ahlul bait" muslim Indonesia. Sebagai negara dengan komunitas Sunni terbesar di dunia, mayoritas muslim Indonesia belum welcome terhadap Syiah. Terhadap realitas ini sebagian muslim menganut Syiah secara "sirri". Sebagian lainnya mendeklarasikan secara terbuka. Sebenarnya kaum Syiah di Indonesia relatif lebih ber-

untung dibandingkan dengan mereka yang bermukim di negeri mayoritas Sunni lainnya. Di beberapa negara muslim seperti Arab Saudi dan Malaysia, Syiah dinyatakan terlarang. Nasib kaum Syiah sedikit lebih baik dibandingkan dengan Jamaah Ahmadiyyah Indonesia (JAI).

Secara resmi, MUI pusat mengeluarkan dua fatwa yang menyatakan Ahmadiyyah Qadiani sebagai paham yang sesat. Di beberapa tempat pengikut Ahamadiyyah Qadiani menjadi sasaran amuk massa. Tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dilakukan karena fatwa MUI. Tetapi, dari segi timing, peningkatan frekuensi tindak kekerasan terhadap Ahmadiyyah terjadi pascafatwa MUI. Di Indonesia Syiah tidak dinyatakan sesat dan terlarang. Pada 1984 MUI pusat mengeluarkan fatwa tentang Islam Syiah. Fatwa tersebut tidak eksplisit menyatakan Syiah sebagai paham sesat. Fatwa MUI hanya menjelaskan tentang paham Syiah yang secara doktrinal berbeda dengan Sunni. Di antaranya adalah tentang hadis, ijma, suksesi empat khalifah, dan–yang terpenting–imamat (MB Hooker, 2002).

Sampai saat ini kaum Syiah tidak pernah menjadi sasaran kekerasan sebagaimana Ahmadiyyah. Pasca-Revolusi Islam Iran (1979), kaum Syiah sempat mendapatkan angin segar. Minat muslim Indonesia untuk mempelajari pemikiran intelektual dan ulama Iran meningkat. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke Iran juga terus bertambah.

Fatwa Teologis-Preskriptif

Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir kaum Syiah dan muslim penganut paham di luar mainstream merasa kurang begitu aman dan nyaman. Akhir-akhir ini MUI pusat cukup produktif mengeluarkan fatwa-fatwa teologis-preskriptif. Fatwa-fatwa tersebut

berkaitan dengan masalah-masalah teologis (akidah) yang cenderung "menghakimi" paham tertentu. Sudah puluhan organisasi dan aliran yang dinyatakan sesat dan haram oleh MUI.

Terdapat tiga fatwa teologis preskriptif MUI yang menjadi perhatian publik. Pertama, tentang Ahmadiyyah. Meskipun sudah beberapa tahun, persoalan Ahmadiyyah masih belum sepenuhnya selesai. Alih-alih menyelesaikan masalah, fatwa tentang Ahmadiyyah justru menimbulkan perdebatan dan persoalan yang membuana. Dari dalam negeri, aspirasi pembubaran Ahmadiyyah di Indonesia sangat kuat. Sementara itu, secara politis, Indonesia terikat oleh peraturan-peraturan internasional tentang kebebasan beragama *(freedom of religion)* dan penistaan agama *(religious defamation)*. Terkait dengan fatwa Ahmadiyyah, pemerintah Indonesia berada dalam situasi yang tidak mudah: antara memenuhi aspirasi dalam negeri dan mematuhi ketentuan internasional.

Fatwa yang kedua tentang pengharaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme (sipilis). Dampak fatwa MUI tersebut sangat dirasakan oleh aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) dan aktivis pluralisme. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik tetapi juga sosial dan teologis.Tiga **paham yang diharamkan MUI didasarkan atas definisi yang** *debatable* (sarat perdebatan). MUI hanya mendasarkannya kepada satu definisi yang secara konseptual berbeda dengan definisi yang menjadi rujukan kaum pluralis. MUI mendefinisikan pluralisme sebagai paham yang meyakini bahwa semua agama benar (paralelisme), kebenaran agama relatif (relativisme), dan mencampuradukkan ajaran agama (sinkretisme).

Mayoritas kaum "pluralis" di Indonesia sebenarnya memiliki pemahaman yang relative sama dengan MUI. Di tengah usaha

mereka mengembangkan toleransi dan pluralisme, kaum ”pluralis” Indonesia dengan tegas menolak sinkretisme, relativisme, dan paralelisme. Kaum muslim ”pluralis” tetap meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar dan menekankan pentingnya kemurnian akidah. Tetapi, pada saat yang sama mereka juga menganjurkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Berbeda keyakinan, tidak berarti bermusuhan. Fatwa ketiga tentang perayaan Natal dan pernikahan antaragama.

Selain menjelaskan hukumnya, MUI memberikan tuntunan (preskripsi) tentang Natal. Walaupun secara teologis bisa diterima, sebagian muslim mengalami kesulitan untuk mengamalkannya. Tidak sedikit yang bersikap mendua. Fatwa MUI tentang Natal dan pernikahan antar-agama bertentangan dengan realitas sosial sehari-hari. Saya tidak memiliki otoritas untuk menolak fatwa-fatwa MUI. Tetapi, fatwa-fatwa yang teologis-preskripstis potensial menimbulkan kecenderungan eksklusivisme, fundamentalisme, dan formalisme keagamaan. Karena itu, mungkin perlu mempertimbangkan fatwa-fatwa yang pluralistik didaktis.

Dalam memberikan fatwa, MUI perlu mengemukakan paham- paham, dalil-dalil yang menjadi dasar atau *hujjah* bagi kelompok tertentu, bukan hanya sepihak *(one sided)*. Misalnya, tentang Ahmadiyyah yang berkeyakinan bahwa ada Nabi setelah Rasul Muhammad. Kiranya MUI perlu menyebutkan alasan-alasan penganut Ahmadiyyah berdasarkan rujukan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang mereka pergunakan. MUI tentu saja harus menegaskan posisinya tetapi umat diberikan informasi dan argumen yang memadai sebagai bahan pengambilan keputusan. Selanjutnya, MUI memberikan tuntunan bagaimana menyikapi dan memilih paham yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Wadah bagi Semua

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, MUI adalah wadah berhimpun para ulama Indonesia. Ke depan, MUI diharapkan bisa menjadi wadah berhimpun bagi para ulama dari berbagai mazhab Islam di Tanah Air. Sangat indah jika kemajemukan Islam di Indonesia tercermin dan terwakili dalam tubuh MUI. Dengan cara demikian, MUI bisa menampilkan Islam di Indonesia dengan karakternya yang khas. Termasuk dalam hal ini adalah mengikutsertakan para ulama dan organisasi dari kalangan Sunni di luar Mazhab Syafii dan kalangan di luar Sunni.

Langkah yang lainnya adalah bagaimana agar fatwa-fatwa MUI juga mencerminkan pluralitas organisasi dan ulama yang berhimpun di dalamnya. Sangat disayangkan jika fatwa MUI hanya menyuarakan aspirasi kelompok mainstream, bahkan person tertentu. Fatwa MUI tentang haramnya merokok di tempat umum,anak-anak, perempuan hamil dan pengurus MUI sungguh sangat maju. Tetapi, karena dimensi pluralitas yang kurang terwadahi, beberapa organisasi Islam besar memiliki fatwa yang berbeda. Padahal, organisasi Islam tersebut secara kelembagaan turut serta mendirikan dan menjadi anggota MUI. Sangat tepat Munas dan Milad Ke-35 MUI yang mengangkat tema pembangunan akhlak bangsa dan ekonomi umat.

Akhlak bangsa memang sedang dalam kondisi memburuk. Selain korupsi, kriminalitas, dan perbuatan maksiat, tindakan main hakim sendiri dan menggunakan cara-cara kekerasan juga termasuk akhlak tercela yang harus diatasi. Tidak berlebihan jika MUI mengangkat sikap toleran, terbuka terhadap perbedaan dan suka bekerja sama sebagai bagian dari akhlak Islam yang perlu dikembangkan. Semoga di masa depan MUI lebih pluralis. Para

ulama adalah teladan umat. Jika MUI mencontohkannya, maka umat akan mengikutinya. *Wallahu'alam.*(*)

Salat yang Menggerakkan

Dibandingkan dengan komunitas Muslim di negara lain, Muslim Indonesia memiliki kesalehan ritual lebih tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian Riaz Hassan dari Flinders University, Australia, yang diterbitkan dalam buku *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim (2006)*. Dalam penelitia yang dia adakan di Indonesia, Mesir, Pakistan dan Kazakhstan, Riaz menemukan bahwa 96% Muslim Indonesia melakukan salat 5 waktu, disusul Mesir 90%, Pakistan 56%, dan Kazakhstan 5%. Untuk zakat, 94% Muslim Indonesia menunaikannya, Mesir 87%, Pakistan 58% dan Kazakhstan 49%. Hampir seluruh Muslim Indonesia dan Mesir berpuasa Ramadan (99%), Pakistan 93%, dan Kazakhstan 19%. Sejak delapan tahun terakhir, Muslim Indonesia selalu menempati peringkat teratas jumlah jamaah haji dan umrah.

Penelitian Riaz Hassan juga menunjukkan kuatnya pencitraan Islam tradisional yang tidak diikuti oleh kemajuan peradaban. Seperti negara Muslim lainnya, Indonesia mengalami masalah produktivitas ilmiah, kemakmuran ekonomi, tingkat kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang masih rendah.

Selain mengalami kemajuan dalam bidang demokrasi, perlindungan HAM, dan pemberdayaan perempuan, Indonesia juga

mengalami angka korupsi yang tinggi. Intoleransi keberagaman pun cenderung meningkat, kriminalitas merajalela, dan perusakan lingkungan melampaui batas. Bahkan, negara ini masih mengalami eksploitasi buruh yang tidak manusiawi dan berbagai bentuk perbuatan "jahiliah" modern yang lebih dahsyat dibandingkan "jahiliah' Arab pra-Islam. Indonesia pun masih tidak berdaya mengatasi kekuatan kemungkaran yang terorganisasi dan didukung oleh tokoh-tokoh kuat di pemerintahan dan partai politik.

Gerakan Membangun Peradaban

Mengapa tidak ada keselarasan antara kesalehan ritual (salat) dengan peradaban utama? *Pertama*, ada gejala spiritualisasi di mana salat dijadikan sebagai "pelarian" spiritual atas ketidakmampuan manusia mengatasi kompleksitas masalah kehidupan kontemporer. Manusia modern hidup di tengah beban pekerjaan yang mendera dan kohesivitas sosial yang rapuh. Salat adalah "solusi instrumental", karena dengan melaksanakan hal ini maka manusia bisa mendapatkan kekuatan dari Sang Khalik.

Kegagalan ikhtiar lahiriah untuk pengobatan penyakit fisik secara ilmiah justru mendorong manusia mengembangkan penyembuhan alternatif secara spiritual. Contoh populer adalah tahajud untuk penyembuhan kanker, jantung dan penyakit akut lain. untuk memperoleh limpahan rezeki di tengah kesulitan ekonomi maka manusia memperbanyak salat duha. Tesis William James menyatakan bahwa agama diperlukan ketika manusia ditimpa berbagai masalah kemudian menjadi relevan.

Kedua, berkembangnya gejala rasionalisasi salat. Kebangkitan spiritualitas, yang menandai awal abad ke-21, diikuti dengan berbagai publikasi ilmiah tentang arti penting dan makna du-

nia spiritual. Berbagai penelitian dan buku menunjukkan korelasi antara iman dengan penyembuhan tumbuh bak jamur di musim hujan. Di satu sisi, rasionalisasi ini bisa jadi sebagai bentuk pragmatisme bisnis karena tingginya permintaan pasar. Selain itu, terdapat gejala "komersialisasi" salat seperti pelatihan salat khusyuk di hotel berbintang dan sejenisnya. Kemungkinan lain, rasionalisasi sengaja dilakukan sebagai sebuah penetrasi keagamaan membangkitkan kesadaran salat dan kesalehan ibadah.

Ketiga, berkembangnya gejala personifikasi salat dengan menjadikan salat sebagai sarana pembentukan karakter. Sekolah negeri yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan "sekuler", mulai banyak memasukkan salat duha sebagai kurikulum intrakurikuler. Gejala ini juga terlihat di kantor-kantor pemerintah dan bisnis perkotaan. Terjadi jumlah peningkatan jumlah yang puasa sunah (senin, kamis) dan salat duha di kantor. Mereka berusaha membentengi diri dari kuatnya dorongan dan kepungan maksiat serta kemungkaran.

Secara teologis, tiga perkembangan ini merupakan gejala keberagamaan yang cukup positif. Ketiganya belum cukup untuk membangun peradaban utama. Salat harus disempurnakan dengan tanggung jawab dan aksi sosial yang menggerakkan. Penekanan salat hanya pada aspek spiritualitas bisa melahirkan sikap asosial yang mementingkan kebaikan perseorangan dan membiarkan kerusakan di sekitarnya.

Salat hendaknya mampu melahirkan Muslim berkarakter kuat yang mampu menggerakkan masyarakat secara bersama-sama melawan perbuatan keji dan mungkar "Bacakanlah olehmu (Muhammad) wahyu (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar" (QS 29: 45) ayat ini mene-

gaskan proses aktif progresif melawan segala bentuk perbuatan keji dan mungkar, bukan semata mata usaha pasif-defensif yang bersifat personal.

Salat yang menggerakkan adalah ibadah yang pelaksanaannya menumbuhkan kekuatan bersama untuk membangun peradaban utama yang damai. Kesadaran salat berjamaah sejatinya membangkitkan kerja sama umat Islam sebagai komunitas bergerak aktif melawan korupsi, membangun tradisi *good governance*. Salat juga dapat menciptakan tata lingkungan sosial dan fisik yang aman, nyaman, sejuk serta akhlak mulia lain.

Isra Mikraj dimulai dari Masjid al-Haram ke Masjid Al-Aqsha dengan puncaknya di *mustawa* ketika Nabi Muhammad menerima wahyu salat. Dalam konteks kehidupan bangsa Isra Mikraj memiliki dua makna. *Pertama* pembangunan peradaban utama dimulai dari tempat yang utama: masjid sebagai pusat peradaban dengan salat sebagai intinya. *Kedua*, keluhuran martabat da[at ditempuh melalui *mi'raj* peradaban dengan meninggalkan segala praktik yang keji dan mungkar dalam praktik pemerintahan, kehidupan sosial, dan kebangsaan.

(Sindo, 29 Juni 2011)

Mihnah ala Indonesia?

Di dalam teologi Islam, Mu'tazilah adalah mazhab yang paling rasional. Corak teologi Mu'tazilah sangat antroposentris. Dengan kekuatan akalnya, manusia memiliki kedaulatan individual untuk memilih baik dan buruk.

Manusia memiliki kehendak bebas (free will) dan kebebasan untuk berbuat (free act) dengan segala konsekuensinya. Doktrin Mu'tazilah yang menekankan kebebasan dan keterbukaan menumbuhkan etos kerja dan etos keilmuan yang kuat. Paham Mu'tazilah merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada masa Pertengahan Islam.

Malapetaka Mihnah

Malapetaka terjadi ketika Khalifah Al-Makmun (785–833 M) dari Bani Abbasiyah (750–1258 M) menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Dengan otoritas politiknya sebagai khalifah, Al-Makmun berusaha melakukan formalisasi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara melalui politik mihnah.

Pada tahun 827, Al-Makmun menugasi Ishak bin Ibrahim, Gubernur Bagdad, sebagai pelaksana politik mihnah. Secara bahasa, mihnah berarti profesi atau jabatan. Namun, dalam praktik-

nya,mihnah adalah sebuah screening atau pengadilan ideologi. Dengan dalih penegakan kedaulatan negara,pemerintah Al-Makmun melakukan screening kepada para pejabat kehakiman,ulama, dan gubernur di wilayah kekuasaannya. Mereka yang menentang dipecat dari jabatannya dan dipenjara.

Begitulah malapetaka mihnah. Ketika diadopsi sebagai mazhab resmi negara, teologi Mu'tazilah yang liberal berubah eksklusif. Hal yang sama terjadi dengan mazhab Syafii. Dibandingkan dengan mazhab fikih lainnya, Syafii adalah mazhab yang paling moderat. Syafii memberikan porsi yang seimbang antara wahyu dengan penalaran (ra'yu).

Dengan metodologi berpikir yang moderat, Syafii merupakan mazhab yang akomodatif terhadap tradisi yang baik. Karakteristik moderat dalam mazhab Syafii seakan hilang ketika dijadikan mazhab resmi negara. Salah satu contohnya adalah Malaysia. Di negara tersebut, eksistensi kaum Syiah atau Wahabi tidak diakui.

Melalui proses "Islamisasi", terjadilah proses Syafii-sasi secara perlahan-lahan. Sebagai ulama yang toleran, Imam Syafii tidak mengklaim pendapatnya yang paling benar. Berbagai masalah primordial dan rasial meledak di Malaysia. Terakhir adalah masalah pelarangan penggunaan nama Allah oleh umat Kristiani yang berbuntut pada pembakaran masjid dan gereja. Dalam jangka panjang, masalah ini tampaknya akan terus terjadi di masa depan.

Kebebasan dan Keterbatasan Beragama

Secara konstitusional, Indonesia bukanlah negara agama. Dengan dasar negara Pancasila, Indonesia adalah negara sekuler yang tidak berdasarkan pada agama tertentu. Namun, Indonesia tidak menganut paham pemisahan agama dengan negara. Sesu-

ai dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa,negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Negara bahkan memberikan bantuan kepada umat beragama. Walaupun demikian, kebebasan beragama tidaklah tak terbatas. Sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 (selanjutnya disebut PNPS/1965), Indonesia menjamin kebebasan melaksanakan ibadat bagi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme, dan aliran-aliran kepercayaan.

Namun,negara tidak memberikan ruang kebebasan untuk tidak beragama (ateisme). Sampai batas tertentu, negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menafsirkan ajaran agamanya. Namun, penafsiran tersebut hendaknya tidak menyimpang dari penafsiran ajaran- ajaran pokok oleh para ulama agama yang bersangkutan, tidak menodai dan menghina agama tertentu.

Penafsiran yang menyimpang, penodaan, dan penghinaan agama dikhawatirkan merusak ketenteraman dan keharmonisan kehidupan antarumat beragama dan masyarakat (ayat 4 penjelasan umum PNPS/1965). Beragama adalah hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib menghormati hak asasi tersebut. Namun, pelaksanaan hak asasi manusia itu tetap harus diletakkan dalam konteks ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Karena itu, sesuai dengan Pasal 28 J (2) Undang-Undang Dasar 1945, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,keamanan,dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Mihnah Modern?

Ketentuan konstitusional mengenai kebebasan dan keterbatasan agama di Indonesia sudah sangat jelas. Namun, dalam pelaksanaannya,ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan. Pertama, sebagaimana ketentuan PNPS/1965 tentang penafsiran agama yang menyimpang. Sejauh manakah suatu penafsiran agama dinyatakan menyimpang? Siapakah yang memiliki otoritas untuk memutuskan? Penafsiran adalah wilayah "internal" agama.

Dalam konteks negara Pancasila, negara jelas tidak memiliki otoritas sampai pada wilayah "internal" suatu agama. Jika otoritas diberikan kepada organisasi keagamaan tertentu, sangat mungkin terjadi ketegangan internal di antara umat beragama. Disharmoni internal umat beragama yang berbuntut pada tindak kekerasan antara lain terjadi karena faktor perbedaan penafsiran yang disertai pemaksaan kehendak politik.

Kedua,sebagaimana ketentuan Pasal 28 J (2) UUD 1945,tentang pelaksanaan hak asasi yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Lagi-lagi pertanyaannya terkait dengan batasan atau kriteria. Jika tidak ditetapkan aturan yang jelas, ketentuan UUD 1945 ini potensial menimbulkan pembakuan paham agama dan pembatasan kebebasan beragama oleh negara sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Atas dasar peneguhan ideologi Pancasila, tidak sedikit mereka yang berusaha melaksanakan ajaran agamanya secara kaffah

harus meringkuk di penjara dengan tuduhan anti-Pancasila. Baik PNPS/1965 maupun UUD 1945 tidak melarang warga negara menafsirkan ajaran agamanya. Penjelasan Pasal 4 (a) PNPS/1965 menyebutkan bahwa menjelaskan paham agama secara objektif, zakelijk (saklek), dan ilmiah yang tidak dimaksudkan untuk menghina dan memusuhi agama lain bukanlah suatu tindak pidana. Karena itu masih ada ruang kebebasan untuk penafsiran agama.

Yang menjadi masalah adalah ketika negara dan kelompok tertentu menentukan dan memonopoli kebenaran suatu penafsiran agama. Malapetaka mihnah terjadi ketika Al-Makmun mengklaim Mu'tazilah sebagai mazhab yang paling benar dan memaksakannya kepada seluruh rakyat. Pada masa Orde Baru, Pancasila pernah menjadi momok bagi sebagian kalangan.

Semua terjadi tiada lain karena pemerintah pada waktu itu memonopoli kebenaran penafsiran atas Pancasila dan memaksakannya secara indoktrinatif. Karena itu, jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945, perlu diberikan ketentuan ketentuan perundangan yang jelas.

Ketentuan tersebut diperlukan agar tidak terjadi monopoli kebenaran penafsiran oleh mayoritas dan pemasungan kebebasan beragama atas nama keamanan dan ketertiban umum. Setiap umat beragama hendaknya menghormati apa pun yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi. Memberantas kemiskinan, kebodohan, korupsi, narkoba, perdagangan manusia,dan kejahatan kemanusiaan lainnya adalah tugas dan kewajiban universal lintas agama yang jauh lebih penting dan bermakna.(*)

Sumber: *Harian SINDO*, 18 Februari 2010

2

TOLERANSI DALAM BERPOLITIK

Moralitas yang Tercemar

Judul artikel ini merupakan terjemahan bebas yang dinukil dari pidato Vaclav Havel berjudul: *A Contaminated Moral Environment*. Havel adalah seorang dramawan dan presiden terpilih Cekoslovakia (kini menjadi dua negara Ceko dan Slovakia). Emma Beare, editor buku *Speeches That Changed the World* (2005), memasukkan pidato yang disampaikan pada 1 Januari 1990 tersebut sebagai salah satu pidato bersejarah yang mengubah wajah Cekoslovakia dan pendulum sejarah dunia.

Moralitas yang Tercemar

Menandai era baru kepemimpinannya, Havel mengajak rakyat Cekoslovakia untuk mengakhiri kepemimpinan yang penuh kebohongan yang berlangsung selama 40 tahun. Pemerintah Cekoslovakia selalu mengatakan kepada rakyatnya bahwa negara terus mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Ekspor dan produksi baja meningkat. Kesejahteraan rakyat terangkat.

Retorika pemerintah yang memenuhi ruang publik ternyata bertentangan dengan kenyataan hidup yang dialami rakyat. Havel mengajak rakyatnya melihat realitas negaranya secara apa

adanya. Kepada rakyatnya, Havel mengatakan bahwa ekonomi negara memburuk.Tetapi, baginya, memburuknya ekonomi bukanlah masalah yang serius. Masalah terburuk yang terjadi di negaranya adalah kehidupan moral yang tercemar.

"*The worst thing is that we live in a contaminated moral environment*". Yang dimaksud dengan lingkungan moral yang tercemar adalah kebiasaan berbohong yang mewabah. Havel mengatakan: "*We fell morally ill because we became used to saying something different from what we thought*." Mengapa kebohongan merupakan pencemaran moral? Havel menjelaskan, kebiasaan berbohong telah menimbulkan krisis kepercayaan.

Sesama bangsa menjadi saling tidak percaya, hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok, serta menelantarkan yang lainnya. Keprihatinan Havel itulah yang saat ini menjadi keprihatinan para tokoh agama di Indonesia. Tanpa motif politik menjatuhkan pemerintahan yang sah atau memakzulkan presiden yang dipilih berjuta rakyat Indonesia, para tokoh agama melakukan gerakan moral melawan kebohongan.

Dalam perspektif agama apa pun, kebohongan adalah perbuatan yang tidak bermoral. Menurut Islam, kebohongan adalah akhlak tercela (*akhlak almadlmumah*) yang menjadi pangkal kehancuran individu maupun bangsa. Akhlak atau moralitas adalah misi puncak agama (Rahman, 1988). Karena itu, tuntunan dan pemenuhan ritual tidak akan sempurna jika tidak membentuk akhlak yang utama (akhlak alkarimah).

Kebohongan juga berpotensi menimbulkan kerusakan bangsa yang semakin parah. Rakyat yang hidup dalam kondisi serbasusah terus dininabobokan oleh data-data statistik-kuantitatif yang tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Hal ini sama sekali tidak berarti para tokoh agama mengabaikan pentingnya data

statistik dan menafikan keberhasilan pemerintah dalam beberapa bidang.

Pernyataan pemerintah yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 5,8% dan tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh raksasa ekonomi dunia dalam 15 tahun ke depan patut dihargai. Tetapi, mengabaikan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata, kesenjangan kemakmuran yang kian menganga, serta pengangguran dan kemiskinan yang tidak juga berkurang secara signifikan adalah sikap yang tidak bijaksana.

Membiarkan kesenjangan ekonomi di tengah keadilan hukum yang semakin mewah dan korupsi yang menggurita merupakan bom waktu yang bisa meluluhlantakkan bangunan sosial Indonesia. Pernyataan pemerintah tentang peningkatan pendapatan per kapita dan *gross national product* tidak boleh dipandang sebelah mata. Tetapi, mengukur keberhasilan dan kemakmuran dari hal-hal yang serba materi bertentangan dengan tujuan negara.

Sebagai negara yang religius, Indonesia tidak bisa mengabaikan kesejahteraan rohaniah. Tekanan hidup yang semakin berat membuat sebagian masyarakat memilih bunuh diri. Meski merupakan jalan pintas yang menyesatkan, bunuh diri menjadi pilihan salah dari berbagai lapisan masyarakat. Yang memprihatinkan adalah ketika masyarakat yang sedang sakit terus-menerus diserbu oleh gelombang konsumerisme dan gaya hidup hedonistik yang mencekik.

Jeffrey D Sachs dalam artikelnya "Growth in a Buddhist Economy", (The Korean Herald, 28- 29/8/2009) mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari angka-angka gross national product dan kemakmuran konsumtif yang

potensial menimbulkan destabilitas sosial yang menyebabkan berkembangnya perilaku agresif, kesepian, rakus, dan diperbudak pekerjaan. Guru besar ekonomi dan direktur Earth Institute Universitas Columbia itu menekankan pentingnya pemenuhan gross national happiness: kebahagiaan atau kesejahteraan bangsa.

Gerakan Moral Kejujuran

Karena mayoritas politisi diam seribu bahasa, para tokoh agama bicara. Ketika para pejabat publik dan pimpinan partai membungkuk dalam barisan memperebutkan tahta, para tokoh agama bergerak. Sebagai figur-figur yang jemawa dan kesatria, pantang bagi mereka mengais-ngais kekuasaan. Dengan keikhlasan dan jiwa besar, jiwa mereka tidak gentar dengan caci maki dan suara lantang para penentang.

Sangat disayangkan jika gerakan moral luhur mereka direspons secara emosional. Dalam alam demokrasi seharusnya kritik tidak disikapi dengan amarah. Kritik adalah ekspresi kebebasan menyampaikan pendapat. Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara kekerasan, caci maki dan mobokrasi. Seandainya para punggawa negeri ini menyampaikan secara blaka suta, terang benderang, dan terbuka bahwa ada masalah serius dengan kesenjangan ekonomi, para tokoh agama akan berduyun-duyun menawarkan budi baik untuk membantu.

Pendusta agama adalah mereka yang mendiamkan orang--orang miskin terlunta-lunta. Kaum pada tidak butuh angka dan data. Mereka hanya perlu disapa dengan sepenuh jiwa, bukan untuk komoditas. Di tengah kehidupan yang semakin sumpek, mereka tidak membutuhkan janji-janji dan mimpi-mimpi. Yang mereka damba adalah keadilan dan bahagia. Gerakan moral kejujuran adalah gerakan kebangsaan.

Sebagai penerus misi profetik, panggilan iman menggerakkan mereka untuk membersihkan kehidupan kebangsaan dari pencemaran moral. Dalam sejarah bangsa-bangsa, peranan tokoh agama sangat penting. Mereka adalah moral force yang berjuang di atas panji kebenaran melawan ketidakadilan. Motif suci inilah yang menggerakkan para biksu di Myanmar untuk melawan rezim militer yang tiranik.

Di tengah pemerintahan Marcos yang korup, para tokoh Katolik turun ke jalan berbaur dengan rakyat melawan kezaliman. Para tokoh agama di Afrika Selatan berdiri kokoh mendukung perjuangan Nelson Mandela melawan apartheid. Kondisi Indonesia sekarang ini memang belumlah seburuk negara-negara tersebut. Tetapi, akumulasi kekecewaan dan masalah yang tidak tertangani dengan baik bisa menimbulkan dampak sosial politik yang tidak terduga.

Apakah pemerintah dan para pejabat negara berbohong atau tidak, hanya mereka yang tahu. Para tokoh agama juga tidak bisa dan tidak boleh menghakimi bahwa pemerintah telah berdusta. Tetapi, kebohongan publik adalah penyakit politik, sosial, dan moral. Kebohongan, kata Havel, adalah pencemaran moral. Tidak ada seorang pun manusia dan bangsa yang hidup sehat dalam lingkungan sosial dan moral yang tercemar.

Hukum evolusi mengatakan, tidak segelintir pun makhluk hidup, manusia, dan bangsa yang bisa hidup lama dalam lingkungan yang kotor dan tercemar. Sejarah bangsa-bangsa purba dan modern menunjukkan bagaimana sebuah negara super-power menjadi puing sejarah belaka karena kebohongan yang meraja.

Tidak satu pun bangsa korup yang berjaya. *"Jelajahilah dunia, kemudian lihatlah bagaimana kehancuran bangsa-bangsa pembohong."*(Qs 3, Ali Imran: 137). Tidak perlu saling menuding.

Tiada guna membela diri membabi buta. Jika semua sepakat bahwa kebohongan adalah penyakit, polusi moral dan kuman sosial, bagaimana jika kita semua menghilangkannya mulai dari diri sendiri?[]

Demo yang Islami?

Sejak Reformasi 1998, Indonesia seperti tidak pernah lepas dari aksi demonstrasi. Tetapi, sejak 16 tahun silam belum pernah ada aksi demo yang perhatiannya melebihi rencana demo 4 November.

Demo belum benar-benar terjadi. Tetapi, mengikuti pesan-pesan di media sosial, banyak pihak yang ketakutan. Jakarta sepertinya akan dipenuhi lautan manusia yang menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sang "terdakwa" penistaan agama, dihukum seberat-beratnya.

Sepertinya Jakarta akan rusuh karena isi undangan terbuka demo yang begitu menggetarkan. Setiap peserta aksi diimbau meninggalkan surat wasiat untuk keluarga, seakan mereka bersiap mati.

Demo seakan perang suci demi tegaknya Kalam Ilahi. Walaupun mengatasnamakan perjuangan membela Islam, tidak semua muslim bersetuju. Semua umat Islam tentu terusik jika Islam dihina.

Ini persoalan harga diri dan keyakinan. Tetapi, umat memiliki strategi yang berbeda dalam membela agamanya. Demo adalah salah satu cara di antara ribuan jalan yang lain.

Unjuk Kekuatan

Aksi demo Jumat, 4 November tentu bukanlah sebuah peperangan. Jika toh harus berperang, siapa lawannya? Apakah untuk melawan Ahok? Begitu hebatkah Ahok sehingga puluhan ribu orang harus dikerahkan dan berjuta rupiah harus dibayarkan? Ahok hanyalah seorang warga negara biasa.

Jabatannya sebagai gubernur hanyalah "warisan" dari Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. Prestasinya sebagai gubernur DKI Jakarta juga biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa.

Ahok tidak mewakili umat Kristiani dan etnis Tionghoa. Ahok adalah rakyat biasa. Lalu, untuk apa demo itu? Kalau memang Ahok harus diproses secara hukum, bukankah dia sudah dilaporkan ke kepolisian?

Mengapa tidak dipercayakan saja kepada polisi untuk memproses sebagaimana mestinya? Jika polisi lambat, bukankah ada Kompolnas, anggota DPR, yang bisa menyentil mereka? Jika polisi main api, bukankah ada Presiden yang setiap saat bisa mengganti?

Presiden yang arif dan bijaksana tentu menyadari yang mengantarkannya ke Istana adalah berjuta umat Islam. Presiden yang berhati nurani jernih tentu tidak akan membiarkan mayoritas rakyat yang sangat dicintainya bertikai.

Saatnya para wakil rakyat bicara dan pemimpin partai menunjukkan komitmennya. Institusi hukum adalah lembaga independen yang tidak bisa ditekan dan intervensi oleh siapa pun. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa menginterversi pengadilan. Para hakim juga tidak boleh memutuskan perkara karena tekanan.

Hukum memiliki sistem tersendiri untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan keadilan. Setiap warga negara ber-

samaan kedudukannya di hadapan hukum. Setiap rakyat, termasuk Ahok, berhak mendapatkan keadilan.

Kalau hakim tidak adil, ada Komisi Yudisial yang bisa menghakimi mereka. Kalau polisi tidak segera menahan Ahok, itu karena deliknya penistaan agama. Ahok bukan teroris atau koruptor yang tertangkap tangan sehingga bisa ditangkap tanpa proses peradilan. Begitulah ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi, semua harus prosedural dan memerlukan kesabaran. Jika demikian, demo 4 November nanti kemungkinan dilakukan sebagai sebuah unjuk kekuatan. Pertama, kekuatan para tokoh yang mampu menggerakkan umat.

Kedua, menunjukkan kepada siapa pun untuk tidak bermain-main dengan umat Islam. Jangan meremehkan kekuatan umat Islam. Pesan itu begitu kuat. Demo itu bisa juga berarti tersumbatnya komunikasi.

Bisa juga berarti perlawanan bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan keadilan baik secara ekonomi, politik, maupun hukum.

Aksi yang Islami

Sebagai sebuah cara demo semestinya menjadi pilihan akhir walau bukan yang terakhir. Al-Qur'an sesungguhnya lebih menekankan jalan islah, bil hikmah, dan musyawarah. Prosedur hukum memang lama.

Tetapi, itulah cara yang lebih maslahat. Bukan berarti demo adalah pilihan yang salah. Tetapi, tampaknya manfaat dan hasilnya kurang maksimal. Bahkan, jika tidak dilaksanakan dengan baik, bisa menimbulkan mafsadat baik secara politik, ekonomi, maupun sosial.

Jika demo tetap akan dilaksanakan, semua tentu bersepakat untuk melaksanakannya dengan santun, tertib, aman, dan berkeadaban.

Demo itu digelar untuk membela Islam sehingga para demonstrannya sudah pasti akan menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmah yang melindungi, memberi, dan mencintai sesama.

Masyarakat tentu tidak perlu merasa khawatir akan terjadi kerusuhan. Para demonstran itu adalah muslim yang taat, pejuang syariat, dan tokoh umat yang senantiasa mematuhi hukum dan peraturan.

Jika ada kerusuhan, pasti bukan karena Islamnya. Para demonstran itu tidak akan merusak fasilitas umum, mencemari lingkungan, dan memblokir jalanan karena Islam adalah agama yang senantiasa memerintahkan ihsan.

Di negeri yang merdeka dan demokratis ini, demo tidak boleh dihalangi. Itu hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Warga negara bebas menggunakan haknya secara bertanggung jawab.

Adalah hak pula jika ada warga negara yang tidak menggunakan haknya untuk strategi dan energi yang lebih bermanfaat. Mereka yang berdemo bukanlah anti-Pancasila dan menentang Bhinneka Tunggal Ika.

Demo 4 November dilaksanakan di tengah ribuan warga muslim yang rumahnya tergenang banjir atau di pengungsian karena rumahnya tersapu air bah. Mereka menyaksikan puluhan ribu saudaranya membela Islam, sementara mereka juga perlu uluran tangan.

Selamat berdemo. Semoga Allah meridai.[]

Pemilu yang Bermutu

TANGGAL 9 April, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Walaupun hari pemungutan suara sudah dekat, suasana hajatan akbar demokrasi masih terlihat adem ayem. Kampanye terbuka juga tidak begitu meriah.

Bahkan hasil survei yang baru saja dirilis 3 April menunjukkan bahwa hanya 8% calon pemilih menyatakan mengikuti kampanye dan hanya 8,9% mengaku telah dikontak oleh partai, caleg DPR/DPRD, tim sukses, atau relawan. Secara umum, sikap masyarakat terhadap pemilu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok kritis yang skeptis dan antipati terhadap pemilu. Kelompok ini terdiri dari dua golongan. Pertama, mereka yang menolak Pemilu karena alasan teologis. Pemilu adalah sistem kafir yang bertentangan dengan agama.

Kedua, mereka yang menolak pemilu karena alasan sistemik. Bagi mereka demokrasi hanyalah formalitas politik yang muspra, hanya menguntungkan elite politik dan kendaraan para penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok pertama ini cenderung tidak memilih (golput).

Kedua, kelompok apatispragmatis yang memilih sesuai "pesanan". Ada tiga istilah peyoratif NPWP (Nomor Piro Wani Piro), ARAS (Ada Rupiah Ada Suara), PESTA (Tipis-tipis tapi merata). Pe-

milu merupakan kesempatan untuk mengais rezeki dan memeras caleg.

Mereka mengikuti partai apa saja dan menerima uang dari siapa saja. Ketiga, kelompok idealiskonstruktif. Bagi kelompok ini, pemilu adalah proses penting untuk menentukan masa depan. Pemilu adalah bentuk sistem permusyawaratan rakyat modern yang sangat diperintahkan oleh agama.

Walaupun memiliki kekurangan, pemilu adalah sistem yang paling damai, objektif dan adil dalam pengambilan keputusan publik serta membuka harapan spirit level dan mobilitas sosial vertikal bagi setiap warga negara. Untuk itu diperlukan pemilu yang bermutu.

Penyelenggaraan dan hasil bermutu

Terdapat dua parameter pemilu yang bermutu. Pertama, penyelenggaraan yang bermutu. Untuk ini, ada empat hal yang harus terpenuhi. Pertama, data yang bermutu. Akurasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemilih adalah penentu keberhasilan.

Masyarakat memerlukan kepastian dan kepercayaan bahwa mereka yang berhak memilih (*eligible*) mendapatkan haknya. Dalam demokrasi, memilih bukan sekadar hak tetapi kedaulatan. Kedua, logistik yang bermutu. Hal ini terkait erat dengan ketersediaan dan kualitas surat suara. Ketiga, pemungutan suara yang bermutu.

Diperlukan suasana yang aman, nyaman dan bersahabat yang menjamin kerahasiaan dan ketenangan masyarakat menentukan pilihan di bilik suara. Keempat, penghitungan suara yang bermutu. Potensi kisruh pemilu yang terbesar terletak pada hasil pemilu. Kuncinya adalah kejujuran para penyelenggara pemilu.

Setiap suara adalah amanah, bagaimanapun dan apa pun motif seseorang memberikan suara. Nihilisasi suara adalah pengkhianatan. Pencurian suara adalah tindak kriminal. Parameter pemilu bermutu yang kedua adalah hasil pemilu. Ada tiga ukuran hasil pemilu yang bermutu.

Pertama, anggota legislatif yang bermutu. Meskipun pemilu tinggal menghitung hari, sebagian masyarakat bimbang menentukan pilihan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandu umat Islam agar memilih caleg muslim/ muslimah yang berkualitas, berakhlak mulia, jujur, amanah, dan berkomitmen memajukan umat dan bangsa menuju cita-cita negara yang adil dan makmur.

Muhammadiyah menganjurkan warganya agar memilih caleg dari kalangan kader yang aspiratif terhadap perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Panduan MUI dan Muhammadiyah sangat jelas.

Masalahnya, masyarakat tidak mengenal siapa mereka. Masyarakat tidak mengenal caleg yang fotonya terpajang di mana-mana dan gagal memaknai dermawan dadakan yang mengetuk pintu rumahnya. Kedua, semakin kukuhnya persatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Esensi demokrasi adalah kebebasan.

Ibarat memilih pasangan hidup, pilihan politik adalah persoalan preferensi subyektif yang harus mendapatkan penghormatan. Apa pun partainya, Indonesia Raya harus tetap jaya. Perlu sikap ksatria dan kedewaan politik: sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk (yang menang tidak takabur, yang kalah tidak merusak). Ketiga, kehidupan bangsa yang lebih baik.

Hasil yang ketiga ini bersifat longitudinal tergantung kinerja, komitmen dan konsistensi anggota legislatif terpilih. Anggota legislatif bukan manusia biasa. Mereka memiliki kewenangan

konstitusional yang menentukan arah biduk Indonesia dengan ratusan juta penumpangnya. Para legislator adalah aktor di balik produk undang-undang yang menentukan merah-hitamnya Indonesia. Hasil-hasil pemilu adalah penentu siapa nakhoda Indonesia: presiden dan wakil presiden.

Pemilu gagal bukan karena tidak terselenggara. Pemilu akan gagal jika yang dihasilkan adalah anggota dewan badut yang mahir menyihir dengan kebohongan manis di balik topeng politiknya. Pemilu akan sia-sia dan mubazir belaka, jika yang terpilih adalah para kartel yang menjual kekayaan negara, biadab menguras kekayaan alam demi kekayaan pribadi dan terbahak di tengah keterpurukan rakyatnya. Suara adalah simbol kemerdekaan, kedaulatan dan kebebasan. Setiap suara memiliki makna, mengapa tidak menunaikannya?

Sumber: *Koran SINDO*, 6 April 2014

Memperkuat Demokrasi, Memajukan Bangsa

Judul artikel ini diambil dari tema Halaqah Kebangsaan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (12/4). Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan teras seluruh partai politik kontestan Pemilu 2019.

Secara bahasa, halaqah berarti lingkaran ilmiah di mana para peserta melakukan curah pikir membahas suatu masalah. Dalam sejarah pendidikan Islam, halaqah merupakan cika0l bakal lembaga pendidikan. Para sahabat Nabi Muhammad membentuk halaqah untuk membahas wahyu Al-Qur'an dan mendiskusikan masalah-masalah keagamaan, sosial, politik, dan sebagainya. Sesuai dengan makna dan landasan historisnya, Halaqah Kebangsaan dimaksudkan sebagai ajang silaturrahmi dan silatul fikri (curah pendapat) tentang problematika demokrasi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kemajuan bangsa.

Involusi Demokrasi

Setelah Reformasi 1998, Indonesia berkembang menjadi negara yang demokratis. Indonesia mendapatkan apresiasi internasional

dan model demokrasi yang damai. Perkembangan demokrasi di Indonesia mematahkan "mitos" bahwa agama (Islam) tidak kompatibel dengan demokrasi. Banyak negara dunia ketiga berbondong-bondong belajar berdemokrasi.

Walaupun demikian, perjalanan demokrasi setelah 20 tahun Reformasi belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sohibul Iman, presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memaparkan beberapa masalah demokrasi antara lain mahalnya biaya politik, oligarki kekuasaan, saling menyandera di antara elit politik, dan politik yang involutif. Hal senada juga disampaikan Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Romahurmuzi, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melihat gejala deficit democracy.

Ada beberapa indikator involusi dan defisit demokrasi. Pertama, politik yang anarkis. Praktik politik penuh dengan keculasan, kecurangan, dan kekerasan. Terjadi mutual distrust di antara dan di dalam tubuh partai dan para elit serta masyarakat. Sebagian elit bahkan dengan sengaja menebar kebencian dengan pernyataan yang memicu perpecahan. Demokrasi bisa menjadi salah satu sumber perpecahan dan merusak persatuan bangsa. Walaupun tidak terbukti, ancaman bahwa Indonesia akan mengalami Balkanisme dan terpecah-belah mungkin saja terjadi. Prabowo Subianto mengingatkan kemungkinan Indonesia bubar pada 2030. Banyak yang menampik pernyataan Prabowo. Tetapi, harus diakui, fondasi sosial-budaya Indonesia masih rapuh untuk berdiri tegak sebagai negara demokratis.

Kedua, partisipasi politik masyarakat yang rendah. Apatisme dan pragmatisme politik terlihat jelas dalam perhelatan politik seperti Pilkada dan Pemilu legislatif. Sikap negatif masyarakat terhadap demokrasi disebabkan oleh realitas di mana demokrasi

hanya menguntungkan elit partai politik. Nasib kaum alit tidak jauh berubah. Mereka hanya menjadi komoditas politik. Kesenjangan kawasan dan golongan masih menganga. Kemakmuran masih jauh bagi sebagian besar rakyat. Rasio gini Indonesia tetap tinggi walau menghirup udara demokrasi. Di tengah ekonomi yang terpuruk, demokrasi menumbuhkan pragmatisme di mana masyarakat memilih karena alasan ekonomi bukan idealisme.

Ketiga, adanya fenomena arus balik demokrasi di mana sebagian masyarakat mempersoalkan sistem demokrasi. Di kalangan Muslim terdapat kelompok yang berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem kafir dan taghut. Mereka menolak demokrasi dan menawarkan sistem khalifah sebagai pengganti demokrasi. Selain mereka yang menolak dengan argumen teologis-ideologis, terdapat kelompok yang menentang karena alasan pragmatis-

-empiris. Kelompok kedua sangat kritis dan pesimis dengan demokrasi. Sistem demokrasi tidak hanya menjauhkan mereka dari mimpi kesejahteraan, tetapi lebih serius lagi memalingkan bangsa dari moralitas dan kehidupan yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Perbandingan yang sering dikemukakan adalah Singapura dan Tiongkok. Delusi dan delegitimasi demokrasi dilakukan oleh berbagai kelompok antara lain dengan mendorong kebangkitan militerisme dan amandemen total UUD 1945.

Memajukan Demokrasi

Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara yang maju sekalipun seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris, demokrasi tetaplah merupakan sistem yang tak sempurna. Walau demikian, jika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan nilai, norma, dan spirit pembentukannya, demokrasi merupakan sistem yang paling mungkin. Dalam kaidah usul fiqh, mala yudraku kulluhu la yutra-

ku kulluhu: sesuatu yang tidak bisa diterima semuanya janganlah dibuang seluruhnya. Karena itu, yang niscaya dilakukan adalah memperkuat dan menyempurnakan demokrasi. We are at the point of no return. Tidak ada alasan untuk surut. Ide dan gerakan menolak demokrasi adalah utopia yang lebih berpotensi membawa Indonesia pada kemunduran dan perpecahan.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Pertama, memperkuat partai politik sebagai institusi demokrasi. Regulasi kepartaian perlu dirubah. Sebagian mengusulkan agar anggaran negara untuk partai politik ditingkatkan sehingga bisa mengurangi politik uang. Fisibilitas ide ini memang kecil karena korupsi lebih banyak disebabkan faktor kultur. Gagasan Mengubah sistem pemilu legislatif dan pemilukada ke arah koalisi yang relatif permanen nampaknya perlu lebih serius dipertimbangkan.

Kedua, mendorong penguatan masyarakat sipil dan kekuatan kelas menengah. Seiring pertumbuhan ekonomi, jumlah middle income group terus meningkat. Sayangnya, kelompok tersebut belum tumbuh menjadi kekuatan kelas menengah. Bahkan, di kalangan kelas menengah sendiri terdapat kontestasi antara kelompok kelas menengah yang mapan (rulis/established middle), kelas menengah yang terjerembab akibat demokrasi (falling middle class), dan kelas menengah yang tengah bangkit (rising middle class). Kelompok pertama dan kedua cenderung kurang suportif terhadap demokrasi. Agenda besarnya adalah bagaimana mendorong kelompok middle income menjadi kekuatan *rising middle class*.

Ketiga, menegakkan hukum dan memperkuat bangunan multikulturalisme. Demokrasi dan multikulturalisme adalah sepasang pranata yang saling menyempurnakan. Nilai-nilai tole-

ransi, egalitarianisme, meritokrasi dan trasparansi melekat dalam demokrasi dan multikulturalisme. Pada tahap awal, hukum dan perundangan yang ditegakkan dengan adil bisa menjadi piranti hard pluralism yang membentuk masyarakat multikultural secara eksternal. Untuk jangka panjang, perlu terus menerus dipupuk budaya pluralisme melalui penguatan Pancasila sebagai dasar negara. Agama dan Ormas keagamaan dapat diperkuat sebagai lembaga yang memandu agar demokrasi tetap berada pada jalan yang lurus di atas akhlak yang utama.

Demokrasi meniscayakan ruang terbuka di mana semua warga dapat berdialog dan menyampaikan aspirasi tanpa adanya ancaman. Selain itu juga diperlukan jiwa besar untuk saling berbagi kekuasaan (sharing power), akomodasi kebhinekaan, dan komitmen kebangsaan bahwa kepentingan bangsa harus lebih dinomorsatukan di atas ambisi perseorangan dan golongan. Dalam konteks inilah halaqah kebangsaan seperti yang telah dimulai oleh Muhammadiyah dapat diselenggarakan oleh organisasi yang lainnya. Demokrasi yang kuat adalah prasyarat utama kemajuan bangsa.[]

Minoritas dalam Pilkada

Perhelatan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) sudah menggeliat. Masa kampanye sudah berjalan separuh waktu. Saat pemungutan suara tinggal menghitung hari. Walaupun nampak adem-ayem, Pilkada tetap saja menyimpan bara dalam sekam. Berbagai isu kampanye bisa menjelma prahara. Salah satu yang akan mudah tersulut adalah masalah agama.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, bangsa Indonesia memandang agama sebagai hal yang utama. Benar bahwa mayoritas umat beragama terdiri atas kelompok moderat. Tetapi, dengan orientasi teologi dan ibadah yang begitu kuat, karakter keberagamaan lebih cenderung ekslusif. Sentimen agama mudah tersulut. Contoh aktual adalah aksi massa 411 dan 212 yang terjadi menjelang Pilkada DKI Jakarta. Aksi yang menaklukkan Ahok tersebut didukung oleh hampir seluruh unsur umat Islam termasuk dari kalangan moderat.

Kedua, bangsa Indonesia belum memiliki fondasi multikulruralisme dan pluralisme yang otentik dan kokoh. Prasyarat substantif bagi terbangunnya kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang ideal belum terbentuk (Setara, 2018). Oleh karenanya, menurunnya angka kekerasan keagamaan tidak linear

dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tercatat 151 peristiwa dan 201 tindakan tahun 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2016 masing-masing 2018 peristiwa dan 270 tindakan. IKUB turun dari 75,36 (2015), 75,47 (2016) dan 72, 27 (2017). Menurunnya IKUB tahun 2017 dipengaruhi oleh Pilkada yang sudah memanas di beberapa daerah (Balitbang Kemenag, 2018).

Ketiga, sistem politik yang terbuka dan relasi antara agama dengan negara. Sesuai dengan Dasar Negara Pancasila, Indonesia adalah negara yang relijius. Meskipun tidak berdasarkan atas agama tertentu, negara menjamin kebebasan beragama. Menurut Davie (2016) sistem politik Indonesia dapat menumbuhkembangkan iklim kebebasan berbicara, beragama, dan berkeyakinan serta hak azasi manusia. Akan tetapi, kurangnya koherensi pemahaman atas hak azasi manusia dapat mengancam kohesi sosial.

Rentan Politisasi

Sangat sulit memisahkan agama dalam Pilkada. Dalam beberapa bulan terakhir gejala politisasi agama semakin terlihat. Isu-isu seperti PKI, partai setan, dan aliran sesat mulai mengemuka. Selain program-program populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis populisme agama juga menjadi tema primadona. Banyak calon gubernur/bupati/walikota mengangkat program pembangunan tempat ibadah, santunan dhuafa (fakir, miskin, yatim-piatu, janda, dll.), tunjangan guru agama, layanan kematian, dan sejenisnya. Beberapa kandidat bahkan secara terbuka menyatakan dukungan kepada kelompok agama tertentu dan akan meniadakan kelompok lainnya, khususnya kaum minoritas.

Pengalaman Pilkada di beberapa tempat menunjukkan kaum minoritas agama menjadi kelompok yang sangat rentan dan terancam. Karena berkaitan dengan keyakinan, eksistensi kaum minoritas agama dianggap lebih "berbahaya" dibandingkan dengan minoritas etnis atau suku. Kaum minoritas sering dianggap sebagai kelompok sesat, sinkretik, dan "predator" yang mengganggu, mengancam dan mencemari keyakinan kaum minoritas. Ibarat pelanduk, kaum minoritas terhimpit di tengah pertarungan para gajah. Menurut penelitian Setara (2018), terdapat 20 bentuk kekerasan keagamaan. Lebih dari 50 persen terkait dengan kaum minoritas seperti intoleransi, penyesatan ajaran, pemaksaan keyakinan, pengusiran, ancaman terhadap anak-anak, diskriminasi pelayanan publik, intimidasi, penolakan pendirian tempat ibadah, pelarangan kegiatan ilmiah, intimidasi, dan perusakan rumah.

Dalam sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi mayoritas, eksistensi kaum minoritas semakin tidak diperhitungkan. Dengan jumlah yang sedikit, kaum minoritas dipandang tidak memberikan dukungan signifikan. Demokrasi mayoritas *(majoritarian democracy)* meniscayakan keberpihakan kepada kelompok mayoritas yang menentukan kemenangan. Kelompok mayoritas bahkan bisa tampil menjadi kelompok yang menekan dan mendikte kekuasaan (Conversi, 2011). Akibat sistem politik liberal, kaum minoritas menjadi nihil di tengah mayoritas yang menggurita *(the winners take all)*. Sistem politik yang demikian tidak sehat bagi demokrasi dan persatuan bangsa.

Inklusi dan Integrasi

Bangsa Indonesia telah bersepakat memilih demokrasi sebagai sistem seleksi kepemimpinan nasional dan lokal. Spirit dan nilai demokrasi meniscayakan toleransi, akomodasi, dan integrasi

sosial atas dasar persamaan antar manusia. Makna fundamental *Bhinneka Tunggal Ika* adalah inklusi bagi setiap warga negara apa pun agamanya. Keberagaman adalah semen yang memperkokoh persatuan. Kemajemukan adalah modal sosial yang mengangkat marwah bangsa. Integrasi dan inklusi adalah prasyarat persatuan yang merupakan ajaran universal agama. Islam, misalnya, mengajarkan agar manusia saling menghormati, menerima, dan bekerja sama dengan semua kelompok termasuk kaum minoritas (Zanjani, 1997).

Sangat disayangkan, gegap-gempita Pilkada alpa dari isu perlindungan kaum minoritas. Nyaris tidak ada yang berani menyuarakan hak-hak beragama, sebagai hak azasi manusia dan hak sipil warga negara. Tak terdengar suara mereka yang melakukan advokasi atas kaum minoritas yang terancam jiwanya dan terampas kebebasannya. Jika ambisi menang dan berkuasa sudah meraja, membela kaum minoritas tak ubahnya hara-kiri.

Betapa pun kecil, kaum minoritas tetap merupakan bagian bangsa Indonesia. Eksistensi mereka harus diakui dan dilindungi. Diperlukan kesatria demokrasi yang berani memperjuangkan mereka. Secara matematis, mereka akan kalah. Tetapi, dalam konteks kemanusiaan, mereka adalah pemenang sejati. Pilkada bukanlah sebatas pertarungan menang atau kalah, tapi idealisme dan jati diri. Indonesia menanti para kesatria demokrasi.

Faktor Agama dalam Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan Februari 2017. Tetapi, suhu politik sudah mulai memanas, khususnya di DKI Jakarta. Suasana di lima provinsi lainnya dan puluhan kabupaten/kota terlihat biasa-biasa saja. Di beberapa daerah bahkan terasa begitu adem ayem.

Panasnya suhu politik di Jakarta disebabkan oleh kebijakan, karakter, dan pernyataan kontroversial Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terakhir adalah pernyataannya tentang Surat al-Madinah (5): 51 yang dinilai melecehkan Al-Qur'an dan para ulama. Ahok dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan penistaan Agama Islam. Gelombang demonstrasi dan tuntutan agar Ahok segera diadili dan dihukum terjadi di Jakarta dan beberapa daerah.

Kemarahan publik semakin meningkat. Tetapi polisi terkesan lamban atau tidak menanggapi pengaduan dengan serius. Berbagai pihak khawatir, kasus Ahok dapat memantik kekerasan bernuansa SARA.

Dalam situasi demikian, banyak seruan agar masyarakat tidak membawa isu SARA dalam Pilkada. Sebagian beralasan membawa isu SARA adalah bentuk sektarianisme dan demokrasi yang tidak dewasa. Sebagian lainnya berpendapat menyeret Agama

dalam Pilkada adalah perbuatan yang merendahkan nilai-nilai Agama karena menjadikannya sebagai alat merebut kekuasaan belaka.

Sulit Dihindari

Sangat sulit memisahkan Agama dalam percaturan politik. Pertama, Agama dan politik merupakan satu kesatuan ajaran. Agama memiliki tuntunan yang lengkap dalam semua bidang kehidupan. Sebagian umat Islam berkeyakinan bahwa al-din (Agama), dunya. (kemasyarakatan), dan daulah (Pemerintahan) adalah kesatuan yang utuh. Kelompok ini mewajibkan memilih pemimpin Muslim dan bercita-cita mendirikan negara Islam.

Pemahaman bahwa Agama dan politik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, juga terdapat dalam Agama lainnya. Angela Merkel (1954), kanselir Jerman adalah pemimpin partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU). Benjamin Netanyahu (1949) perdana menteri Israel, adalah tokoh partai Likud yang berhaluan Yahudi fundamentalis. India sekarang ini dikuasai Bharatia Janata Party (BJP) yang berideologi Hindu. Beberapa negara di Asia menjadikan Buddha sebagai Agama resmi.

Kedua, menjadikan Agama sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan jabatan publik merupakan ekspresi relijiusitas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang relijius yang sangat menghormati dan taat menjalankan ajaran Agamanya. Beragama dan mengamalkan ajaran Agama sesuai keyakinan adalah hak konstitusional. Sesuai prinsip Konfesional, Negara tidak melarang penggunaan sImbol dan identitas Agama di ruang publik. Karena itu jika suatu Agama menganjurkan pemeluknya memilih pemimpin yang seiman atau mendirikan partai berdasarkan suatu Agama merupakan hak azasi dan hak sipil warga negara.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang melarang kaum mukmin untuk memilih pemimpin, sahabat, dan sejawat yang tidak seiman. Haram memilih pemimpin non-Muslim karena berpotensi merusak keimanan dan menghalangi perjuangan. Ini memang wilayah ikhtilaf. Sebagian Muslim berpendapat bahwa memilih pemimpin politik termasuk bidang muamalat. Kriteria utamanya adalah kompetensi, kapasitas, dan integritas serta akomodasinya terhadap Islam. Sebagian bahkan berpendapat bahwa pemimpin non-Muslim yang kuat lebih baik dibandingkan pemimpin Muslim yang lemah. Walaupun demikian, sesuai dlahir ayat Al-Qur'an, mayoritas Muslim berprinsip memilih pemimpin seiman adalah kewajiban apalagi jika dia berkemampuan.

Pengalaman Pilkada di beberapa tempat, kampanye memilih pemimpin seiman tidak hanya berkembang di lingkungan umat Islam, tetapi juga di lingkungan Kristen, Hindu, dan agama lainnya.

Ketiga, memilih kepala daerah adalah soal favoritisme. Umumnya pemilih cenderung menentukan pilihan berdasarkan personal proximity (kedekatan pribadi) atau kesamaan-kesamaan dan preferensi seperti Agama, suku, profesi, hobi, partai, organisasi, penampilan, tutur bahasa, atau faktor-faktor emosional lainnya. Idealnya, masyarakat memang memilih berdasarkan penilaian rasional seperti program kerja dan kecakapan. Tetapi, realitasnya jumlah mereka sangat sedikit. Mayoritas justru memilih karena alasan pragmatis: isi tas!

Saling Menghormati

Terkait dengan Pilkada, ada empat hal yang perlu dibangun. Pertama, bagaimana meningkatkan partisipasi umat beragama un-

tuk terlibat dalam Pilkada. Terdapat kecenderungan partisipasi masyarakat dalam Pilkada menurun.

Kedua, membangun sikap dan perilaku saling menghormati. Demokrasi meniscayakan perbedaan pilihan. Memilih berdasarkan pertimbangan keimanan dan kesukuan bukanlah sikap sektarian. Di Amerika Serikat, negara yang dianggap sebagai model dan kampiun demokrasi, faktor Agama masih cukup dominan. Dalam sebuah kesempatan Presiden Obama mengatakan: saya sangat kecewa jika warga kulit hitam memilih Trump. Sama halnya dengan Kalangan Kristen Konservatif yang mendukung Donald Trump karena sentimen Republikan.

Ketiga, menegakkan undang-undang dan peraturan Pilkada. Tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan institusi pemerintahan tidak boleh dipergunakan dan disalahgunakan untuk kampanye. Menistakan Agama adalah perbuatan kriminal. Siapa pun yang melakukan pelecehan Agama harus ditindak sesuai hukum. Negara harus tegas dan tidak boleh kalah. Yang juga terlarang adalah praktik politikuang dan bentuk-bentuk politik transaksional lainnya.

Keempat, membangun sikap ksatria: siap menang, siap kalah, dewasa menerima perbedaan, jiwa besar menerima kekalahan dan kesantunan merayakan kemenangan.

Pilkada adalah peristiwa politik biasa, mekanisme demokrasi untuk pemimpin daerah yang terbaik, melayani masyarakat, dan membangun bangsa yang bemartabat. Umat beragama berperan penting dalam menyukseskan Pilkda dan dapat menjadi teladan berpolitik yang santun dan berkeadaban sebagai perwujudan nilai universal Agama.[]

Potensi Sara dalam Politik

Beberapa hari lalu (20/2), sejumlah tokoh nasional menyampaikan seruan moral kebhinekaan. Salah satu isinya adalah tentang politik bernuansa SARA. Mereka menyerukan agar semua pihak tidak menggunakan cara-cara Machiavellis dalam kompetisi politik termasuk Pilkada 2018 dan pemilihan presiden 2019. Demi menjaga kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional, politisasi agama dan syiar kebencian atas dasar sentimen SARA hendaknya ditinggalkan.

Seberapa besar potensi politik SARA? Dapatkah Pilkada terbebas dari politik SARA?

Dampak Populisme

Sejak Reformasi 1998, Indonesia mencatat sejarah baru sebagai salah satu dari sedikit negara yang sukses melakukan transisi dan transformasi politik yang demokratis dan damai. Selama dua decade, Indonesia berhasil menyelenggarakan tiga kali Pilpres dan lebih dari 3500 Pilkada secara langsung dengan tertib, aman, dan damai. Kekawatiran bahwa Indonesia akan mengalami Balkanisasi sampai saat ini tidak terbukti. Capaian tersebut merupakan

modal sosial dan politik yang memperkuat percaya diri dan optimisme masa depan demokrasi di Indonesia.

Memang masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan disempurnakan. Konsolidasi demokrasi berjalan lambat, bahkan menurut sebagian pihak, mengalami kemunduran. Nilai-nilai dan kultur demokrasi belum tertanam dalam tubuh sebagian besar rakyat Indonesia. Praktik politik identitas bernuansa SARA tidak terhindarkan dalam Pilkada 2016, khususnya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Indeks demokrasi Indonesia versi *Economist Intelligence Unit* (EIU) turun dari peringkat 48 menjadi 68. Secara empiris, menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai indikator demokrasi tidaklah tepat. Di luar Jakarta, puluhan Pilkada 2016 berlangsung lancer dan berkualitas.

Meskipun demikian, potensi politik identitas bernuansa SARA tidak dapat dipandang sebelah mata. Pertama, masyarakat Indonesia belum beranjak jauh dari komunalisme. Usaha memelihara kolektivitas dan menjadi identitas menumbuhkan sikap tertutup, konservatif, dan intoleran terhadap perbedaan. Agama dan etnisitas adalah dua identitas utama yang paling kuat mempengaruhi sikap politik. Masyarakat multikultural dalam dunia kosmopolit masih diwarnai oleh kokohnya tembok segregasi sosial akibat kuatnya ikatan *in-group* dan *out-group*. Pilkada seringkali menjadi momentum pembuktian supremasi suatu kelompok atas yang lainnya.

Faktor kedua adalah populisme. Pilkada langsung adalah pupuk populisme sebagai gerakan melawan politik representatif. Pemilihan langsung dengan sistem terbuka di mana kemenangan ditentukan oleh kuantitas suara mendorong para kandidat meraih popularitas guna mendulang semaksimal mungkin dukungan publik. Mereka menawarkan program-program populis

bagi kaum *alit* (masyarakat kecil) dan meraih dukungan komunitas mayoritas. Kelompok mayoritas begitu *digdaya* dan memikat. Sebaliknya kelompok minoritas hanya menjadi objek yang terpinggirkan. Populisme, melanggengkan dominasi mayoritas atas minoritas yang lambat laun menggerogoti kohesi sosial dan kebhinekaan. Dengan kewenangan bupati/walikota yang begitu besar, populisme melahirkan elit lokal yang menjelma menjadi raja-raja kecil yang memimpin dengan hukum besi. Pemimpin populis seringkali merasa ikatan langsung dengan rakyat adalah segala-galanya. Demi popularitas mereka berani melabrak aturan dan "bermain api" dengan anggota legislatif dan punggawa partai politik. Satu demi satu kepala daerah meringkuk di lembaga pemasyarakatan karena kasus korupsi.

Faktor terakhir terkait dengan sistem demokrasi liberal. Nafsu kekuasaan yang dibingkai dalam sistem pemilihan langsung terkadang mendorong sebagian kandidat menghalalkan segala cara. Kanibalisme dan berbagai praktik politik hitam yang mencemari hakikat demokrasi sebagai proses politik yang berkeadaban. Pilkada "sistem gugur" menjadi alasan utama para kandidat untuk menang mutlak satu putaran. Biaya politik menjadi begitu mahal dan transaksional. Adagium *the winner takes all* telah merusak pranata sosial dan meritokrasi pemerintahan.

Tanggungjawab Bersama

Sampai pada tahap penetapan calon, KPU daerah telah melaksanakan tugas dengan baik. Demikian pula dengan KPU pusat yang berhasil melalui babak krusial penetapan partai politik peserta Pemilu dengan mulus. Keberhasilan tersebut merupakan modal dan awal yang menentukan kualitas penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berkeadaban. Menihilkan dan memisahkan aspek SARA dalam Pilkada tidaklah mudah, malah mungkin mustahil. Memilih adalah persoalan preferensi. Rasionalitas dan obyektivitas seseorang dalam menentukan pilihan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari subyektivitas emosional atas dasar keyakinan agama dan afinitas kelompok. Subyektivitas merupakan sikap manusiawi.

Yang paling mungkin adalah meminimalkan potensi politik SARA. Dalam jangka panjang diperlukan rekayasa sosial untuk Mengubah struktur dan budaya komunalisme ke arah masyarakat yang terbuka dan egalitarian. Terkait dengan Pilkada, sangat mendesak dilakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih *(voters education)* agar masyarakat memilih secara rasional dengan nalar kritis. Partai politik, kekuatan masyarakat sipil, dan media massa perlu bekerja sama membantu masyarakat mengenal, menganalisis, dan menilai program kerja dan rekam jejak para kandidat.

Kedua, memperkuat ikatan kebersamaan dan kewargaan agar masyarakat terbuka dan toleran terhadap perbedaan pilihan. Demokrasi membawa konsekwensi pluralitas politik. Tidak ada pilihan tunggal dalam berdemokrasi walaupun hanya ada satu calon tunggal. Demokrasi yang sehat menuntut kedewasaan sikap saling menghormati dan menerima mereka yang berbeda.

Ketiga, membangun kesadaran bersama bahwa Pilkada adalah proses politik biasa. Kekuasaan kepala daerah tidak tak terbatas. Dalam alam demokrasi, pemimpin datang dan pergi, silih berganti. Kesadaran ini mutlak diperlukan agar masyarakat tidak larut dalam emosi yang berlebihan. Pilkada adalah proses politik untuk memilih pemimpin yang terbaik melalui proses yang berkualitas.

Yang tidak kalah pentingnya adalah netralitas Pemerintah dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Birokrasi harus tegak berdiri di atas aturan dan hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja tak kenal lelah untuk menjamin tidak ada seorangpun warga negara yang kehilangan hak politiknya serta memastikan tak segelintir pun suara yang sirna. Keberanian penyelenggara pemilu menjatuhkan sanksi adalah pertaruhan. Masalah SARA bisa mengemuka jika terdapat salah satu golongan dan individu dalam agama dan etnis tertentu yang merasa diperlakukan tidak adil.

Pilkada bukanlah perhelatan pemilihan pemimpin belaka, melainkan wajah keadaban, dan ujian kekuatan kebhinekaan bangsa. Potensi politik SARA akan selalu ada, tetapi rasa percaya diri dan ikatan kebangsaan sangat mungkin mampu mengatasi-nya.[]

Demokrasi yang Ksatria

Sebagai sistem, demokrasi memiliki empat aspek; nilai, prosedur, tata kelola pemerintahan, dan kebudayaan. Demokrasi adalah produk ikhtiar manusia dalam mewujudkan tata kehidupan yang maju, makmur dan adil. Cita-cita demokrasi lahir dari suasana kehidupan sosial dan politik yang bengis, feodal dan kesengsaraan. Demokrasi memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar, spirit dan arah yang menentukan pelaksanaan, prosedur , dan penyelenggaraan negara.

Nilai dan Budaya Demokrasi

Demokrasi memiliki tiga nilai fundamental yang bersifat universal. Dikatakan universal karena nilai-nilai demokrasi bersesuaian dengan nilai-nilai dan ajaran agama dan budaya besar dunia. Nilai yang pertama adalah kesamaan antar manusia *(egalitarianism)*. Setiap manusia lahir di dunia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Selain memiliki wujud yang sempurna, manusia memiliki potensi fitri dan sifat-sifat utama yang memungkinkan mereka mengembangkan diri dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Berdasarkan nilai *egalitarianisme* setiap manusia adalah individu

yang diakui eksistensinya, dan dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Nilai yang kedua adalah keterbukaan. Demokrasi memberikan ruang terbuka bagi siapa saja untuk melakukan mobilitas sosial vertikal, Mengubah keadaan dan kedudukan yang terbaik. Di dalam demokrasi terkandung *spirit level* yang menggerakkan dan memberikan harapan kepada setiap manusia untuk meraih kedudukan sosial dan politik yang setinggi-tingginya. Demokrasi memungkinkan siapa pun yang giat-berkeringat dengan cerdas untuk menjadi apa pun, *from zero to hero*. Untuk meraih dan mempertahankan kedudukan, seseorang tidak bisa duduk ongkang kaki.

Nilai yang ketiga adalah pluralisme. Setiap manusia adalah individu yang merdeka dan berdaulat atas diri dan tindakannya. Setiap individu berhak memilih dan dipilih. Demokrasi member pilihan bagi individu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Di dalam demokrasi terdapat perbedaan aspirasi yang menuntut sikap toleran, tenggang rasa dan ksatria. Seseorang harus berlapang dada berbagi, memberi dan menerima. Ingin menang sendiri, monopoli, dominan dan tiran adalah sikap yang bertentangan dengan nilai pluralisme. Untuk itu diperlukan musyawarah sebagai sebuah konsultasi publik untuk mengambil keputusan bersama.

Aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan melahirkan budaya demokrasi; perilaku kolektif suatu masyarakat yang didasarkan atas kepercayaan, nilai, dan norma yang dianutnya. Demokrasi tidak terbatas pada ranah politik kekuasaan, tetapi dalam seluruh bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, dan sosial-keagamaan. Demokrasi adalah ke-

adaban publik yang mencerminkan keluruhan budi, ketinggian intelektual, dan kekuatan nalar sehat suatu masyarakat.

Sikap Ksatria

Walaupun mendapatkan pujian internasional sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia belum menjadi negara yang demokratis. Nilai-nilai dan budaya demokrasi belum terimplementasi dalam tata kelola negara dan pemerintahan. Demokrasi dimaknai dan direduksi sebatas pemilihan umum, pergantia, dan perebutan kekuasaan. Karena tercerabut dari nilai-nilai yang melahirkannya, demokrasi laksana sistem robotik yang mekanistis. Robot adalah makhluk canggih yang direkayasa manusia untuk membantu mencapai tujuan. Demokrasi robotik adalah sistem yang bergerak secara kaku, prosedur belaka, tanpa jiwa dan hati nurani.

Demokrasi robotik inilah yang—nampaknya- sedang berlaku di tanah air kita. Rakyat melihat dengan mata jelaga bagaimana praktik demokrasi yang brutal, mahal, dan ribet. Rakyat menjadi saksi bagaimana libido kekusaan telah melenyapkan kesantunan. Yang terjadi adalah kekerasan verbal jauh dari nalar intelektual, sikap ngotot mengandalkan otot, pemilihan berbelit saat keuangan makin pailit.

Sudah waktunya bangsa Indonesia membangun demokrasi yang ksatria. Demokrasi ini memiliki tiga pilar. Pertama, kekuatan moral dan intelektual. Yang terjadi selama ini—khususnya Pemilu 2014- adalah adu kekuatan finansial. Mereka yang bermoral tanpa kapital tebal gugur terpental. Kekuatan ksatria terletak pada kepribadian yang utama, bersenjata akhlak mulia, dan keunggulan ilmunya. Tidak ada gunanya meratap. Rakyat tetap berdaulat dengan mengontrol sepak terjang para wakilnya.

Kedua, kebesaran jiwa untuk menjadi *leader-follower*, pejabat-rakyat, imam-makmum . Ksatria mahir berbicara dan pandai mendengar. Ksatria tidak *umuk* (sombong) ketika menang, dan *ngamuk* sebagai pecundang. Para pemimpin perlu belajar dari para petinju yang berpelukan dengan tubuh berpeluh setelah adu jotos di ring tinju. Sedih dan kecewa karena kalah lumrah bagi manusia. Tetapi, Meski demikian, ksatria sejati masih saling memuji, bukan menghabisi dan mencaci maki. Ksatria akan datang dengan kepala tegak menjabat tangan sang pemenang dan mengucap selamat dengan penuh hormat. Itulah cara terhormat para ksatria hebat.

Ketiga, kebesaran hati untuk saling berbagi. Para ksatria sejati bertarung dengan lawan yang seimbang, naik ke podium setelah bertanding dengan sportif bukan karena lawan tidak berdaya. Di dalam Islam tidak diajarkan *the winner takes all*; menang-menangan karena menang, monopoli dan menghabisi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, demokrasi ditandai oleh adanya pembagian kekuasaan *(distribution of power)* bukan pemusatan kekuatan *(centrality of power)* dan akumulasi kekuasaan *(accumulation of power)*.

Rakyat sudah lelah melihat para elitnya bertikai. Mereka merindukan pemimpin yang teguh dan teduh, mengayomi dan melayani. Rakyat ingin pemimpin segera bekerja untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran yang merata.[]

Umat Tanpa Pemimpin

Kamis (8/10/2015) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan kehormatan Pimpinan KAHMI Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam dibahas berbagai persoalan umat dan bangsa. KAHMI dan PP. Muhammadiyah mengkhawatirkan kondisi dan masa depan umat dan bangsa. Beberapa masalah umat yang dirasakan sangat berat dan perlu dilakukan penyelesaian adalah persoalan lemahnya ekonomi, rendahnya daya saing, dan tidak adanya kepemimpinan. Artikel ini hanya membahas masalah krisis kepemimpinan umat.

Umat yang Terbelah

Merujuk tesis Kuntowijoyo dalam bukunya Muslim Tanpa Masjid umat Islam mengalami masalah segregasi sosial yang serius. Merujuk peristiwa seputar Reformasi 1998 Kuntowijoyo berpendapat bahwa generasi muda sudah terbelah antara satu dengan yang lain. Selain karena faktor orientasi politik juga karena masjid sudah kehilangan fungsinya sebagai pemersatu umat. Perbedaan di kalangan aktivis muda secara kontinum terjadi ketika mereka tampil memimpin organisasi Islam, partai politik, birokrasi dan organisasi sosial.

Harus diakui saat ini umat Islam tidak memiliki pemimpin. Yang ada sekarang adalah pemimpin organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Tarbiyah Islamiyah, dll. Masing-masing pemimpin diterima di internal organisasinya. Umat tidak memiliki pemimpin yang diterima luas, pemersatu dan pembangun solidaritas semua organisasi Islam. Bahkan, internal organisasi juga terdapat friksi dan faksi sebagaimana terlihat dalam suksesi kepemimpinan dan perpecahan pasca perhelatan sebuah permusyawaratan.

Walaupun di permukaan tampak rukun potensi perpecahan umat Islam relative tinggi. Di dalam tubuh umat tumbuh kelompok takfiri yang berislam secara ekstrem dan menempatkan kelompoknya sebagai pemegang otoritas tunggal kebenaran agama. Kaum takfiri mengafirkan pihak lain di luar organisasinya dan juga varian lain di dalam sesama organisasi misalnya dengan label liberal, sekuler, dsb. Di akar rumput sering terjadi perebutan jamaah, masjid, dan asset sosial.

Tidak adanya pemimpin umat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, modernisasi organisasi Islam yang berdampak terhadap pergeseran nilai dan kultur kepemimpinan. Di satu sisi modernisasi berdampak positif terhadap sistem administrasi, manajerial, dan akuntabilitas kinerja serta keuangan. Pada sisi yang lain, modernisasi melemahkan kepemimpinan kharismatik yang bersendi pada kualitas keulamaan dan keutamaan akhlak. Modernisasi melahirkan pemimpin formal yang kepemimpinannya ditentukan oleh jabatan struktural. Berkelindan dengan demokratisasi, modernisasi organisasi Islam melahirkan pemimpin populis yang kehilangan peran sebagai pemandu umat dan penegak kebenaran.

Faktor kedua adalah orientasi politik kekuasaan. Banyak pemimpin organisasi Islam yang menduduki jabatan strategis partai politik. Sebagian mereka menjadi pejabat publik. Dari sudut perjuangan politik, hal tersebut merupakan capaian politik santri. Tetapi, dari sudut persatuan dan sinergi perjuangan umat Islam hampir selalu gagal. Fenomena kanibalisme sesama partai dan rivalitas diantara pemimpin Muslim semakin terasa. Laksana pepatah "the winner takes all" di kalanga norganisasi Islam tidak terjadi disrribusi dan meritokrasi jabatan. Monopoli dan dominasi kekuasaan oleh kelompok mayoritas begitu kasat mata dalam kementerian tertentu. Etik tersingkirkan oleh libido kekuasaan.

Faktor ketiga adalah kurangnya komunikasi, silaturrahmi, dan sillatul fikri (tukarmenukarpemikiran) di antara para pemimpin organisasi Islam sehingga tidak terjalin personal proximity. Pertemuan seringkali bersifat seremonial, sporadis, dan kasuistik. Ketika warga Palestina diserang Israel umat Islam segera melakukan "ritual" kutukan dengan nada bahasa dan isi yang hampir sama. Ketika umat Islam di Tolikara diserang kelompok Kristen fundamentalis para tokoh Muslim segera bertemu. Sayup-sayup suara jihad berkumandang. Tetapi seruan itu menjadi lemah ketika pemimpin Muslim lainnya membuat pernyataan yang berbeda.

Membangun Dialog dan Kerja sama

Dalam sejarah, umat pernah memiliki pemimpin umat seperti Buya Hamka. Walaupun berlatarbelakang Muhammadiyah Buya bisa diterima oleh hampir seluruh elemen umat. Pernyataannya sangat di dengar dan akhlaknya menjadi teladan.

Sekarang ini memang sulit memiliki pemimpin kharismatik sekelas Buya Hamka. Konteks sosial, politik dan keagamaan

umat jauh berbeda. Tetapi umat masih mungkin memiliki pemimpin yang mampu menjalin komunikasi dan membangun solidaritas umat. Pertama, di kalangan para pemimpin Muslim perlu membangun komunikasi yang lebih intens dan persahabatan pribadi. Salah satunya melalui pertemuan non-formal dan saling mengunjungi. Memang hal ini tidak mudah karena kesibukan masing-masing. Berbagai ketegangan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah non-formal. Kedekatan para tokoh di tingkat nasional bisa menginspirasi pemimpin di akar rumput. Kedua, perlu ada jiwa besar dan kedewasaan untuk saling memberi dan menerima. Perlu keikhlasan untuk menjadi makmum dengan tidak memaksakan diri menjadi imam. Umat perlu membangun tradisi followership tidak hanya leadership. Sesama pemimpin perlu saling mengisi. Ketiga, diperlukan peningkatan kerja sama di antara organisasi Islam. Kerja sama tersebut bisa bersifat bilateral. Lembaga seperti MUI bisa lebih berperan dalam mewada hiorganisasi Islam yang lebih inklusif. Sewaktu menjabat ketua umum PP. Muhammadiyah, Prof. Din Syamsudin pernah membentuk forum Silaturahmi Organisasi dan Lembaga Islam (SOLI) sebagai sarana membangun dan mempererat kerja sama pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Sayang forum tersebut tidak berjalan dengan baik.

Di tengah semangat tahun baru Islam 1437 H, umat Islam perlu lebih serius memikirkan bagaimana menjalin ukhuwah dan kerja sama. Tantangan keummatan yang semakin berat di tengahan camat perpecahan memerlukan memimpin yang bisa menjadi penyambung li dan umat, *solidarity maker* dan dirigen yang mengorkrestasi suara umat menjadi harmoni yang indah.

Polarisasi Politik Muslim

Polarisasi politik merupakan hal yang lumrah dalam setiap perhelatan politik. Tidak hanya di Indonesia, polarisasi politik juga terjadi di negara-negara maju yang sudah lama menerapkan demokrasi seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris, Australia, dan negara-negara lainnya. Akar dan tingkat polarisasi politik berbeda-beda. Polarisasi politik dalam pemilu legislatif lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan eksekutf: presiden, gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa. Rendahnya polarisasi politik pemilu legislatif dipengaruhi oleh deideologi partai politik dan konvergensi sosial,politik, dan keagamaan.

Agama merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam polarisasi politik. Dengan tingkat keberagamaan yang tinggi, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang *religion-centris*: melihat semua hal dari perspektif agama, mudah terbakar, dan sensitif. Walaupun terjadi pada semua agama, polarisasi politik di tubuh muslim begitu kuat dan jelaga. Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah yang besar, tingkat kemajemukan internal yang tinggi, dan kematangan berdemokrasi yang rendah. Polarisasi politik keagamaan tidak hanya terjadi antara muslim dengan non-muslim, tetapi justru di antara sesama muslim.

Politisasi Agama

Polarisasi politik muslim dalam Pilpres 2019 menguat dan mengkhawatirkan dibandingkan dengan dengan tiga Pilpres sebelumnya. Umat Islam terpolarisasi dalam kutub keislaman yang sebenarnya sudah klise dan tidak lagi relevan. Isu-isu seperti modernis-tradisionalis, salafi-*salafiyyah,* radikal-liberal, islamis-nasionalis, Muhammadiyah-NU, dan ekslusif-pluralis dibangkitkan kembali dengan resonansi ekonomi: pribumi-asing, sosialis-kapitalis, *alit*-elit, dan rakyat-konglomerat.

Faktor utama yang mempengaruhi polarisasi politik adalah politisasi agama di mana agama ditafsirkan dan secara sistematis dipergunakan untuk kendaraan politik kekuasaan. Dalih dan dalil agama dijadikan referensi teologis untuk memenangkan pertarungan politik. Politisasi agama begitu subur dan efektif karena faktor-faktor internal dan ekstenal umat Islam. Dalam diri umat Islam terdapat kelompok Islam *"kaffah"* yang berkeyakinan dan berpandangan integratif. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, mengatur semua bidang kehidupan, dan merupakan satu kesatuan antara agama *(al-din),* kemasyarakatkan *(al--dunya), d*an negara/pemerintahan *(al-daulah).* Mereka adalah aspiran partai Islam, formalisasi Syariah, dan negara Islam yang anti Pancasila, semua perundang-undangan, dan sistem politik di luar Islam. Faktor internal ini masih cukup kuat tertanam dan setiap saat tumbuh bersemi dalam iklim politik yang kurang berpihak pada umat Islam.

Pertumbuhan kelompok Islam *"kaffah"* ditandai oleh kelahiran, reinkarnasi, atau transformasi konservatisme politik, agama, dan kebudayaan. Kelompok konservatif berusaha meyakinkan umat bahwa Islam dan muslim berada dalam ancaman. Jika lengah dan lemah, maka muslim bisa kalah dan Islam akan punah.

Kelompok konservatif secara canggih menggunakan berbagai media dan memanfaatkan iklim kebebasan informasi dan keterbukaan politik memproduksi, mereproduksi, dan mengkapitalisasi ortodoksi Islam. Sebagaimana ditulis Carool Kersten (2018), sejak Reformasi umat Islam terlibat dalam hiruk pikuk perebutan wacana antara kelompok progresif dan reaksioner. Pergulatan wacana terjadi di mimbar khutbah, pengajian, penyusunan undang-undang, dan kepemimpinan nasional.

Kelompok konservatif semakin percaya diri di tengah pemerintahan dan kepemimpinan yang lemah serta apatur keamanan dan penegak hukum yang gamang menegakkan peraturan. Faktor eksternal ini turut mempengaruhi kebangkitan aktivisme politik Islam. Beberapa pihak menilai, aksi 411 dan 212 tidak sekadar konsolidasi kelompok konservatif tetapi merupakan arus baru gerakan Islam sebagai "alternatif" atau "lawan" dua arus utama (Muhammadiyah dan NU) yang dianggap rapuh, liberal, dan tunduk kepada Pemerintah. Konservatisme semakin mendapatkan tempat di tengah kemenangan politik kelompok konservatif Kristen (Eropa, Amerika Serikat), Hindu (India), Buddha (Myanmar) dan Yahudi (Israil).

Faktor ekternal lainnya adalah residu Pilkada Jakarta 2016 dan rivalitas politik Jokowi-Prabowo. Koalisi partai yang mengusung Ahok-Jarot dan Anies-Sandi bersaing kembali di arena yang lebih tinggi. Ibarat sepakbola, Pilpres adalah *rematch* partai *el classico* atau *derby* Jokowi-Prabowo. Isu-isu politik-keagamaan direproduksi kembali secara kreatif dan massif melalui media sosial. Pihak Jokowi menengarai pihak Prabowo memproduksi konten hoaks sebagai sarana kampanye negatif dan kampanye hitam.

Media sosial merupakan faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap polarisasi politik dan membahayakan persatuan. Michael Erbschloe (2019: 186) dalam *Extremist Propaganda in Social Media: A Threat To Homeland Security* menjelaskan sepuluh alasan mengapa media sosial menjadi pilihan utama dalam propaganda berbagai ideologi: *blissfulness, easy to understand, laziness, repetition, familiarity, consistency, lack of knowledge, confusion, group expectation, peer pressure.* Sebagian menganalogikan "perang tagar" laksana Perang Badar. Dalam konteks Pilpres 2019, Perang Badar dimunculkan dua kali dalam pernyataan Amien Rais dan doa Neno Warisman di munajat nasional 212.

Kesadaran Politik

Pilpres merupakan peristiwa politik biasa. Dalam perspektif Islam politik merupakan masalah muamalah, bukan akidah dan ibadah. Ini merupakan pandangan beberapa ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU. Sebagaimana disebutkan dalam Masalah Lima dan Keputusan Muktamar Jakarta (2000), Muhammadiyah memandang politik -termasuk Pilpres- merupakan wilayah *muamalah duniawiah* yang didalamnya manusia memiliki keleluasaan untuk mengembangkan sistem dan berpartisipasi sepanjang tidak bertentangan nilai-nilai Islam (*Manhaj* Gerakan Muhammadiyah, 2013). Yang diajarakan dalam Islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan akhlak berpolitik, bukan bentuk negara, partai, dan sistem politik.

Presiden merupakan jabatan politik yang penting tetapi bukan segala-galanya. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Masa jabatan, kewenangan, dan kinerja presiden dibatasi oleh Konstiusi dan diawasi oleh DPR. Presiden tidak kebal hukum dan berkuasa mutlak. Sejak amandemen UUD 1945, kewenangan presiden

berkurang dan harus berbagi peran dengan legislatif dan yudikatif. Agak berlebihan jika kepemimpinan seorang presiden dikaitkan dengan eksistensi Islam. Semua Capres beragama Islam. Bagaimanapun kualitas keislamannya mustahil seorang presiden bisa dan berani membuat kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Selain bertentangan dengan Pancasila kebijakan yang merugikan atau tidak sejalan dengan aspirasi muslim sangat berpengaruh terhadap dukungan politik. Siapa pun yang terpilih dalam Pilpres 2019, Islam dan muslim akan tetap menjadi faktor politik yang menentukan.

Polarisasi politik tidak selamanya berakibat buruk. Menurut James Q Wilson (2005: 58), polarisasi politik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perdebatan penting dan isu-isu publik. Akan tetapi perselisihan politik yang terus menerus berpotensi menurunkan kinerja Pemerintah dan melupakan cita-cita bersama dalam bernegara. Polarisasi politik berpotensi menimbulkan segregasi umat. Cendekiawan Kuntowijoyo (2001: 325) menyatakan keberatan atas berdirinya partai-partai Islam karena bisa mengakibatkan terhentinya mobilitas sosial, disintegrasi umat, umat menjadi miopis, pemiskinan, runtuhnya proliferasi, dan alienasi generasi muda. Peringatan Kuntowijoyo, nampaknya terjadi di tengah polarisasi politik umat Islam.

Pilpres adalah ikhtiar demokratis untuk memilih pemimpin terbaik yang mampu memimpin bangsa mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang maju, bermartabat, adil, dan makmur. Karena itu, Pilpres hendaknya dilaksanakan dengan keadaban, saling menghormati, mengutamakan persatuan bangsa di atas kehendak kekuasaan. Dalam ajaran Islam, sesuatu yang baik *(al-khair)*, harus diraih dengan cara-cara yang baik dan benar *(al-ma'ruf)*. Terlalu mahal jika karena pilpres umat terpecah belah. Sudah sa-

atnya polarisasi dan ekstremisme politik dihindari untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Sumber: *Harian Kompas*, 6 Maret 2019

Multidimensi Prostitusi

Pemindahan lokalisasi Kalijodo berlangsung tanpa perlawanan. Kawasan kumuh di Jakarta Barat itu digusur untuk penataan bantaran sungai untuk mengatasi banjir di Jakarta. Fenomena ini menarik. Pengalaman penutupan Kramat Tunggak (Jakarta), Doli (Surabaya) dan tempat prostitusi lainnya berlangsung alot, debat publik yang rumit, dan kekerasan. Apakah ini karena keberhasilan pendekatan Gubernur Ahok? Ataukah karena "warga" Kalijodo telah bertaubat sehingga mereka ikhlas digusur? Apa pun alasannya, penulis bersyukur atas penggusuran lokalisasi tersebut.

Tetapi, apakah dengan penggusuran lokalisasi Kalijodo masalah terselesaikan? Secara hukum karena alasan penggusuran adalah pembangunan tidak ada alasan warga lokalisasi kalijodo untuk bertahan. Dari sudut tata kota masalah *clear* dan *clean*. Akan tetapi, masalah prostitusi belum tentu teratasi. Prostitusi sangat kompleks. Prostitusi harus dipahami dan diselesaikan dari berbagai dimensi.

Dimensi Sosial Kemanusiaan

Dari perspektif agama prostitusi merupakan perbuatan tercela. Prostitusi adalah perzinahan; perbuatan nista yang merusak manusia, kemanusiaan, dan kehidupan. Karena itu, di dalam Islam,

pezina harus dihukum yang seberat-beratnya; cambuk atau rajam. Hukuman tersebut untuk memelihara akhlak dan menciptakan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Ironisnya, walaupun ancaman hukumannya sangat berat, prositusi justru kian menjamur. *Pertama*, akibat kebijakan lokalisasi. Pemerintah berdalih lokalisasi prostitusi untuk pembinaan iman, pendidikan keterampilan dan kesehatan sehingga mereka bertaubat, memiliki pekerjaan, dan tidak menyebarkan penyakit. Realitasnya, lokaliasi adalah bentuk legalisasi, proteksi, dan kapitalisasi. Lokalisasi membuat pelacuran aman dan nyaman. Pembinaan tidak membuat lokalisasi sepi. Regenerasi dan kaderisasi pelacur terus terjadi. Pendidikan seks, penyuluhan dan pelayanan kesehatan membuat pelacur semakin percaya diri. Lokalisasi tidak menghilangkan pelacuran liar dan "ilegal". Yang terjadi justru sebaliknya. Prostitusi *online*, warung remang dan sebagainya terus berkembang. Prostitusi di luar lokalisasi menjadi pilihan karena lebih murah dan mudah.

Kedua, sebab yang berkaitan dengan gerakan sosial dan HAM. Perjuangan kaum Feminis dan HAM liberal mulai berbuah. Perlahan-lahan sebutan wanita tuna susila (WTS) hilang dalam kamus sosial digantikan sebutan pekerja seks komersial (PSK). Sebutan WTS bias jender dan bertentangan dengan HAM. Prostitusi adalah transaksi suka rela antara pria dengan wanita. Semua pelaku—pria atau wanita—adalah tuna susila. Sebagian besar wanita terjun ke dunia prostitusi karena alasan ekonomi: kemiskinan. Akibat diskriminasi, subordinasi dan ketidak adilan sosial rata-rata wanita hidup lebih miskin ketimbang pria. Menjadi pelacur adalah pilihan pekerjaan. Pelacuran berubah menjadi sektor "jasa" seksual profesional. Seorang pejabat daerah bahkan pernah mengusulkan agar PSK dapat ditulis dalam kolom KTP.

Penyedia dan pengguna jasa seksual tidak perlu malu dan malu--malu. Setelah menjadi PSK pelacuran tidak lagi dikategorisasi praktik perdagangan manusia *(human trafficking)*. PSK tidak hanya dari kalangan miskin tapi justru kalangan mapan: kaya, melek teknologi, berpendidikan tinggi, dan mahir berbisnis. Pelacuran bermigrasi dari rumah kumuh dan warung remang ke rumah kost mewah dan hotel berbintang.

Ketiga, karena perubahan pandangan dan gaya hidup. Pandangan masyarakat tentang hubungan seksual berubah dari orientasi reproduksi menjadi rekreasi. Sesuai dengan tuntunan agama dan moralitas sosial, hubungan seksual harus diikat oleh pernikahan. Selain sebagai lembaga, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Tidak adanya keturunan bisa menjadi alasan diperbolehkannya perceraian. Dewasa ini sebagian kalangan memandang hubungan seksual sebagai rekreasi yang tidak perlu terikat oleh pernikahan. Pandangan ini melahirkan para petualang seks yang berganti-ganti pasangan. Prostiusi menjadi bagian dari wisata dan komoditi. Fenomena LGBT antara lain disebabkan oleh oriensi seksual ini.

Sebab lain yang mendukung prostitusi adalah rusaknya keharmonisan keluarga. Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Terbuka kemungkinan Indonesia menjadi *fatherless nation* karena banyaknya *single mother*. Bagi sebagian keluarga yang menolak poligami, prostitusi terkadang menjadi pilihan. Sebagian suami juga memilih jalan ini karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan batin isteri. Bentuk lain adalah fenomena kawin siri. Sebagian ulama berpendapat kawin siri merupakan bentuk prostitusi terselubung. Penyalahgunaan ajaran agama dalam bentuk kawin siri *online* telah menjadi masalah sosial, moral, dan agama yang serius.

Solusi Manusiawi

Demi pembangunan kota yang manusiawi dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran moral lokalisasi sudah semestinya ditutup. Di manapun di Indonesia, tidak hanya di Kalijodo. Menutup lokalisasi memang tidak menjamin hilangnya prostitusi. Tetapi, mempertahankan lokalisasi jauh lebih menimbulkan kerugian sosial, ekonomi dan rusaknya keadaban bangsa. Menjadi pelacur hanya memperkaya mucikari. Bahagia dengan prostitusi hanyalah ilusi. Hilangnya sebutan tidak bermoral tidak membuat praktik prostitusi mulia. Mereka yang menjual diri karena materi tidak bernilai lebih tinggi dibanding materi itu sendiri.

Masalah prostitusi perlu diselesaikan secara manusiawi. *Pertama,* hilangkan sebutan WTS dan PSK. Sebutan WTS tidak membuat pelaku jera dan merasa nista seperti halnya halnya PSK. *Kedua,* menerima mereka sebagai bagian dari kehidupan dan masalah kita. Prostitusi lahir karena masalah kehidupan yang kompleks dan multidimensi. Semua kita bertanggung jawab, bukan hanya Pemerintah. Prostitusi lahir karena kemiskinan, ketidakadilan, ketidakharmonisan keluarga, kekecewaan hidup, ekslusi sosial, kebijakan yang salah, dan sebab-sebab lainnya. *Ketiga,* mendekatkan manusia kepada agama dengan cara yang manusiawi bukan dogma yang hegemonik. *Ketiga,* memperkuat lembaga pernikahan dan keluarga.

Prostitusi bisa dikurangi dan dinihilkan, dengan menghilangkan penyebab dan akarnya masing-masing yang unik. Indonesia tanpa prostitusi adalah mimpi kita. Mari bekerja meraih mimpi.

Nasionalisme Muhammadiyah

8 November 2018, Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk Mr. Kasman Singodimedjo atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mr. Kasman adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat berperan dalam pembentukan negara Indonesia; Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, KNIP (DPR/MPR), BKR (TNI), Jaksa Agung, Politik Modern, dan Perguruan Tinggi Islam. Selain Mr. Kasman, beberapa tokoh Muhammadiyah juga mendapatkan gelar Pahlawan. Diantara mereka adalah KH. Ahmad Dahlan, Nyai Walidah, Kyai Fachruddin, KH. Mas Mansur, Buya Hamka, Ir. Juanda, Ki Bagus Hadikusumo, Ir. Soekarno, dan Fatmawati. Sederet nama-nama Pahlawan Nasional tersebut membuktikan peran kesejarahan dan nasionalisme Muhammadiyah.

Melalui para tokoh dan gerakannya, Muhammadiyah meletakkan dasar-dasar kenegaraan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, Prof. Abdul Kahar Mudzakir, dan Ir. Soekarno adalah tokoh penting yang merumuskan Pancasila seperti yang kita miliki sekarang. Demi persatuan dan kemerdekaan Indonesia, Mr. Kasman Singodimedjo berjasa melobi Ki Ba-

gus Hadikusumo untuk menyetujui dihapuskannya frasa "dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rumusan sila pertama sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beberapa ahli sejarah menyebutkan Ir. Soekarno menyetujui rumusan Dasar Negara versi Piagam Jakarta. Demikian halnya dengan AA. Maramis, tokoh Nasrani yang turut merumuskan Dasar Negara. Seandainya para tokoh Muslim bersikukuh mempertahankan kepentingan kelompok karena jumlahnya yang mayoritas maka mereka bisa tetap mempertahankan Piagam Jakarta. Dengan jiwa dan semangat nasionalisme, para tokoh Muslim menghadiahkan Pancasila untuk Indonesia. Alamsyah pernah menyebut Pancasila sebagai hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia.

Yang tidak kalah besarnya adalah jasa Ir. Juanda. Lewat perjuangan dan diplomasi politik, Ir. Juanda adalah tokoh kunci dibalik pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan pengakuan internasional tersebut Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayah, terutama laut. Juanda adalah kader Muhammadiyah yang memilih kembali menjadi guru setelah meninggalkan gelanggang politik.

Darul Ahdi wa Syahadah

Dalam Muktamar Makassar 2015, Muhammadiyah membuat sebuah keputusan politik yang sangat besar. Muhammadiyah membuktikan nasionalismenya dengan menegaskan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (DAWS).

Penegasan Muhammadiyah tentang DAWS mengundang tiga makna. Pertama, dasar teologis yang mengokohkan penerimaan dan dukungan Muhammadiyah atas Pancasila. Muham-

madiyah berpendapat Negara Pancasila merupakan bentuk ideal bagi Indonesia. Walaupun bukan bersumberkan pada Agama, sila dan nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila adalah Dasar Negara yang Islami.

Kedua, Indonesia adalah Darul Ahdi. Indonesia adalah buah dari kesepakatan luhur (*gentlemen agreement*) para pendiri. Muhammadiyah berkomitmen mendukung kedaulatan NKRI. Muhammadiyah tidak hendak mendirikan negara Islam, melainkan membangun masyarakat Islam.

Ketiga, Indonesia sebagai Dar al-Syahadah. Muhammadiyah ingin berperan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Lebih dari itu, Muhammadiyah ingin menjadikan dirinya sebagai contoh dan model dengan mengembangkan pusat-pusat keunggulan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nasionalisme Muhammadiyah dibuktikan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya.

Dalam bidang hukum, Muhammadiyah menunjukkan sikap nasionalisme melalui tiga bentuk. Pertama, mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Muhammadiyah mendukung Indonesia sebagai negara hukum dan supremasi hukum sebagai pranata sosial untuk menjamin keadilan dan keamanan. Karena itu, Muhammadiyah menghindari dan menentang tindakan main hakim sendiri, para militer, dan berbagai praktik hukum rimba.

Kedua, menegakkan kedaulatan negara melalui *judicial review* perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Muhammadiyah menggugat Undang-undang Migas dan Undang-undang sumberdaya air yang dinilai bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Sayang sekali, Pemerintah belum memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembu-

atan UU baru sebagai pengganti UU Migas dan UU Sumberdaya Air.

Ketiga, Muhammadiyah membuktikan nasionalisme dengan memperkuat integrasi sosial. Muhammadiyah berkomitmen membina persatuan dengan memelihara kemajemukan dan keberagaman budaya dan agama. Organisasi dan amal usaha merupakan *meeting point* dan melting point bagi berbagai suku, etnis, bahkan agama. Siswa Nasrani yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah mendapatkan pendidikan Agama Kristen oleh guru Agama Kristen.

Bagi Muhammadiyah, nasionalisme dibuktikan dengan cinta tanah air, sikap tolong menolong, mencintai sesama, melestarikan alam, dan sebagainya. Taawun untuk negeri yang menjadi tema Milad Muhammadiyah ke 106 adalah cara lain bagaimana Muhammadiyah membuktikan sikap nasionalisme Indonesia.

Umat yang (Tidak) Konfrontatif

Dalam satu semester terakhir ruang publik dipenuhi berbagai isu dan aksi konfrontatif yang melibatkan umat Islam. Isu reinkarnasi komunisme, ancaman terorisme, kesenjangan sosial, dan kebinekaan menghadapkan umat *head to head* dengan berbagai elemen bangsa. Energi dan sumberdaya umat tersedot dalam aksi-aksi reaktif, sporadis, simbolis, dan formalistis dalam menyikapi berbagai isu. Konfrontasi seolah menjadi heroisme baru di bawah panglima aktor konfrontatif.

Kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi. Sebagian pihak menilai kegaduhan adalah hal yang wajar dan masih dalam batas kewajaran. Kegaduhan *(noisy)* adalah bagian dari dinamika berekspresi dan salah satu ciri demokrasi. Di pihak lain ada yang menilai kegaduhan itu sudah menjadi polusi keagamaan yang mengganggu, menjemukan, dan memekakkan telinga. Polusi keagamaan itu sudah mencemarkan umat dan mencemari Islam sebagai agama yang damai, santun, dan berkeadaban.

Miskin Strategi

Kegaduhan dan konfrontasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ekspresi akumulasi dan eskalasi kekecewaan terhadap Pemerintah yang dinilai tidak aspiratif terhadap umat Islam. Ada prasangka Pemerintah lebih berpihak kepada kelompok minoritas yang semakin merajalela dan seakan memiliki kekebalan hukum. Suasana psikologis sebagai pecundang membuat umat mudah meradang.

Kedua, aparatur keamanan yang represif. Adrenalin umat memuncak tatkala aparatur keamanan mengedepankan pendekatan penindakan. Kekerasan dan bentrokan tidak terhindarkan. Di lapangan berlaku hukum aksi sama dengan reaksi: umat akan konfrontatif jika aparatur keamanan represif. Ibarat pepatah Betawi: ente jual gua beli. Paradigma dan pendekatan yang militeristik membuat umat terus terusik.

Ketiga, partai politik, khususnya partai berbasis massa Muslim, kurang aspiratif. Umat harus berjuang sendiri dengan turun ke jalan. Di tengah kecenderungan populisme umat hanya dijadikan vehicle untuk mendulang suara dan simpati partai politik.

Keempat, umat diperalat oleh elit yang tarik menarik jabatan politik. Umat laksana bidak yang dikorbankan di percaturan politik kekuasaan. Para aktor tak ubahnya wayang yang disetir para dalang. Jika hal ini benar, umat hanya akan (kembali) menelan pil pahit: keluar mulut singa, masuk mulut buaya. Umat diadu domba, dipecah belah dengan sesama Muslim dan umat beragama lain.

Terakhir, umat tidak memiliki kekayaan strategi dakwah dan politik. Umat bergerak dengan emosi tinggi tetapi miskin strategi. Akibatnya umat menjadi paranoid. Mereka yang menempuh jalan perjuangan berbeda dan tidak mengikuti arus massa diang-

gap berseberangan, berkhianat, penjilat, dan sebutan pejoratif lainnya.

Strategis dan Substantif

Umat perlu berjuang dengan lebih strategis dan substantif. Berbagai isu datang dan pergi, silih berganti. Tidak semua isu harus ditanggapi. Ada isu yang azasi ada pula yang alternasi. Diperlukan kecerdasan dan kearifan melihat setiap persoalan dengan perspektif luas dan sikap yang luwes. Umat bergerak di jalan lempang dan lapang bukan ditarik ke lorong gang.

Konfrontasi bukan tidak berarti. Aksi bisa membuat “lawan” tidak bernyali. Ideologi dan panji-panji harus dibela, jika perlu sampai mati. Tetapi, umat harus semakin piawai membuat kalkulasi, menimbang maslahat dan madlarat. Islam mengajarkan agar umat berbuat yang manfaat dan meninggalkan yang mafsadat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan alasan khamr diharamkan karena dosanya lebih besar dari faedahnya.

Nampaknya, dakwah megaphone dengan retorika lantang perlu ditinjau ulang. Selain menimbulkan kegaduhan bisa juga pertanda “air beriak tanda tak dalam”. Masyarakat merindukan dakwah yang teduh, tidak gaduh. Dalan benak mereka mengemuka pertanyaan bagaimana para ustadz yang selama ini identik dengan dakwah sufistik, bahkan altruistik, berubah garang.

Diperlukan komunikasi yang lebih intensif dan saling memahami diantara pemimpin umat. Gerakan longitudinal di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan harus tetap diprioritaskan. Stamina umat harus tetap prima untuk lari marathon mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan dengan koordinasi dan kerja sama yang terjalin kuat. Umat tidak boleh setengah hati berjuang di kursi parlemen dan meja birokrasi. Substansia-

lisasi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam konstitusi sangat penting untuk memastikan Indonesia tidak menyimpang dari tuntutan Ilahi. Umat mendambakan tampilnya birokrat yang merakyat, bersih dari korupsi, dan berbudi mulia.

Umat Islam adalah komponen terbesar bangsa Indonesia. Wajah umat, wajah bangsa.

Nalar NII dalam NKRI

Sesuai dengan teks-teks kitab klasik *ahlus-sunnah wal jamaah*, Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam. Alasannya karena Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, kepala negara beragama Islam, dan syariat Islam terlaksana dengan baik, kecuali beberapa aspek hukum pidana. Karena itulah Front Pembela Islam (FPI) mendukung NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian pernyataan Habib Rizieq di hadapan jurnalis Amerika Serikat di Jakarta (11/5).

Sebagai *outsider*, pernyataan Habib Rizieq cukup mengejutkan. Tapi, sya ber-*husnudzan* Habib Rizieq tidak berbohong atau basa-basi. Semoga saja pernyataan tersebut merupakan *qaul jadid* (pendapat baru) FPI yang "nasionalis". Dengan tegas FPI menentang gagasan dan perjuangan NII yang dikembangkan Abu Bakar Baasyir dan Panji Gumilang. Jika FPI (saja) menentang, mengapa gerakan NII dapat tetap bertahan bahkan mendapat dukungan luas?

Tiga Nalar NII

Menurut hemat saya, ada tiga logika yang membuat kalangan Muslim terutama kaum muda, *kepincut*, tergoda oleh NII. *Pertama*, nalar teologis yang bermuara pada pemahaman tentang

Islam dan hukum Islam. Penganut NII berpendapat bahwa Islam adalah agama yang paripurna, sempurna dan meliputi seluruh bidang kehidupan. Berdasarkan pemahaman Al-Qur'an QS Al-Maidah: 3, Penganut NII berkeyakinan bahwa kesempurnaan Islam tidak hanya pada aspek isi, substansi dan nilai, tetapi juga pada format. Islam adalah integritas yang menyangkut semua bidang (agama), *dunya* (kehidupan umum) dan *daulah* (pemerintahan, negara).

Muslim berkewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam semua bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an dan dicontohkan Nabi Muhammad. Karena itu, barang siapa yang menetapkan hukum selain dari Allah dan Rasulullah, mereka adalah orang-orang kafir (Al-Maidah: 44), zalim (Al-Maidah: 45) dan fasik (Al: Maidah: 47). Berdasarkan nalar ini, tidak ada kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, nalar politis-historis. Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Kemerdekaan Indonesia diraih berkat perjuangan umat Islam melawan penjajahan Belanda. Bagi pengikut NII, Identik dengan Barat yang sekuler, kafir, Kristen, dan musuh Islam. Sebagian terbesar pahlawan nasional dan kemerdekaan yang gugur di medan laga adalah tokoh-tokoh Muslim. NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah pengkhianatan terhadap perjuangan mujahidin dan *syuhada* Muslim. Umat Islam berkewajiban untuk angkat senjata, melanjutkan peperangan untuk mendirikan negara Islam.

Ketiga, nalar empiris-sosiologis. Setelah lebih dari setengah abad menjadi negara berdaulat, Indonesia gagal menciptakan kemakmuran dan keadilan. Sejak reformasi, Indonesia bahkan

terkesan semakin jauh dari cita-cita ideal mewujudkan negara yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera baik material maupun spiritual. Menurut NII, kondisi dan situasi negara yang karut-marut tiada lain karena bangsa Indonesia telah meninggalkan ajaran Islam. Karena NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah gagal, sudah seharusnya NKRI diganti dengan NII.

Dengan nalar ini, NII bukanlah kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. NII bukanlah kelompok teroris yang hanya bertujuan mengacaukan keamanan negara. Tujuan NII adalah mengganti, menghilangkan dan meniadakan NKRI.

Masa Depan NII

Melihat nalar teologis dan jumlah pengikut, sangat kecil kemungkinan mimpi-mimpi NII terwujud. Nalar teologi NII mudah merasuk di kalangan Muslim awam yang wawasan keIslamannya dangkal. Hampir seluruh organisasi massa Islam menolak gagasan dan perjuangan NII.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sudah menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi final dan ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dua ormas Islam tersebut sudah menutup pintu rapat-rapat untuk melakukan formalisasi dan pendirian negara Islam. yang dicita-citakan muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maknanya, muhammadiyah lebih mengutamakan tatanan kehidupan dan tata laku manusia yang sesuai dengan Islam. Menurut muhammadiyah, Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan Islam.

Sepanjang sejarah Indonesia dan negara-negara lainnya menunjukkan perjuangan mendirikan negara Islam selalu gagal.

Merujuk pada pendapat Olivier Roy dalam *The Failure of Political Islam* (1996), gerakan Islam tidak lagi menjadi faktor geostrategis. Gagasan negara Islam tidak lain dari sebuah fenomena sosial, retorika, dan ilusi yang segera mendapat tantangan keras dari sesama Muslim.

Selain itu, secara intelektual dan historis, gagasan mendirikan negara Islam selalu gagal. Belum ada model yang ideal. Walaupun demikian, Roy mengingatkan bahwa mimpi mendirikan negara Islam akan terus bersemi. Usaha meraih mimpi-mimpi itu senantiasa tumbuh di tengah pemerintahan yang tidak berwibawa, kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang merajalela, serta ketidakadilan hukum.

Pemerintah memang harus segera merespons aspirasi masyarakat yang mulai gerah dan resah dengan gerakan NII. Betul bahwa secara politik, NII bukanlah ancaman serius. Bisa jadi, ancaman NII hanyalah retorika. Tapi, pemerintah tidak bisa mengabaikan tindakan oknum NII yang melakukan penculikan, pemerasan dan perbuatan kriminal lainnya.

Apa pun alasannya, kriminalitas harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang lebih penting lagi, pemerintah harus segera berbenah menata kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang berkeadilan. Bagi mereka yang terbuang, terpinggirkan dan tertindas, janji-janji NII adalah harapan indah meraih hidup yang bermakna.

Sumber: *Sindo, 16 Mei 2011*

Quo Vadis Bhinneka Tunggal Ika?

Dalam kisah *Al-Sirat al-Nabawi* karya Ibn Hisyam dikisahkan bagaimana korespondensi Nabi Muhammad dengan Musailamah. Suatu ketika Musailamah berkirim surat kepada Nabi Muhammad. Di dalam surat itu Musailamah menyampaikan dua hal. *Pertama*, Musailamah mengaku secara terang-terangan bahwa ia adalah seorang rasul dan mengakui bahwa Muhammad juga seorang rasul. *Kedua*, karena bumi Allah sangat luas, Musailamah Menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk dapat berbagi teritori kerasulan.

Membaca surat Musailamah, Nabi Muhammad memberikan dua jawaban yang sangat tegas. *Pertama*, Nabi Muhammad menegaskan hanya dirinya rasul yang *haq*. Musailamah adalah seorang pendusta (*min Muhammad RasulAllah ila Musailamah al-Kadzdzab*). *Kedua*, Nabi Muhammad menegaskan bahwa bumi Allah itu sangat luas, tapi kemenangan hanya diraih kaum yang bertakwa, bukan pendusta.

Secara teologis dan politis Musailamah telah melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad. Tapi sepanjang hayat Nabi Muhammad tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada

Musailamah. Dengan keluhuran akhlak, keterbukaan dan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad menempuh pendekatan dakwah: berdialog dan berdebat dengan integritas moral dan nalar cerdas. Jiwa besarnya tidak membuat sumpek, judes, dan sadistis terhadap mereka yang menentangnya.

Quo Vadis Bhinneka Tunggal Ika?

Kisah korespondensi Nabi Muhammad dengan Musailamah terlihat sangat berbeda dengan peristiwa yang baru-baru ini dialami oleh Jamaah Ahmadiyah di Pandenglang, Banten. Setidaknya dalam masa lima tahun terakhir Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengalami tiga tindak kekerasan. *Pertama*, kekerasan teologis. Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat telah membuat mereka terlempar dari "jalan yang benar". Sebagai lembaga pengawal dan pembina akidah umat Islam, MUI berhak mengeluarkan fatwa apa pun tentang Ahmadiyah atau organisasi lain. Tetapi, sebagaimana termaktub dalam fatwa MUI, siapa pun tidak berhak dan tidak dibenarkan melakukan tindak kekerasan terhadap pemeluk Ahmadiyah.

Kedua, JAI mengalami kekerasan politik dan hukum. JAI harus berhadapan dengan pengadilan atas tuduhan melakukan penistaan agama Islam. Keyakinan JAI yang mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad dijadikan delik aduan oleh sebagian kaum muslim sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, mereka juga harus terbungkuk dengan keputusan menteri agama yang menginstruksikan JAI membubarkan diri atau harus menegaskan dirinya sebagai agama tersendiri, bukan bagian atau aliran dalam Islam.

Ketiga, sebagai akibat dari kekerasan teologis, politik dan hukum JAI di berbagai tempat mengalami kekerasan fisik. Fasilitas ibadah, sosial dan pendidikan serta jiwa mereka menjadi sasaran amuk massa. Demi membela keyakinan mereka harus menjadi pengungsi di negeri sendiri dan dianiaya oleh sahabat-sahabat seagama, sebangsa, dan se-Tanah Air.

Demi membela hak dan martabatnya, tiga orang JAI harus meregang nyawa.

Artikel ini tidak akan memasuki wilayah tologis apakah JAI adalah aliran sesat, kafir, musyrik, atau lainnya. Secara teologis penulis memiliki keyakinan yang berbeda dengan JAI. Bahkan sebagai anggota Muhammadiyah, penulis setuju dengan pendapat Persyarikatan yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Barangsiapa meyakini adanya nabi dan rasul sete-

lah Muhammad, mereka adalah kafir. Muhammadiyah melarang anggotanya memiliki rangkap keanggotaan dengan Ahmadiyah. Tetapi, sebagaimana termaktub di dalam catatan sejarah, para tokoh dan anggota organisasi yang berbeda "akidah" tersebut tetap terbina dengan baik. Ekspresi kekerasan yang statistiknya cenderung meningkat bisa jadi merupakan indikator betapa bangunan kebangsaan kita tidak cukup solid. Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa belum tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Kebinekaan Indonesia tidak hanya terbatas pada etnisitas, bahasa, dan budaya tetapi juga agama. Indonesia adalah negara yang menyimpan kekayaan religius berupa pluralitas agama dunia dan agama lokal yang terbesar di dunia. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, agama-agama tersebut harus mendapatkan tempat, penghormatan dan pelayan yang terbaik oleh negara dan masyarakat. secara kon-

stitusional, JAI atau pemeluk agama lain memiliki hak hidup dan perlindungan hukum.

Dalam situasi demikian, tidak ada salahnya jika bangsa Indonesia, terutama para pemimpin negara, melakukan evaluasi terhadap kehidupan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Nampaknya Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi slogan elitis dan seremonial yang tidak membumi.

Budaya Kewargaan

Sudah menjadi "tradisi", setelah terjadi aksi kekerasan selalu saja ada "ritual" saling tuding dan menyalahkan. "Tradisi" lainnya adalah agar pejabat tertentu mengundurkan diri dan peraturan atau undang-undang tertentu diubah. Muncul desakan kuat agar pemerintah mengubah atau mencabut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pedoman bagi pemerintah daerah terkait pendirian tempat ibadah. Terdapat pula desakan agar pemerintah segera menetapkan undang-undang tentang kerukunan beragama. Tanpa pretensi negatif, perubahan atas berbagai produk perundang-undangan terkait dengan kehidupan beragama tidak akan cukup efektif untuk membangun kehidupan beragama yang aman dan damai. Masalah-masalah yang sekarang ini mengemuka bukan disebabkan oleh isi peraturannya, tetapi pelaksanaan: sikap dan perilaku.

Karena itu, yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana membangun budaya kewargaan (*civic culture*). Banyak budaya dan nilai-nilai kewargaan Indonesia yang luruh dilumat globalisasi, pragmatisme, dan primordialisme. Dalam konteks budaya Jawa, tradisi dan nilai gotong-royong, *tepa-selira*, *rukun agawe santosa*, *congkrah agawe bubrah* dan sebgainya telah lapuk ditelan waktu. Demikian halnya dengan budaya Me-

layu, Batak dan lainnya. Selama ini, nilai-nilai budaya kewargaan tersebut masih tertulis dengan baik dalam buku-buku pelajaran. Masalahnya, nilai-nilai tersebut tidak membumi karena miskinnya keteladanan.

Membangun budaya kewargaan dapat dikembangkan dengan memadukan pendidikan formal, keluarga, dan praktik penyelenggaraan negara ke arah terbentuknya karakter bangsa yang demokratis. Pendidikan kewargaan diarahkan ke arah pembentukan kepribadian yang terbuka, toleran, dan akomodatif. Karakter demokratis ditunjukkan oleh sikap berani berbeda, terbuka terhadap perbedaan, dan menerima perbedaan sebagai konsekuensi dari kemajemukan dan perbedaan pilihan. Nilai-nilai dasar demokrasi adalah adalah kesamaan antar manusia. Demokrasi tidak dapat dikuantifikasi berdasarkan mayoritas-minoritas atau menang dan kalah. Kuantifikasi bisa menimbulkan sikap arogan dari kelompok mayoritas. Budaya kewargaan meniscayakan sikap rendah hati di mana yang menang tidak "menang-menangan"; mau menang sendiri. Demokrasi meniscayakan akomodasi, yaitu tiap pilihan dan aspirasi, meskipun hanya terdiri atas beberapa gelintir manusia, tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan.

Karena itu, dalam bingkai negara Bhinneka Tunggal Ika, penyelesaian masalah Ahmadiyah dan masalah-masalah kekerasan lain tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legalistik-teologis, atau yuridis-materialistik. Hal yang sangat diperlukan adalah pendekatan kemanusiaan. Jika pada akhirnya pemerintah membuat perundang-undangan terkait kerukunan beragama, janganlah dilupakan usaha-usaha membangun budaya kewargaan untuk membentuk manusia yang berkepribadian ksatria dan berbudaya demokratis. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal ika

tidak hanya tercengkeram di kaki Garuda, tetapi menubuh dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sumber: *Sindo, 10 Februari 2011*

3

TOLERANSI DALAM DUNIA GLOBAL

Indonesia dan Perdamaian Afghanistan

Afghanistan adalah negara gagal. Perang dan konflik yang berkecamuk selama 40 tahun lebih membuat negara itu remuk. Kebodohan dan kemiskinan meraja lela. Angka literasi sangat rendah. 69 persen penduduk dewasa buta aksara. Di kalangan perempuan, hanya 17 persen yang melek huruf. Indeks pembangunan manusia (IDP) di peringkat 174 dari 178 negara, di atas Pantai Gading, Mali, Sira Lion, dan Nigeria. Menurut laporan *World Health Report,* tingkat kebahagiaan di peringkat 145 di bawah India (133), Bangladesh (115), dan Pakistan (75). Kualitas kesehatan dan lingkungan yang buruk membuat harapan hidup menurun dari 44,5 (2003) menjadi 43,1 (2005). Perdamaian terasa semakin jauh. Korban jiwa terus berguguran. Belum ada tanda konflik mereda.

Sebagai bangsa yang damai dan mencintai perdamaian sangat bisa dipahami apabila Pemerintah Indonesia mengambil prakarsa perdamaian di Afghanistan. Atas dasar kemanusiaan, politik, dan keagamaan langkah Pemerintah Indonesia wajar mendapatkan apresiasi.

Konflik Politik dan Etnik

Penyulut utama konflik di Afghanistan bukanlah agama. Komposisi agama di Afghanistan sangat monolitik. Secara demografi, 99,7 persen dari sekitar 35,3 juta penduduk Afghanistan adalah Muslim; 90 persen Sunni yang mayoritas bermadzhab Hanafi. Sisanya, sepuluh persen, menganut Syiah. Selain Muslim terdapat minoritas Kristen, Sikh, Hindu, Zoroaster, Bahai, dan Yahudi. Dalam khazanah Islam, Hanafi adalah madzhab rasional yang mengedepankan logika dalam beragama. Tetapi, di Afghanistan, kehidupan keagamaan didominasi kelompok Taliban yang ultra konservatif.

Masalah akut di Afghanistan adalah tribalisme. Konflik berkepanjangan terjadi akibat perebutan kekuasaan antar etnik. Secara keseluruhan terdapat 14 etnis. Mayoritas berasal dari suku Pastun (42%), disusul Tajik (27%), Usbek (9%), Hazara (8%), Aimaq (4%), Turk (3%), Balochi (2%), dan suku-suku lainnya (5%). Afghanistan, secara bahasa, berarti tanah orang Afghan. Nama lainnya adalah Pastun. Konflik merebak, ketika suku Pastun (Afghan) menyerang suku lain terutama Hazara, Usbek, dan Tajik. Sebagian besar kelompok Taliban berasal dari suku Pastun.

Masalah lainnya adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 35 persen rakyat Afghan hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran sangat tinggi. Sebagian besar rakyat miskin bergabung dengan Taliban. Kelompok Taliban adalah pembela kaum alit. Mereka adalah pahlawan yang gagah dan gigih melawan Pemerintah yang dianggap antek asing, terutama Barat (Amerika Serikat). Taliban menggunakan jargon agama. Barat dianggap kafir. Jargon ini efektif untuk mengobarkan perlawanan kaum "mujahidin" mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Bagi Taliban, melawan Pemerintah tidak ubahnya perang melawan kafir.

Masalah semakin kompleks ketika kepentingan asing masuk ke Afghanistan. Negara-negara tetangga, khususnya Pakistan, memiliki interes tinggi terhadap Afghanistan. Pakistan berkepentingan atas ekonomi, politik, dan keamanan. Taliban adalah kelompok penting yang berpengaruh terhadap kepentingan dan masa depan Pakistan di Afghanistan. Keterlibatan Pakistan dalam perdamaian di Afghanistan mutlak diperlukan.

Diplomasi Budaya

Secara politik, Pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan ke berbagai negara dan faksi yang bertikai. Indonesia bisa berkomunikasi dengan Pakistan, Iran, India, dan negara lainnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut sangat baik. Dalam konteks Afghanistan, Indonesia lebih dipercaya di bandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Indonesia tidak memiliki kepentingan politik langsung. Walaupun demikian, keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Afghanistan tetap strategis. Keberhasilan penyelesaian masalah Afghanistan dapat memperkuat dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat madani. Patut diapresiasi langkah Pemerintah mengajak MUI, Muhammadiyah, NU, dan Ormas Islam lainnya. Secara keagamaan, hubungan emosional bangsa Indonesia dengan Afghanistan sangat kuat. Gagasan pembaharuan Jamaluddin al-Afghani banyak mempengaruhi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Solidaritas Muslim Indonesia bagi perjuangan Afghanistan melawan Uni Soviet memiliki makna kuat. Meskipun, pada akhirnya, Indonesia mendapat "limbah" dengan sepak terjang alumni mujahidin yang terkait dengan terorisme.

Indonesia memiliki modal relijius untuk berbicara dengan bangsa Afghanistan. Interaksi masyarakat madani Indonesia dengan berbagai organisasi Afghanistan berlangsung intens. Di Afghanistan sudah berdiri organisasi NU yang aktif. Pemerintah dapat meningkatkan intensitas pertukaran dan kunjungan ulama, pemuda, dan perempuan Indonesia-Afghanistan. Dalam beberapa kali kunjungan, ulama Afghanistan sangat terkesan dengan Indonesia. Ini merupakan modal sosial yang penting. Muhammadiyah siap memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa Afghanistan. Pengalaman dengan mahasiswa Thailand Selatan, pendidikan memiliki pengaruh kuat dalam membangun jejaring kelompok moderat.

Dalam jangka panjang, diplomasi budaya ini akan berdampak luas. Pengalaman kerukunan beragama di Indonesia mampu

Mengubah *mindset* generasi muda. Melalui kunjungan dan pendidikan di Indonesia, generasi muda Afghanistan dapat melihat langsung bagaimana harmoni dan pembauran antar suku berlangsung alamiah. Perbedaan suku adalah kekuatan yang mempersatukan Indonesia. Berkomunikasi dengan Taliban untuk berunding penting. Dalam waktu dekat itu bisa menjadi salah solusi.

Yang diperlukan dalam perdamaian di Afghanistan adalah bagaimana semua faksi bersedia berbagi kekuasaan. Perlu ada akomodasi antar suku. Pengalaman di Kenya, Lebanon, dan beberapa negara dapat menjadi model. Tanpa *sharing power* mustahil tercipta perdamaian yang lestari. Kesenjangan ekonomi mendesak diatasi. Peningkatan kesejahteraan adalah formula ampuh melemahkan radikalisme. Dan, yang lebih penting, Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mampu meyakinkan bangsa Afghanistan bahwa masa depan dan perdamaian Afghanistan berada di tangan mereka sendiri. Afghanistan memiliki se-

jarah sebagai bangsa besar. Dengan diplomasi budaya, Indonesia bisa membantu mereka meraih kembali kejayaan sejarah itu dan menjadi mitra dalam membangun perdamaian dunia.

Indonesia & Kemerdekaan Palestina

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berlangsung di Jakarta awal pekan bulan Maret 2016.

KTT dengan agenda utama masalah negara Palestina dan Al-Quds al-Syarif (Yerusalem) memiliki makna strategis. Pertama, bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyelenggaraan KTT ini merupakan kepercayaan bangsa Palestina kepada Indonesia. Selain menunjukkan kepercayaan bangsa Palestina kepada Indonesia, KTT ini merupakan langkah awal untuk memenuhi janji kampanye Presiden Jokowi. Kedua, dalam konteks perdamaian global, penyelesaian masalah Palestina akan berpengaruh terhadap perdamaian kawasan Timur Tengah dan internasional.

Masalah Palestina yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad belum menunjukkan titik terang. KTT ini diharapkan menjadi langkah baru dan membuka jalan perdamaian yang semakin jelas. Harapan dunia Islam tertutup di pundak Indonesia.

Tiga Modal Politik

Terkait dengan masalah Palestina, Indonesia memiliki tiga modal politik yang sangat menentukan. Pertama, Indonesia mendapatkan kepercayaan politik yang sangat besar dari bangsa Palestina. Atas permintaan Palestina KTT OKI yang semula direncanakan diselenggarakan di Maroko dipindahkan ke Jakarta. Indonesia memiliki hubungan politik, kesejarahan, keagamaan, dan emosional dengan bangsa Palestina. Karena faktor Palestina Indonesia sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Solidaritas bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina juga sangat kuat. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk bangsa Palestina teruskan mengalir, bahkan dalam beberapa hal lebih tinggi dibandingkan dengan bantuan bencana di dalam negeri. Bangsa Indonesia membentuk berbagai organisasi solidaritas seperti Indonesia-Palestine Friendship Initiative di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, Solidaritas Indonesia untuk Palestina, dsb.

Kedekatan antara bangsa Indonesia dengan Palestina membuat Indonesia diterima oleh dua faksi Palestina yang saling berseteru, yaitu Fatah dan Hamas. Penerimaan ini merupakan salah satu modal bagi Indonesia untuk menjembatani bahkan menyelesaikan konflik internal negara Palestina. Kedua, Indonesia diterima oleh Iran dan Arab Saudi.

Sikap Indonesia yang terbuka terhadap penganut Syiah adalah faktor penting yang membuat Indonesia dekat dengan Iran. Dengan Arab Saudi Indonesia memiliki kedekatan historis dan teologis. Persahabatan bangsa Indonesia dengan Arab tidak diragukan lagi. Netralitas Indonesia di mata Iran dan Saudi bisa menjadi kunci yang memungkinkan Indonesia mempengaruhi negara-negara anggota OKI yang lainnya.

Memang, dalam konteks politik Indonesia harus bernegosiasi dengan negara lain terutama karena posisi Saudi sebagai ketua OKI. Ketiga, Indonesia memiliki kedekatan politik dengan Amerika Serikat. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Obama pada saat berpidato di Mesir di awal kepemimpinannya, Amerika Serikat adalah sahabat setia Israel. Beberapa kali resolusi PBB yang merugikan Israel batal karena veto Amerika Serikat.

Ada alasan kuat bagi Amerika Serikat untuk mendengar, bahkan mungkin saja mendukung sikap dan posisi Indonesia. Perpanjangan kontrak Freeport, demokrasi, dan pemberantasan terorisme adalah sebagian alasan mengapa Amerika Serikat berada di belakang Indonesia. Jalan Keluar Masalahnya justru ada di pihak Indonesia sendiri. Pertama, bagaimana sikap Indonesia terhadap negara Palestina.

Ada dua opsi negara Palestina. Pertama, opsi two states solution yang digagas Amerika Serikat era Presiden Bill Clinton. Pilihan ini berarti mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Israel dan Palestina. Kedua negara berbagi wilayah dan peran dalam pengelolaan Yerusalem. Israel di bawah Netanyahu dan Hamas jelas-jelas menolak opsi two states solution. Pertanyaannya, mampukah Indonesia meyakinkan Hamas dan pada saat yang sama meminta Amerika Serikat membujuk Netanyahu untuk menerima opsi tersebut? Rusia sudah secara terbuka mendukung negara Palestina.

Tapi apa bentuk negara Palestina versi Rusia masih belum jelas. Kedua, jika Indonesia mengakui kedaulatan Israel sebagai konsekuensi opsi *two states solution*, apakah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Di dalam negeri sudah pasti akan ada penolakan. Kelompok garis keras di Indo-

nesia akan berdiri tegak menghadang sikap Pemerintah Presiden Jokowi.

Niat baik menyelesaikan masalah Palestina tidak perlu harus dibayar mahal dengan kontroversi di dalam rumah tangga sendiri. Ketiga, jika Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel, jelas Indonesia tidak bisa menjadi negosiator dan mediator Israel- Palestina. Lalu pada tingkat apa Indonesia akan membangun relasi dengan Israel? Model relasi Indonesia dengan Taiwan mungkin bisa menjadi pilihan.

Dengan kebijakan satu China (One China Policy) Indonesia hanya membuka hubungan setingkat perwakilan dagang. Ini adalah tingkat hubungan Indonesia- Israel yang paling aman dan memungkinkan. Harapan kita semoga KTT Luar Biasa OKI sukses. Damailah Palestina. Damailah dunia.

Sumber: *Sindo, 7 Maret 2016*

Menangani ISIS dengan Humanis

Setelah Usamah bin Laden, nama al-Qaidah sebagai kelompok teroris tidak pernah disebut-sebut lagi. Di Indonesia, Jamaah Islamiah yang seringkali dikaitkan dengan jaringan al-Qaidah juga sudah dianggap jinak. Kelompok ini terpecah belah. Abu Bakar Baasyir yang belakangan dipecat oleh mantan anak buahnya masih meringkuk di penjara Nusa Kambangan. Beberapa mantan tangan kanan Abu Bakar Baasyir bahkan menjadi kolaborator Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sekarang ini kelompok yang dianggap paling berbahaya adalah *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang kemudian berganti nama menjadi *Islamic State (IS)*. Dengan nama baru tersebut wilayah dan tujuan gerakan mereka lebih luas, tidak terbatas pada kawasan Irak dan Syiria.

Di Indonesia dikabarkan sudah banyak anggota masyarakat yang bergabung dengan IS. Sebagian mereka bahkan sudah bergabung dengan kombatan di Syiria. Di dalam negeri, serangkaian aksi kekerasan dikaitkan dengan IS. Banyak yang mulai khawatir dengan perkembangan, ancaman dan sepak terjang IS yang dianggap sebagai sumber ancaman keamanan nomor *wahid*.

Semua pihak sepakat bahwa kelompok yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara harus ditumpas. Tetapi, bagaimana cara menumpas gerakan-gerakan radikal seperti IS agar tidak kontra produktif dan melahirkan generasi baru masih menjadi polemik dan kontroversial.

BNPT mewacanakan dua langkah pemberantasan dan pencegahan. *Pertama*, memblokir *website* yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme. *Kedua*, merevisi beberapa undang-undang, antara lain UU no. 15/2003 tentang Terorisme dan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .

Alih-alih mendapatkan acungan jempol dan dukungan, berbagai pihak justru menilai langkah yang dilakukan BNPT kontraproduktif, inskonstitusional dan berpotensi melanggar hak azasi manusia. BNPT terkesan gugup dan gagap menangani masalah ISIS.

State of Mind

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf kalla menegaskan tiga hal penting terkait IS. *Pertama*, masalah IS sejatinya merupakan persoalan alam pikir atau *state of mind*. Karena itu diperlukan pemahaman terhadap substansi pemikiran tersebut. *Kedua*, ibarat virus, IS dapat masuk ke alam pikiran masyarakat apabila negara lemah. Ibarat tubuh, negara yang lemah akan mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh virus. *Ketiga*, karena merupakan pemikiran, maka jalan keluar dalam mengatasi masalah IS haruslah dengan pemikiran pula *(counter opinion).*

Mengapa paham IS mudah masuk dan berkembang di Indonesia? Ada lima faktor yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pertama, faktor politik. Sistem negara Pancasila yang

belum mampu membawa bangsa Indonesia kepada kesejahteraan, keamanan dan keadilan menimbulkan kekecewaan politik dan keraguan terhadap sistem politik dan hukum nasional. *Kedua*, faktor teologis. Kekecewaan dan keraguan terhadap sistem Negara Pancasila mendorong sebagian masyarakat mencari model ideal sistem politik dan ketatanegaraan. Mereka yang terbuai romantisme sejarah berusaha memproklamirkan sistem Khilafah dan mendirikan Negara Islam. *Ketiga*, faktor ekonomi. Kesulitan hidup yang membelit akan mendorong seseorang mencari jalan keluar pragmatis demi memperbaiki harkat hidup. *Keempat*, faktor globalisasi informasi di mana seseorang dapat mengakses informasi dari berbagai sumber secara terbuka, tanpa sensor, dan mentor. Mereka yang awam Agama akan mudah terpengaruh. *Kelima*, faktor solidaritas. Penindasan yang dialami oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah membangkitkan semangat jihad untuk menolong sesama. Dalam beberapa hal, cara-cara kekerasan dalam penindakan para "teroris" yang terpublikasi luas dapat menimbulkan simpati dan dendam kepada aparatur keamanan.

Pendekatan Humanis

Karena akar persoalannya terletak pada *state of mind*, maka solusi yang paling mungkin adalah dengan pendekatan *soft power*. Pendekatan *soft-power* perlu diutamakan dan dilaksanakan melalui beberapa langkah. *Pertama*, konter opini melalui media massa dan publikasi yang massif. Pemerintah memiliki sumberdaya dan sumberdana yang kuat yang memungkinkan untuk membuat *website* dan menerbitkan buku-buku populer. Selain elegan, cara demikian juga dapat mendorong dan menumbuhkan kreativitas yang sehat dan budaya yang produktif.

Kedua, bekerja sama dengan Ormas Islam *mainstream* yang moderat sebagai *vocal point*. Ormas Islam ini juga dapat berperan sebagai *religious broker* sebagai mediator dan agen dialog dengan kelompok radikal. Ketiga, membentuk *peer group* dengan memberdayakan generasi muda untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme. Pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga adalah kelompok strategis yang dapat menjadi pionir dalam membangun tata kehidupan yang santun dan anti kekerasan.

BNPT dan pemerintah perlu banyak mendengar suara-suara tulus para pemimpin Agama. Tidak ada salahnya mengevaluasi pendekatan *hard-power* yang mengedepankan keperkasaan serdadu dan kecanggihan senjata. Sepertinya masyarakat tidak bertambah tenang dengan berbagai aksi penyerbuan yang terkesan *over-acting*. Cara-cara demonstratif yang militeristik seperti yang dilakukan selama ini—dalam level tertentu—justru membuat masyarakat tegang . Revisi undang-undang untuk menghabisi IS secara konstitusional nampaknya hanya akan menghabiskan waktu. Cara-cara *pre-emptive* dengan melarang IS juga potensial memecah belah umat dan mengadu domba masyarakat. Larangan tidak akan membunuh pemikiran, tetapi justru akan memperkuat akar dan menumbuhkan suburkan generasi baru yang lebih radikal.

Pendekatan *soft-power* lainnya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan yang semakin merata, keadilan untuk semua, dan rasa aman bagi semua. Pendekatan *hard-power* memang sudah waktunya diminimalkan, bahkan—jika memungkinkan—dihentikan. Sebagaimana dikatakan Fuller (2010) dalam *A World Without Islam: "Zero tolerance for terrorism" is another slogan that needs to disappear. It is an empty phrase, demagogic and utopian in cha-*

racter, just as "zero tolerance for crime" has no functional meaning in contemporary society."

Mereka yang mencintai Indonesia tidak ada yang mendukung terorisme. Mereka yang peduli pada perdamaian akan mengedepankan cara-cara yang damai dan manusiawi dalam menyelesaikan masalah antarsesama manusia. Pendekatan humanis sepertinya lebih taktis untuk menangani ISIS.[]

Negara (Tidak) Boleh Kalah

Rasa aman terasa semakin mahal. Sepekan terakhir Indonesia gusar oleh Ormas Gafatar. Puluhan orang dilaporkan hilang tak tektu rimbanya. Belum selesai masalah Gafatar, Kamis (14/1) Indonesia gempar oleh teror di jantung ibukota. Sebuah pos polisi dan pusat perbelanjaan di jalan protokol di hantam serangan dan bom bunuh diri.

Model penyerangan ini sangat "klasik". Menyerang obyek vital dan fasilitas yang lekat dengan Barat. Sturbuck adalah sImbol Amerika. Selain pelaku dan aparat keamanan dua warga asing juga menjadi korban. Jumlahnya tidak banyak tetapi pesannya kepada dunia begitu kuat. Misi terorisme berhasil.

Ancaman Bagi Negara

Dilihat dari jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan, serangan di siang bolong itu tidaklah besar. Tetapi pesan, dampak, dan kerusakan sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkannya begitu akbar.

Secara sosial, serangan bom Sarinah membawa pesan bahwa Indonesia yang selama ini disanjung dunia sebagai negeri

dan bangsa yang harmonis ternyata menjadi sarang teroris. Jumlah mereka memang sangat kecil. Tetapi tidak mudah bagi negara untuk melumpuhkannya. Aparatur keamanan berulangkali mengingatkan akan bahaya terorisme tetapi gagal mencegah kejahatan mereka. Penyerangan kantor polis idan pusat perbelanjaan Sarinah adalah penyerangan dan perlawanan kepada negara. Pelaku pemboman menampar muka Indonesia di mata dunia.

Secara ekonomi, bom Sarinah-Thamrin merupakan ancaman usaha Pemerintah mengundang pelancong manca negara berkunjung ke Nusantara. Keamanan dan kenyamanan adalah faktor utama yang mendukung keberhasilan pariwisata. Serangan bom memaksa wisatawan berhitung untuk tidak menyabungnyawa di Indonesia. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kempesnya devisa.

Dampak yang serius adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya aparatur keamanan. Ada sinyal kuat bahwa keadaan negara seakan gawat.

Tidak Boleh Kalah

Beberapa saat setelah aksi terorisme di Sarinah-Thamrin, Presiden Joko Widodo menyatakan negara tidak boleh kalah. Presiden juga meyakinkan agar rakyat tetap tenang.

Pernyataan Presiden Jokowi sangatlah normatif. Sesuai Pembukaan UUD 1945, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks ini, Pemerintah dan aparatur keamanan dinilai sukses jika rakyat dapat tidur nyenyak dan makan enak.

Dalam hitungan jam, aparatur keamanan berhasil mengatasi keadaan. Beberapa pelaku baik yang tertangkap atau buron sudah teridentifikasi.

Walau demikian masalah belum terselesaikan. Kepolisian tetap harus memastikan siapa dalang dan motif pengeboman. Benarkah mereka adalah jaringan gerakan Negara Islam Irak dan Syiria? Seharusnya aparatur keamanan tidak gegabah membuat kesimpulan sebelum investigasi menyeluruh, jujur, dan profesional. "Lagu lama" polisi tersebut mulai menuai kritik yang mengesankan ada pembiaran, rekayasa, atau pengalihan isu. Polisi perlu mengerahkan kemampuan untuk menepis dan mementahkan keraguan. Kita yakin polisi bisa.

Tantangan berikutnya adalah mencegah agar aksi terorisme tidak terulang. Potensinya terbuka. Di tengah himpitan kesulitan hidup, terorisme selalu memberikan harapan dan impian surga. Bagi mereka yang tersia-sia dan terpinggirkan, bunuh diri adalah jalan indah meraih makna hidup. Kemiskinan yang terus bertambah adalah pupuk radikalisme. Memang, radikalisme tidak selalu identik dengan terorisme. Tetapi hubungan keduanya begitu dekat seperti eratnya kaitan antara kemiskinan dengan kefakiran. Nestapa hidup terlihat di mana-mana. Derita semakin kasat mata. Kesenjangan kaya-papa semakin menganga.

Walau ekonomi tidak kunjung membaik, rakyat masih bersabar. Terorisme tidak membuat warga kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Rakyat melihat presidennya tampak bekerja keras dan tulus. Itulah modal politik yang menentukan kemenangan. Jika kepercayaan telah tiada, ketimpangan kian terbuka, kesejahteraan tak kunjung tiba, dan kriminalitas meraja, maka bom berikutnya tinggal hitungan masa. Negara bisa kalah jika keadaan tidak segera berubah.

Narasi Terorisme

Dalam sepekan terakhir beredar video seorang perempuan bercadar dipaksa turun dari angkutan umum. Video tersebut viral di media sosial. Jika video tersebut benar adanya, bukan rekayasa, sungguh kehidupan kebangsaan kita sudah mulai bermasalah.

Narasi Terorisme

Memang tidak ada penjelasan pasti mengapa sang wanita bercadar diperlakukan tidak adil. Dugaan kuat karena dia dianggap teroris. Penjelasan ini mungkin saja spekulatif. Tetapi, dugaan perlakuan tidak adil yang sudah menjurus kekerasan itu terjadi karena persepsi negatif tentang wanita bercadar, mungkin saja benar. Apalagi apabila dikaitkan dengan bagaimana cara Densus 88 menangani terorisme dan bagaimana media mewartakan pelaku terorisme.

Selama ini pemberitaan media massa tentang terorisme selalu menggunakan narasi yang sama. Seperti sebuah skenario atau script sebuah pertunjukan. Seseorang atau sekelompok orang yang disebut teroris digerebek, ditangkap, atau dieksekusi oleh Densus 88 yang bersenjata lengkap. Tempatnya berbeda-beda. Di tempat kejadian perkara (TKP) Densus menemukan bahan dan rakitan bom, atau bom yang sudah siap diledakkan. Densus juga

menemukan buku-buku jihad dan bendera atau atribut organisasi teroris nasional atau internasional. Densus kemudian menjelaskan nama lengkap, jarang sekali dengan inisial, beserta foto atau wajah. Tidak hanya itu, wajah keluarga, biasanya isteri, juga ditampilkan. Dari semua kasus, mayoritas laki-laki berjenggot panjang dan dahi hitam. Yang wanita bercadar dan gamis yang serba hitam.

Narasi dan tayangan terorisme yang terus berulang-ulang bisa mempengaruhi dan membentuk persepsi dan opini publik. Bahkan bisa menjadi public knowledge yang mengarah kepada sikap negatif terhadap sesuatu.

Pertama, penayangan terorisme yang terus berulang bisa menimbulkan global fear atau ketakutan massa. Alih-alih menimbulkan ketenangan, "keberhasilan" Densus menangkap teroris justru menimbulkan opini bahwa negara sedang ancaman dan tidak ada lagi tempat yang aman. Ini sungguh sangat merugikan dari sisi ekonomi, politik, dan sosial.

Kedua, menimbulkan pemahaman yang keliru tentang terorisme. Narasi Polisi membentuk opini bahwa akar dan pelaku terorisme adalah Islam dan Muslim. Dalam realitasnya, terorisme memiliki akar yang sangat berbeda-beda. Akar terorisme adalah ketidak adilan, diskriminasi, dan ekslusi atas keyakinan, identitas, politik, ekonomi, atau kebudayaan. Terorisme tidak hanya dilakukan oleh Muslim atau orang yang beragama, tetapi juga oleh mereka yang tidak beragama. Sebagian melakukan aksi terorisme semata-mata karena membalas dendam atas perlakuan Densus yang represif.

Ketiga, menimbulkan *prejudice* dan *stereotype* terhadap wanita bercadar dan laki-laki berjenggot. *Prejudice* adalah sikap yang cenderung negatif terhadap seseorang atau kelompok tan-

pa dasar informasi yang kuat. *Prejudice* ini bisa menimbulkan *stereotype* atau stigma negatif dan perilaku yang tidak menyenangkan (Reber, 1987). Akibat lanjut dari prejudice dan stereotype dapat berupa rasisme, xenophobia, Islamophobia, dan perilaku negatif lainnya.

Narasi terorisme yang selama ini dilakukan Polisi justru bisa kontra produktif. Friksi antar kelompok mulai terjadi. Yang lebih serius lagi, pemberantasan terorisme yang mengedepankan pendekatan militeristik bisa dimaknai keliru: berperang melawan Islam. Hampir tidak pernah ada narasi non-Muslim sebagai teroris. Publik bisa juga menilai polisi tidak adil. Perlawanan kepada polisi dilakukan sebagai bentuk membalas dendam.

Perubahan Strategi

Terorisme merupakan masalah bersama. Karena itu tidak seharusnya polisi bekerja sendiri. Perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pemberantasan terorisme tidak boleh dilakukan dengan cara-cara teror dan menimbulkan terorisme baru.

Peliputan langsung aksi pemberantasan terorisme oleh media tidak kalah sadisnya dengan film *action*. Karena itu, tidak seharusnya aksi penyerangan baik oleh polisi ataupun teroris terus-menerus ditayangkan. Polisi bisa memberikan informasi terorisme ke media melalui *press conference* dengan data-data yang akurat. Walaupun sudah cukup informasi, Pemerintah Inggris dan Jerman tidak langsung menjelaskan aksi terorisme. Informasi yang simpang siur apalagi salah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan kinerja polisi. Dalam kasus bom Surabaya, polisi sempat menyebut pelaku pergi ke Suriah. Belakangan Polisi meralat, bahwa yang ke Suriah adalah guru pelaku.

Langkah lainnya adalah bermitra dengan masyarakat. Polisi dan intelijen memiliki data mereka yang masuk daftar pencarian orang atau mereka yang terindikasi kuat terpapar radikalisme. Misalnya, beberapa waktu lalu BIN menyebut 39 persen mahasiswa terpapar radikalisme. Seharusnya, Polisi dan BIN bisa berkomunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan ormas tentang data mereka. Berbekal data tersebut pimpinan perguruan tinggi dan Ormas bisa melakukan pembinaan dan mentoring ideologis: politik dan keagamaan. Model kerja sama ini bisa menjadi alternatif mengurangi atau mencegah terorisme.

Pendekatan militeristik termasuk dengan pelibatan TNI tidak akan efektif dan mencegah terorisme. Polisi perlu mengeksplorasi berbagai model dan pendekatan agar pemberantasan terorisme tidak menjadi ritual tahunan. Sesungguhnya masyarakat sudah lelah dan jenuh dengan narasi terorisme. Ada gejala masyarakat mulai apatis dan menilai terorisme sebagai "bisnis" aparatur keamanan. Gejala apatisme, prejudice, dan stereotype tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi memecah belah bangsa. Pemberantasan terorisme harus menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat, bukan ketakutan akibat narasi kekerasan.

Charlie Hebdo dan Kegagalan Multikulturalisme

Pesta kembang api menyambut tahun 2015 belum usai. Eropa yang tengah membeku di musim dingin membara oleh serangan bersenjata di kantor majalah Charlie Hebdo dan toko milik orang Yahudi.

Apa motif penyerangan masih diselidiki pihak berwenang di Prancis. Walaupun di tengah aksinya penyerang Charlie Hebdo meneriakkan takbir, presiden Prancis mengatakan serangan tidak terkait dengan agama (Islam). Benarkah demikian? Mengapa dalam satu dasawarsa terakhir haru biru kerap terjadi di benua biru?

Kegagalan Multikulturalisme

Salah satu sebab haru biru di benua biru adalah kegagalan multikulturalisme. Kasus Charlie Hebdo seakan membenarkan pernyataan Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Dalam satu dasawarsa terakhir, di negara-negara Eropa dan Barat muncul gejala *multi hated society* (Amali, dkk, 2013). *Multi-*

hated society terjadi karena beberapa hal. Pertama, strategi kebijakan kewargaan yang menempatkan kaum minoritas, khususnya imigran, sebagai kelompok masyarakat kelas dua. Mayoritas imigran di Eropa berasal dari negara-negara bekas jajahan yang hijrah ke Eropa sebagai *blue-collar workers*.

Demi "persatuan" bangsa, negara-negara menerapkan kebijakan integrasi dan asimilasi satu arah. Kelompok minoritas harus menyesuaikan diri dengan pandangan hidup, perilaku dan bahasa Eropa (Nielsen, 2004). Kebijakan ini mengancam eksistensi agama, identitas, dan budaya imigran. Fundamentalisme dalam berbagai bentuk dan ekspresi lahir sebagai reaksi atas kebijakan asimilasi satu arah dan perjuangan untuk mempertahankan identitas.

Kedua, *multi-hated society* terjadi karena kesenjangan nilai antar kelompok masyarakat. Dalam konteks Eropa, kesenjangan dapat terjadi antara kelompok agama, etnis, ras, dan budaya. Kasus Majalah Charlie Hebdo (Prancis) dan Jyland-Posten (Denmark) yang dinilai menghina Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati umat beragama menunjukkan kesenjangan nilai-nilai agama dengan sekularisme dan liberalisme.

Karena sama-sama mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai yang dianut, baik pelaku penyerangan maupun redaksi Charlie Hebdo sama-sama merasa berada pada "jalan yang benar". Walaupun lahir dan tumbuh di Eropa, sebagian imigran—masih—berperilaku sebagai orang asing dan eksklusif. Ketiga, *multi hated society* terjadi karena ketegangan antara imigran dengan "orang asli".

Di kalangan orang asli terdapat kepanikan demografis, kecemburuan ekonomi, dan kebencian rasial karena ledakan jumlah, kemajuan ekonomi dan posisi sosial-politik imigran. Seba-

gaimana penelitian Tamas Berecs dan Kristof Domina (2012) negara-negara mengalami masalah keamanan yang disebabkan oleh meningkatnya domestic extremism dalam bentuk Islamophobia, rasisme, antisemitisme, dan xenophobia.

Keempat, *multi-hated society* timbul karena kebijakan pemerintah yang dilatarbelakangi oleh kebencian. Sejak peristiwa pengeboman 11 September, muslim dan umat Islam di negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa mengalami tekanan, diskriminasi dan kriminalisasi. Kebijakan yang diterapkan atas dasar kebencian dirasakan oleh komunitas muslim dalam layanan sosial, permukiman, keterwakilan, keyakinan dan budaya (Amali, dkk., 2014).

Muslim menjadi korban *cultural stereotype,* pesakitan dan kambing hitam atas berbagai permasalahan. Kebijakan yang demikian sangat berpengaruh terhadap psikologi kaum muslim di Eropa yang cenderung berkepribadian konservatif.

Menghidupkan Pembicaraan Global

Redaksi Charlie Hebdo akan menerbitkan majalah lebih awal. Halaman depan memuat kartun Nabi Muhammad. Tiras yang semula 60.000 akan dilipatgandakan menjadi 3 juta, diterbitkan dalam 16 bahasa dan diedarkan di seluruh dunia. Masalah Charlie Hebdo tidak hanya urusan dalam negeri Prancis.

Dimungkinkan terjadi reaksi global yang sulit diperkirakan. Dalam jangka pendek, pemerintah dan perwakilan Prancis, terutama di negara mayoritas muslim, perlu mengambil langkah proaktif dengan membuka dan memfasilitasi pembicaraan dengan masyarakat muslim.

Multidimensi Tragedi Paris

Perancis menangis. Dunia berduka. Serangkaian aksi kekerasan —yang nampaknya dirancang dengan matang—menewaskan ratusan manusia yang tidak berdosa. Pemerintah Perancis masih mendalami pelaku dan motif penyerangan. Walau demikian kelompok militan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) mengaku bertanggung jawab atas pembantaian di enam sudut kota Paris. Sebagaimana dilansir beberapa media nasional dan internasional, motif penyerangan adalah balas dendam atas kebijakan Pemerintah Perancis dalam masalah di Syiria. Benarkah demikian?

ISIS Sebagai *Culprit*

Setelah riwayat al-Qaeda tamat, ISIS menjadi "hantu pencabut nyawa " yang paling ditakuti negara-negara Barat. ISIS menjadi *culprit,* pelaku dan biang semua kejahatan. ISIS mengaku bertanggung jawab atas pemboman pesawat Rusia di Mesir. Setelah Perancis, mereka menebar ancaman akan menyerang Inggris dan negara-negara Barat lainnya.

Ketakutan negara-negara Barat terhadap ISIS sangat bisa dipahami. Pertama, baik ISIS maupun al-Qaidah menjadikan nega-

ra- negara Barat baik warga negara, fasilitas dan jaringan sebagai musuh utama dan sasaran aksi mereka. Akan tetapi sebagaimana video yang dirilis melalui berbagai media, dalam melakukan aksinya ISIS lebih brutal dan sadistis dibandingkan dengan al-Qaidah. Cara ISIS mengeksekusi para korban sungguh mengerikan. Kedua, ISIS mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan. Banyak kalangan muda dari negara-negara Barat yang bergabung dengan ISIS. Mereka tidak hanya berasal dari keturunan Arab tetapi juga keturunan dan warga negara Eropa. Kelompok pendukung ISIS dari keturunan Eropa lebih menyulitkan karena mereka menguasai semua hal tentang Eropa, melek teknologi dan ekonomi yang kuat. Mereka bergabung karena alasan ideologis dan politis. Bagi mereka ISIS memiliki tujuan perjuangan yang jelas. ISIS memberikan harapan dan mimpi mewujudkan negara Islam di bawah kepemimpinan khalifah yang tegas dan berani. Mayoritas negara- negara Islam di Timur Tengah adalah kerajaan yang dipimpin para raja. Di mata para pendukung ISIS para raja itu hanyalah antek, kaki tangan dan boneka Barat yang tidak berpihak kepada rakyat dan tidak bersungguh-sungguh menegakkan Syariat Islam. Ketiga, ISIS memiliki sumberdana yang kuat. Hal ini memungkinkan mereka melakukan ekspansi keseluruh penjuru dunia dan merekrut anggota baru dari kalangan muda yang terinspirasi oleh mimpi kepahlawanan. Dari sudut pandangi deologis dan politik bisa dimaklumi jika ISIS menjadi musuh bersama negara-negara Barat danTimur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Iran.

ISIS sendiri memerlukan pembuktian eksistensi. Sebagaimana jamaknya, aksi kekerasan adalah bentuk perlawanan atas represi yang dialami suatu kelompok. Dimensi politik ini penting dilihat sebagai hukum kausalitas. Kelahiran ISIS dibidani nega-

ra- negara Barat sebagai "predator" untuk menumbangkan rejim diktator. Kini ketika tumbuh menjadi raksasa, negara- negara Barat ingin membunuhnya. Bagi negara-negara Barat ISIS telah menjadi "anak durhaka". Meminjam hukum evolusi, ISIS melawan untuk mempertahankan diri. Yang berlaku adalah hukum kausalitas: siapa menebar angin menuai badai.

Bukan Representasi Islam

ISIS bukanlah representasi Islam. Walaupun menyebut dirinya sebagai khalifah dan mengklaim sebagai keturunan Quraisy, al-Baghdadi tidak bisa disebut sebagai khalifah. Dalam khazanah Islam, seorang khalifah adalah mereka yang memiliki kualifikasi iman, ilmu, akhlak, dan kepemimpinan yang unggul. Khalifah dipilih oleh umat, bukan mengangkat dirinya sendiri. Yang sangat fundamental, khalifah senantiasa berpijak dan mengambil kebijakan sesuai ajaran Islam. Karena itu, menurut Imam Syafii, tidak ada lagi kekhalifahan Islam setelah *khulafau al-rasyidun:* Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Yang adalah para raja yang bergelar khalifah, sultan, dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Sebagian berpendapat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sebagian lainnya mengatakan bukan khalifah.

Islam adalah agama damai yang sangat menekankan pentingnya perdamaian. Diharamkan oleh Islam membunuh manusia yang tidakberdosa, bahkan dalam peperangan sekalipun. Karena itu, ISIS baik sebagai gerakan, organisasi, dan sepakterjangnya bukanlah representasi Islam.

Walaupun demikian, sebagai akibat tindakan ISIS umat Islam akan menjadi korban. Label Islam sebagai teroris semakin melekat. Islamophobia akan meningkat. Semua Muslim terkena

getahnya. Dimensi keagamaan ini membuat gerak langkah Muslim semakin sulit.

Dalam konteks dalam negeri, Pemerintah Perancis semakin memiliki alasan untuk menekan kaum Muslim. Perancis memiliki masalah domestik yang kompleks menyangkut kewarganegaraan, kewargaan, dan budaya. Islam telah menjadi agama terbesarkedua di Perancis. Komunitas Muslim di Perancis adalah yang terbesar di Eropa. Secara politik dan keagamaan, Perancis mendapatkan "berkah" dari "tragediJumat" di Paris.

Dalam konteks Eropa, kelompok anti imigrasi mendapatkan momentum untuk menolak imigran Timur Tengah. Meskipun bertentangan dengan hukum internasional, negara- negara Eropa semakin yakin untuk mengusir para pengungsi memasuki negara mereka.

Yang menanggung akibat dari tragediJ umat di Paris adalah masyarakat dunia pencinta perdamaian. Gagasan multikulturalisme yang selama inid iperjuangkan mundur kebelakang. Masyakarat akan hidup dalam ketakutan dan kecurigaan global. Hidup semakint idak nyaman.

Bagi kita bangsa Indonesia tragediJ umat di Paris adalah pelajaran tentang arti pentingnya saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Tragedi Paris tidak ada kaitan permusuhan antar agama. ISIS adalah gerakan politik yang semua langkahnya bertujuan politik kekuasaan mereka sendiri. Islam dan Muslim tidak mendapatkan berkah perjuangan mereka tetapij usteru kesulitan dan rusaknya citra. Semoga umat beragama di Indonesia bertindak dan bersikap arif.

Timur Tengah Pasca Abdullah

Setelah bertahta selama satu dasawarsa Raja Abdullah meninggal dunia. Selama pemerintahannya, Raja Abdullah berhasil meletakkan dasar-dasar reformasi politik, sosial, keagamaan, dan perdamaian di Arab Saudi dan regional Timur Tengah. Para pemimpin tertinggi negara-negara "sekutu" Arab Saudi seperti Barack Obama (AS), Francois Hollande (Perancis), David Cameron dan Pangeran Charles (Inggris), Erdogan (Turki), Nawaz Sharif (Pakistan) *takziah* langsung dan memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran mereka merupakan pertanda pentingnya peranan Arab Saudi di dunia internasional.

Lima tantangan Salman

Sesuai sistem *bai'at*, Salman bin Abdul Aziz al-Saud menduduki singgasana menggantikan Raja Abdullah. Sistem tersebut diciptakan oleh Raja Abdullah pada tahun 2006 untuk tiga tujuan: menjamin keberlangsungan kepemimpinan kerajaan, menghindari perebutan kekuasaan di antara para putera mahkota, dan menyiapkan pemimpin kerajaan yang kompeten. Arab Saudi per-

nah mengalami masalah suksesi kepemimpinan ketika Raja Faisal dibunuh pada tahun 1975.

Raja Salman berkuasa ketika Arab Saudi berada dalam kondisi yang kuat dan stabil. Walau demikian, Salman mengalami lima tantangan yang tidak ringan. Pertama, masalah "rumah tangga" kerajaan. Hal ini terutama terkait dengan suksesi generasi kedua pasca Salman. Sudah menjadi rahasia umum, terdapat rivalitas di antara para putera mahkota. Jika Salman tidak arif membagi kekuasaan dan memelihara hubungan baik dengan semua ahli waris kerajaan maka suksesi berikutnya belum tentu aman oleh permusuhan dalam selimut.

Kedua, masalah keamanan terutama radikalisme dan terorisme. Dalam dua puluh tahun terakhir, pemerintah Arab Saudi harus bekerja keras melawan berbagai tindak kekerasan. Pada masa pemerintahan Raja Fahd, serangkaian aksi kekerasan terjadi pada Juni 1996, Maret 2001, Mei dan November 2003, April, Mei, Juni dan Desember 2004. Aparat keamanan Arab Saudi beberapa kali berhasil menggagalkan upaya teror. Hanya ada sekali serangan teror pada masa kepemimpinan Raja Abdullah (Februari 2007). Tetapi, negara petro dolar itu tidaklah sepenuhnya aman. Raja Salman harus bekerja lebih kerasa memadamkan bara dalam sekam terutama dari jaringan al-Qaeda yang merupakan "anak kandung" kerajaan Saudi.

Ketiga, masalah kedaulatan terutama separatisme di wilayah selatan. Arab Saudi adalah negara yang sangan sensitif terhadap Syiah. Selain terkait dengan ideologi, juga terkait dengan gerakan politik kaum separatis Syiah di perbatasan Yaman dan wilayah timur yang kaya minyak. Ancaman separatisme lainnya datang dari pada pendukung *Islamic State* pimpinan al-Baghdadi. Sebagai keturunan Quraisy, al-Baghdadi mendeklarasikan dirinya

sebagai khalifah dan merasa diri lebih berhak memimpin negara dibandingkan dengan keluarga Saudi.

Keempat, masalah ekonomi, terutama ancaman pengangguran. Separuh penduduk Arab Saudi adalah kelompok muda di bawah 25 tahun. Masalah ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, kebijakan negara yang cenderung "memanjakan". Generasi muda Saudi dininabobokan dengan fasilitas sehingga miskin kreativitas dan malas. Kedua, aset-aset strategis ekonomi dimonopoli oleh keluarga kerajaan sehingga rakyat tidak memiliki akses luas. Kesenjangan sosial yang semakin menganga bisa mengobarkan semangat melawan Kerajaan.

Kelima, masalah politik dan hak azasi manusia. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling buruk dalam penegakan hak azasi manusia, khususnya hak politik. Tahun 2009, Komisi HAM PBB mengingatkan tingginya represi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Amnesti internasional menyimpulkan pemerintah Arab Saudi tidak bersungguh-sungguh memenuhi komitmennya dalam pemenuhan hak-hak sipil di negaranya. Dunia mencatat reformasi politik yang telah dilakukan Raja Abdullah. Tetapi, bagi para pejuang hak azasi manusia, langkah-langkah tersebut belumlah signifikan. Merujuk Muasher (2014: 29) "*... Saudi Arabia's record on political and cultural diversity, representative government, and women's rights ... does not suggest a moderare, reformist approach.*" Pemerintah Arab Saudi harus mereken dampak Arab Spring terhadap gerakan politik dan hak azasi manusia yang merembet ke negaranya.

Perubahan di Timur Tengah?

Para analis menilai Raja Salman adalah figur relijius yang cenderung konservatif. Dalam bidang ekonomi dia cenderung prag-

matis. Karena itu, pemerintahan Raja Salman nampak akan lebih memperkuat orientasi keagamaan dan memperluas pengaruh Arab Saudi dalam bidang agama. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan ekonomi, Raja Salman nampaknya akan lebih memperkuat pertahanan, mengefektifkan anti-terorisme, dan lebih tegas terhadap separatisme. Pilihannya adalah mempererat kerja sama dengan pemerintahan Yaman yang konservatif untuk menekan gerakan kaum minoritas Syiah. Jika langkah ini dilakukan, maka Arab Saudi akan semakin bersitegang dengan Iran yang selama ini ditengarai mendukung gerakan Syiah.

Konstelasi politik di Timur Tengah akan berubah jika pemerintah Arab Saudi melakukan ekspansi ideologi Wahabisme yang sudah dirintis sejak era 1970an. Tujuan utama langkah ini adalah "merebut kembali" supremasi Arab Saudi sebagai "pemimpin" umat Islam dunia. Arab Saudi adalah inisiator pembentukan Organisasi Konperensi Islam (OKI) dan *Rabitah 'Alam Islami*. Langkah pemerintah Saudi ini tidak akan mudah. Pertama, faktor nasionalisme Arab yang menguat setelah negara-negara Arab merdeka dari kolonialisme. Kedua, faktor kemajuan ekonomi dan politik Turki. Dalam sejarah, Arab pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Pengaruh Arab Saudi mulai digeser Turki terutama setelah OKI berubah menjadi Organisasi Kerja sama Islam *(Organisation of Islamic Cooperation)*, Juni 2011. Ketiga, faktor perubahan kepemimpinan Iran. Sejak Revolusi Islam Iran 1979, Saudi begitu khawatir dengan kebangkitan kaum Syiah di berbagai penjuru dunia. Saudi juga menaruh perhatian serius dengan membaiknya hubungan Iran dengan negara-negara Barat setelah Rouhani memegang tampuk kekuasaan. Benturan Sunni-Syiah di Timur

Tengah dengan segala dampak politik yang menyertainya adalah perkembangan yang sangat berpengaruh terhadap perdamaian.

Tujuan lain dari ekspansi Wahabisme adalah untuk meluruskan kesalahpahaman dan memperbaiki citra Pemerintah Arab Saudi. Pasca pemboman WTC 2001, citra Arab begitu buruk dan terpuruk. 15 dari 19 eksekutor pemegang paspor Arab Saudi. Karena itu, pemerintahan Raja Abdullah merintis dialog lintas iman dengan Vatikan. Pemerintah Saudi juga mendirikan organsasi yang mensponsori dialog antar iman. Bisa jadi Raja Salman akan meninjau ulang kebijakan ini. Citra Arab sebagai "agen" radikalisme dunia belum berubah sepenuhnya. Selain itu, kedekatan dengan Barat justru membangkitkan radikalisme dan sentimen anti Barat di dalam negeri.

Perubahan kepemimpinan di Arab Saudi tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia. Secara keagamaan, bangsa Indonesia memiliki emosional keagamaan dan pendidikan yang kuat. Diperkirakan ada jutaan warga negara Indonesia bermukim di Arab Saudi. Ratusan WNI menunggu eksekusi pidana mati. Berbagai ketegangan keagamaan di dalam negeri, khususnya yang terkait dengan kaum Syiah, ditengarai terjadi karena faktor ekspansi ideologi Saudi. Pemerintahan baru Indonesia perlu mengambil momentum kepemimpinan baru di Arab Saudi untuk memperbarui hubungan dan menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, pendidikan dan keagamaan.[]

Ahlan Wa Sahlan Malik Salman

1 Maret 2017 Raja Salman, kepala negara Arab Saudi akan tiba di Indonesia dalam rangkaian kunjungan di negara-negara Asia antara lain Malaysia, Jepang, Cina, dan Malawi. Kunjungan ini bukan sekadar balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo tahun lalu tetapi merupakan kunjungan bersejarah setelah Raja Faisal yang melawat ke Indonesia pada tahun 1970. Kunjungan ini juga sangat kolosal, karena Sang Raja membawa 10 menteri kabinet dan 1500 rombongan yang terdiri atas para pangeran, keluarga kerajaan, pebisnis, pejabat negara, dan tokoh penting lainnya. Sang Raja seolah sedang berusaha "menaklukkan" Indonesia, tidak sekadar pelesiran menikmati kemolekan pulau dewata.

Makna Strategis

Bagi Indonesia kunjungan Raja Salman memiliki tiga makna strategis. Pertama, secara politik Kerajaan Saudi tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, politik yang stabil, dan kelas menengah yang kuat peranan politik Indonesia dalam percaturan politik global cukup signifikan. Konsistensi Indonesia melaksanakan politik

luar negeri yang bebas-aktif memungkinkan negeri Pancasila ini menjalin persahabatan dengan semua negara Muslim. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran dan Turki yang bersaing dengan Saudi dalam kepemimpinan dunia Islam. Penyelenggaraan pertemuan luar biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Jakarta adalah bukti kekuatan posisi politik Indonesia di negara-negara Muslim. Bahkan dalam penyelesaian politik di Asean seperti Moro (Filipina), Pattani (Thailand), dan Rohingnya (Myanmar), peranan Indonesia sebagai mediator dan juru runding lebih dipercaya dan diterima oleh ketiga negara dibandingkan dengan Saudi dan Malaysia yang dinilai berpihak pada "pemberontak". Peran serta masyarakat madani Indonesia sebagai second track diplomacy turut memperkuat rajutan jaringan kelompok moderat Muslim Asia Tenggara.

Kedua, secara ekonomi Saudi melihat Indonesia memiliki kondisi ekonomi dan pertumbuhan yang baik. Indonesia berpotensi menjadi salah satu raksasa ekonomi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa Saudi melihat peluang besar memasarkan minyak di Indonesia. Sekitar satu dasa warsa Indonesia menjadi pengimpor minyak. Pemerintah Indonesia sudah membuka pintu bagi Saudi untuk membangun dua kilang minyak. Dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia memberikan sumbangan besar mengisi pundi-pundi devisa non minyak Saudi.

Ketiga, secara keagamaan Indonesia memiliki ikatan keagamaan yang kuat dengan Saudi. Pertautan umat Islam Indonesia dengan Saudi terjalin sejak awal perkembangan Islam. Menurut sebagian sejarawan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh. Saat pemerintahan Khalifah Usman bin Affan sejumlah sahabat Rasulullah menginjakkan kaki di daratan Sumatera. Hampir

semua pendiri gerakan Islam seperti K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan K.H. Hasyim Asyari (NU) pernah menuntut ilmu di tanah suci. Jejaring ulama Nusantara dengan Saudi terbangun cukup kuat dari abad ke 16 hingga saat ini. Banyak alumni perguruan tinggi Saudi yang menjadi tokoh intelektual dan politik serta menjadi pendukung dan pendakwah faham Salafi. Walau demikian, pengaruh Salafisme tidaklah cukup kuat. Mayoritas alumni ma'had dan perguruan tinggi Saudi tetap menjadi pengikut Madzhab Syafii, bahkan sebagian mereka sangat vokal dan kritis terhadap faham agama dan kebijakan politik Saudi.

Negosiasi Politik dan Ekonomi

Pemerintah Indonesia hendaknya memanfaatkan momentum kunjungan Raja Salman untuk melakukan negosiasi bisnis dan politik. Pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan Raja Salman dan rakyat Saudi bahwa bangsa Indonesia bukanlah orang "ajam" yang bodoh dan "mamluk", budak yang miskin.

Dalam kaitan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi bisnis dan bargaining politik. Pertama, terkait dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Selama berpuluh tahun masalah TKI menjadi batu kerikil hubungan Indonesia dengan Saudi. Masalah kekerasan fisik dan seksual serta pelanggaran hak azasi manusia seakan tidak tersentuh hukum. Diantara penyebabnya adalah masih adanya sebagian masyarakat Saudi yang memandang para TKI/TKW sebagai budak dengan pemahaman literal ayat-ayat Al-Qur'an dan pengalaman kuktural jahiliyah tentang budak. Kontrak kerja dimaknai sebagai transaksi yang membolehkan mereka mempekerjakan, menggauli, dan memperjualbelikan TKI. Sebab lainnya karena para TKI menempatkan dirinya dalam posisi inferior, sub-

ordinat, dan job seeker yang menggantungkan dirinya kepada para majikan dan agen. Rendahnya pendidikan dan ketrampilan serta lemahnya kemampuan berbahasa, komunikasi dan pemahaman budaya membuat mereka sering dinista. Keadaan menjadi lebih buruk karena Pemerintah tidak terlibat dalam kontrak kerja antara TKI, agen, dan majikan. TKI seperti sekawanan domba yang dilepas di hutan rimba yang dikuasai singa dan serigala.

Sebagai negara yang meratifikasi Deklatasi Hak Azasi Manusia PBB, Konvensi Jeneva, dan anti perbudakan modern Presiden Jokowi perlu menyampaikan sikap Indonesia mengenai nasib warga negaranya dan pembelaan HAM. Masyarakat Saudi sesungguhnya mulai tergantung pada TKI, terutama sejak moratorium pembantu rumah tangga. Karena alasan agama, budaya, dan kinerja TKI memiliki nilai lebih yang tidak tergantikan oleh tenaga kerja dari India, Filipina, dan negara-negara Afrika. Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri dan mengentaskan kemiskinan Pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi masalah TKI dengan hanya mengirimkan tenaga kerja profesional yang memiliki kontrak kerja yang kuat dan penggajian yang wajar.

Kedua, secara politik Indonesia dapat melakukan negosiasi politik dalam penyelesaian berbagai masalah konflik Timur Tengah dan pemberantasan terorisme. Ada kabar yang menyebutkan Pemerintah Saudi berusaha melobi Indonesia untuk bergabung dengan Koalisi negara-negara Muslim Anti-terorisme yang dibentuk dan dipimpin Arab Saudi. Jika dugaan itu benar, maka Pemerintah Indonesia tidak perlu Mengubah sikap politik yang telah diambil selama ini. Sesuai Konstitusi Indonesia mengembangkan politik luar negeri yang bebas-aktif untuk kepentingan nasional. Koalisi tersebut bukan di bawah PBB sehingga Indo-

nesia tidak terikat. Yang lebih penting, sesuai ajaran Al-Qur'an, jika dua kelompok Muslim berperang maka harus ada pihak yang menjadi penengah dan pendamai. Dengan bersikap netral Indonesia bisa diterima berbagai pihak yang berkonflik.

Indonesia dan Arab Saudi sama-sama memiliki masalah terorisme. Berbagai aksi terorisme terjadi di Indonesia dan Saudi. Ada analisis yang menyebutkan bahwa terorisme bertali-temali dengan Wahabisme yang berpusat di Arab Saudi. Pandangan tersebut tentu sangat merugikan citra Saudi. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Wahabisme dengan terorisme. Persepsi bahwa terorisme berakar pada agama dan Wahabi sebagai agen harus dikoreksi. Karena itu Saudi dan Indonesia dapat bekerja sama bagaimana menanggulangi dan memberantas terorisme melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.

Ada pihak-pihak tertentu yang sangat khawatir dengan kunjungan Raja Salman. Secara psikologis kunjungan Raja Saudi bisa memperkuat kelompok Muslim “garis keras” yang merupakan jaringan Salafi di Indonesia. Spekulasi tersebut akan terbantah jika selama kunjungan di Indonesia Raja Salman mengagendakan pertemuan dan mendengar masukan sebanyak mungkin organisasi Islam. Sudah seharusnya Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut dan melayani Raja Salman dengan spirit persahabatan, perdamaian, saling menghormati, dan kerja sama saling menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi, menghormati tamu adalah ciri manusia yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Mari kita sambut tamu negara dengan sebaik-baiknya. Marhaban, ahlan wa sahlan malik Salman.[]

Indonesia Darurat Radikalisme?

Sejak bom bunuh diri di Surabaya, Densus terus memburu kelompok radikal. Seperti mendapatkan mandat baru, langkah Densus terlihat semakin gencar setelah DPR mengesahkan UU Antiterorisme. Densus bahkan mulai masuk ke kampus-kampus.

Publikpun bertanya-tanya. Seberapa besarkah pengaruh dan kekuatan kelompok radikal? Mengapa sasaran selalu organisasi-organisasi Islam? Benarkah kampus telah menjadi sarang kelompok radikal? Apakah Indonesia sudah mengalami darurat radikalisme?

Multidimensi Radikalisme

Apa yang dilakukan Densus bisa membentuk opini bahwa Islam identik dengan radikalisme. Pemberantasan terorisme dan radikalisme bisa dimaknai sebagai perang dan permusuhan terhadap umat Islam. Sungguh sangat disayangkan jika persepsi dan opini tersebut benar adanya.

Radikalisme memiliki akar dan ekspresi yang multidimensi. Pertama, akar teologis. Radikalisme bermula dari pemahaman agama yang sempit dan hitam putih. Misalnya, pemahaman me-

ngenai kebenaran (al-haq). Mereka berpendapat hanya ada satu kebenaran tunggal dan absolut yang berasal dari Tuhan. Selain yang berasal dari Tuhan adalah kebatilan (al-batil). Kelompok radikal tidak hanya menolak tetapi juga memerangi kebatilan sebagai kewajiban agama. Karena itu, kelompok radikal membangkang Pemerintah dan semua produk hukum buatan manusia. Mereka memiliki sistem politik, hukum, dan pemerintahan berdasarkan atas agama. Pemahaman radikal ini terdapat pada berbagai agama. Yang membedakan adalah bentuk, tingkat, dan strategi ekspresinya.

Kedua, radikalisme bisa disebabkan oleh alasan-alasan politik. Radikalisme politik digerakkan oleh idealisme atau aliran politik tertentu. Beberapa negara dalam sejarah politik modern dibangun berdasarkan ideologi politik tertentu. Beberapa diantaranya adalah Republik Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara yang berhaluan komunis. Sejarah politik Indonesia mencatat pemberontakan partai komunis untuk mengganti Pancasila dengan komunisme.

Termasuk dalam radikalisme ideologis adalah faham superioritas kelas. Misalnya superioritas kulit putih atas kulit berwarna. Superioritas kelas melahirkan rasisme dalam berbagai ekspresinya seperti diskriminasi rasial, pembersihan etnis, dan perbudakan manusia.

Ketiga, radikalisme yang dilakukan karena alasan-alasan pragmatis. Radikalisme merupakan ekpresi perlawanan atas ketidak-adilan politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah. Ekspresi yang paling lazim adalah separatisme. Radikalisme pragmatis tumbuh subur di tengah ketimpangan ekonomi, kepincangan politik, dominasi budaya oleh satu kelompok, atau kekecewaan terhadap suatu kebijakan.

Seharusnya Densus dan aparatur keamanan melihat persoalan radikalisme dengan perspektif yang komprehensif dan jernih. Radikalisme memiliki akar dan motif yang berbeda-beda, tidak bisa dan tidak boleh gebyah-uyah (generalisasi) dengan kaca mata kuda.

Pendekatan Semesta Partisipatif

Berulangkali Densus memburu kelompok radikal dengan dalih melindungi masyarakat dari ancaman terorisme dan menegakkan kedaulatan negara dari separatisme. Argumen yang dibangun adalah linearitas radikalisme dengan terorisme dan separatisme. Secara teoritis dan empiris argumen Densus sangat lemah. Bahkan mengandung kontradiksi dalam yang mudah dipatahkan.

Awalnya, radikalisme selalu dikaitkan dengan salafisme, wahabisme, dan al-Qaedah. Belakangan, banyak pelaku terorisme adalah kelompok ahlus sunnah yang terkait dengan ISIS. Tesis awal, terorisme dikaitkan dengan faktor ekonomi, khususnya kemiskinan. Kini qaul qadim (tesis lama) tidak berlaku. Penelitian menunjukkan radikalisme berkembang di kalangan kelas menengah atas yang mapan secara ekonomi dan berpendidikan tinggi. Muncullah qaul jadid (tesis baru) bahwa radikalisme berkembang karena faktor teologi dan ideologi. Radikalisme dan terorisme lebih banyak disebabkan oleh mindset bukan money.

Persoalan ideologi dan keyakinan tidak bisa diselesaikan dengan bedil, tetapi dalil. Demi ideologi seseorang rela mati. Sebagian bahkan berkeyakinan bahwa kematian merupakan perjuangan yang sempurna. Ideologi tidak akan pernah mati di ujung belati, tidak lancung di tiang gantung.

Jika itu masalahnya, langkah-langkah Densus yang mengedepankan kekuatan senjata untuk meredam radikalisme maha-

siswa adalah masalah tersendiri. Walaupun syah secara legal, tapi sulit diterima secara intelektual. Ideologi harus dikalahkan dengan konter ideologi, bukan dengan tangan besi. Persoalan mindset seharusnya diselesaikan dengan mindfullness, bukan senjata laras.

Karena itu, terhadap gejala radikalisme di kampus yang melibatkan akademisi tidak bisa diselesaikan dengan amunisi. Tidak bisa juga dengan memecat atau memenjarakan pejabat. Langkah tersebut justru bisa kontraproduktif. Karena terkesan dizholimi, masyarakat kelompok radikal justru memperoleh simpati.

Yang diperlukan adalah pendekatan semesta partisipatif. Radikalisme dan terorisme adalah masalah bersama, bukan pemerintah atau aparatur keamanan saja. Diperlukan langkah-langkah membangun kesadaran dan komitmen kolektif seluruh kekuatan bangsa. Beberapa waktu lalu, BIN menyebut 39 persen mahasiswa terpapar radikalisme. Sayangnya, Polisi dan BIN memilih bicara ke media daripada kepada pimpinan kampus. Semestinya aparat bisa berbagi data dan melakukan silent operation diikuti dengan pembinaan bersama secara ilmiah dan alamiah.

Pembinaan mahasiswa juga perlu lebih ditingkatkan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan perlu diperkuat tidak hanya secara isi, tetapi juga nilai dan karakter. Nilai dan karakter Pancasila melekat pada semua mata kuliah dan pada sistem serta perilaku seluruh civitas akademik dan lingkungan kampus. Perguruan tinggi juga bisa bekerja sama dengan ormas dan organisasi ekstra kampus. Selama ini persemaian paham radikal lebih banyak terjadi di luar kampus melalui organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Siapa pun yang peduli dengan masa depan Indonesia tidak ada alasan untuk mentolerir apalagi mendukung radikalisme dan

terorisme. Usaha-usaha pemerintah dan aparatur keamanan untuk mencegah dan memberantas terorisme perlu disambut dan diperkuat. Akan tetapi, pemerintah dan polisi tidak bekerja sendiri. Perlu melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan mawas diri. Radikalisme dan terorisme bersemayam bukan semata karena teologi tetapi juga soal eksistensi, jatidiri, dan harga diri.

Indonesia masih terlalu kuat untuk tumbang karena radikalisme dan terorisme. Berlebihan jika ada yang berpendapat Indonesia darurat radikalisme dan terorisme. Fondasi dan kultur sosial dan spiritual yang moderat masih cukup kuat. Tidak perlu operasi militer di kampus untuk membuat radikalisme mampus. Walaupun perlu waktu, pendekatan humanis dengan *soft power* nampaknya lebih strategis.[]

Berdzikirlah Agar Dunia Tenteram

> "(Orang-orang yang bertaubat) adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hati mereka tenteram dengan mengingat-Nya (dzikir). Ingatlah hanya dengan berdzikir kepada Allah hati menjadi tenteram." (Qs. al-Ra'd, 13:28).

Dzikr adalah salah satu ibadah di dalam Islam yang bertujuan untuk memohon ampunan (taubat), ketenangan, dan kedamaian hidup. Kaum beriman senantiasa berdzikir kepada Allah agar terjaga dari segala perbuatan dosa, nista, dan kejahatan. Dzikr memberikan keyakinan, kekuatan, dan harapan bagi manusia dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang kompleks.

Dalam Syariat Islam dzikir diamalkan dengan membaca *takbir, tahmid, taqdis,* dan kalimat *thayyibah* lainnya. Membaca Al-Qur'an juga merupakan bagian dari dzikr. Dalam pelaksanaannya dzikr merupakan rangkaian ibadah yang melekat dengan ibadah mahdlah seperti salat, puasa, dan haji.

Karena bertujuan untuk mendapatkan ketenangan, banyak orang berdzikir di tempat, waktu, dan bacaan yang khusus. Sebagian bahkan mengasingkan diri *(uzlah)* dari hiruk pikuk du-

niawi. Mereka berkontemplasi *(tahannus),* menyendiri, *ber'itikaf,* dan ber-*muhasabah* agar bisa sedekat mungkin berhubungan langsung, bermesraan, mengadu, dan mengaduh kepada Allah dengan doa-doa khusus. Dzikr dilakukan di tempat sunyi, tersembunyi, dan -terkadang- terisolasi dari keramaian. Dzikr seperti ini sering dikaitkan dengan amaliah para sufi, ahli tasawwuf, atau ahli tariqat.

Dalam diskursus teologi, dzikr terkadang dinisbatkan pada amalan ruhani yang cenderung fatalistik, altruistik, dan pesimistik. Dzikr dianggap sebagai perbuatan yang kontra rasionalitas (fikr). Ahli dzikr dianggap figure mistis dan klenik yang berpakaian kumal, kusut, dan kumuh. Kaum rasionalis mengkritik keras praktik dzikr sebagai sikap negatif yang membuat umat kalah, miskin, bodoh, dan terbelakang. Padahal, dalam Al-Qur'an dzikr berkaitan erat dengan ilmu, kearifan, dan kesalehan. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk berguru kepada kaum cendekiawan (ahl al-dzikr) untuk menimba ilmu. *"... Maka bertanyalah kepada para cendekiawan (ahl al-dzikr) jika kamu tidak mengetahui..."* (QS.???). Dzikr seperti ini merupakan spiritualitas yang sangat damai dan menenteramkan.

Dzikr Progresif

Di dunia Islam pemahaman dan praktik dzikr terus mengalami perkembangan. Dzikr lebih dimaknai sebagai usahauntuk manusia bertaqarrub kepada Allah dengan tetap aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Seseorang bisa terus melafadzkan dzikr sambil mengendarai mobil. Dzikr adalah aktivitas di mana seseorang memberikan respon spiritual-konstruktif terhadap masalah-masalah sosial. Misalnya, melihat kesenjangan ekonomi dan kemiskinan seseorang langsung memberikan uluran tangan

dan mengembangkan program pemberdayaan atau advokasi. Menyadari pentingnya hidup sehat, seseorang berusaha membangun budaya hidup sehat dan menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Di tengah dunia kapitalistik yang korup dan materialistic seseorang dengan penuh percaya diri bekerja di sektor professional dengan tetap memegang teguh prinsip kejujuran, ketekunan dan kesabaran. Demikianlah kurang lebih gambaran kaum sufi modern atau, dalam istilah Buya Hamka, disebut Tasawwuf Modern.

Untuk berdzikr seseorang tidak harus bersila di masjid. Banyak kalangan kelas menengah Muslim menggelar dzikr di hotel berbintang. Mereka kalangan profesional yang tidak canggung dengan pernak- pernik dunia modern tetapi tetap salih menunaikan salat dan gemar bersedekah. Inilah yang oleh Julia Howel disebut urban sufism. Sampai pada batas ini dzikr masih bernuansa ibadah dan tidak menimbulkan masalah serta kontroversi.

Dzikr Politik

Yang menjadi kontroversi adalah dzikr yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) MUI 2 Desember (212). Dzikr yang merupakan kelanjutan aksi 4 November dimaksudkan sebagai bagian dari perjuangan membela Islam atas penistaan yang dilakukan oleh Ahok. Massa pengunjuk rasa menuntut Ahok dijadikan tersangka dan dipenjara.

Sekarang Ahok sudah berstatus tersangka. Tuntutan selanjutnya adalah Ahok ditahan. Dzikir yang dikatakan sebagai aksi super damai itu dilakukan sebagai perjuangan spiritual untuk memastikan proses hukum berjalan. Peserta aksi menengarai polisi dan aparatur kejaksaan main mata, tidak bersungguh-sung-

guh menegakkan hukum. Dzikir ini oleh sebagian kalangan dinilai sarat muatan politik.

Karena niat yang politis itulah banyak pihak yang khawatir dzikir 212 berpotensi anarkistis. Memang agak ironis. Bagaimana masyarakat khawatir dengan kegiatan dzikir. Kekhawatiran masyarakat mungkin karena niatnya bernuansa politik dan adanya pengalaman aksi sebelumnya yang sempat diwarnai kekerasan.

Kalau dzikir diselenggarakan di Monas juga tidak masalah. Itu hanya soal tempat. Di mana pun manusia bisa melaksanakan dzikr untuk mengingat, dan beribadah kepada Allah.

Dzikir adalah ibadah yang bertujuan untuk menggapai hidup yang damai. Karena itu, damai harus mewujud di bumi Indonesia setelah dzikir 212. Jika setelah dzikir Indonesia justru semakin tidak menentu, kesejahteraan semakin jauh, dan masyarakat terpecah belah maka semua pihak harus kembali meluruskan niat dalam berdzikir.

Waktunya bangsa Indonesia berdzikir. Dzikir bisa dilaksanakan di rumah, mushalla, masjid, hotel, kantor, Monas dan tempat-tempat yang suci dan bersih lainnya. Di mana pun dan darimanapun Allah Maha Mendengar doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya yang ikhlas meminta kepada-Nya. *"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku, maka jawablah sesungguhnya Aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa mereka yang meminta kepad-Ku..."* (Qs. 2, al-Baqarah: 186).

Banyak sekali masalah di negeri ini. Jika bangsa ini berdziki rdengan tulus maka damailah bumi pertiwi. Berdzikirlah agar dunia tenang dan tenteram.

Indeks

G

H

I

J

K

L

M

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Profil Penulis

ABDUL MU'TI adalah dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2014-Sekarang). Sebelumnya Mu'ti mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1993-2014).

Jenjang pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum (Kudus, 1980), Madrasah Tsanawiyah Negeri (Kudus, 1983), Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial di Kudus (Kudus, 1986), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo (Semarang, 1991), Pembibitan Calon Dosen IAIN (Jakarta, 2002-2003), School of Education, Flinders University of South Australia (Adelaide, 1997), Short Course on Governance and Shariah the University of Birmingham (Birmingham, UK, 2005), dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008).

Tulisan dan karya Mu'ti dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah di dalam dan di luar negeri serta media massa nasional antara lain *Kompas, Republika, Sindo, Suara Merdeka, Media Indonesia, The Jakarta Post,* dan sebagainya.

Di antara buku yang ditulis adalah *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan* (al-Wasath Publishing House, 2009), *Inkulturasi Islam* (al-Wasath Publishing House, 2009), *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim Kristen dalam Pendidikan* (al-Wasath, 2009- bersama Fajar Rizaulhaq), *Buku Pluralisme Positif: Konsep dan Implementasi Dalam Pendidikan Muhammadiyah* (Majelis Pustaka Informasi PP. Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019- bersama Azaki Kairudin) dan buku *Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism*.

Selain itu, Mu'ti juga menjadi editor dan kontributor buku *Islam in Indonesia: A to Z Basic Reference* (CDCC, 2010), *Bijak Bertindak: Mengambil Keputusan Berdasar Etika Agama,* (al-Wasath Publishing House, 2016), *Taawun Untuk Negeri: Transformasi al-Maun Dalam Konteks Keindonesiaan,* (Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah dan Muhammadiyah University Press: Februari, 2019), *Beragama yang Mencerahkan,* (Universitas Muhammadiyah Malang, Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah: Mei, 2019), *Beragama dan Pendidikan yang Mencerahkan,* (Uhamka Press: 2019), dan *Pluralisme Positif,* (Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah: Mei, 2019).

Selain posisinya sebagai sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020), Mu'ti juga aktif bergelut dalam dunia pendidikan dan dialog antariman. Sekarang ini, Mu'ti menjabat ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) periode 2019-2023, setelah sebelumnya menjabat ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) periode 2011-2017 dan anggota BAN-S/M periode 2006-2011.

Di level internasional, Mu'ti adalah anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007-2009), Executice Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-Sekarang). Penerima penghargaan Australian Alumni Award (2008), Mu'ti aktif dalam berbagai forum dialog dan kerja sama antar iman di dalam dan di luar negeri.

Mu'ti dapat dihubungi via email: masmukti47@gmail.com